



Kelas 11

EKONOMI

**Kegiatan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat:
Buku Pegangan Ekonomi untuk Siswa Kelas 11**

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas terbitnya e-book Ekonomi ini yang merupakan bagian dari upaya menghadirkan pembelajaran yang lebih mudah diakses oleh seluruh pelajar Indonesia. Ekonomi adalah mata pelajaran yang mempelajari prinsip, konsep, dan aktivitas ekonomi, mulai dari kebutuhan, produksi, distribusi, hingga konsumsi, yang bermanfaat untuk memahami kehidupan ekonomi dan membangun keterampilan kewirausahaan.

E-book ini disusun berdasarkan Capaian Pembelajaran Ekonomi Fase E (sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 008/H/KR/2022 Tentang Capaian Pembelajaran Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah Pada Kurikulum Merdeka). Konten e-book ini dirancang agar peserta didik dapat memahami materi Ekonomi secara komprehensif, mengasah keterampilan berpikir kritis, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain materi utama, e-book ini juga dilengkapi dengan latihan soal, pembahasan, serta tautan ke sumber belajar tambahan seperti video pembelajaran interaktif.

E-book ini merupakan bagian dari platform [Fitri](#), sebuah platform pembelajaran digital yang menyediakan akses gratis ke berbagai materi belajar, termasuk e-book, latihan soal, dan video pembelajaran interaktif untuk seluruh anak Indonesia. Fitri hadir sebagai wujud kontribusi nyata dalam mendukung pemerataan akses pendidikan berkualitas di Indonesia. Dengan semangat gotong royong dan inklusi, Fitri berkomitmen untuk membantu seluruh siswa, di mana pun berada, agar dapat belajar secara mandiri, efektif, dan menyenangkan. Hal ini selaras dengan tujuan besar pendidikan Indonesia, yaitu mewujudkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung tersedianya e-book ini. Semoga kehadiran e-book Ekonomi ini dapat memberikan manfaat nyata dalam proses belajar peserta didik dan turut berkontribusi dalam meningkatkan literasi bangsa.

Jakarta, Juni 2025

Tim Fitri

Daftar Isi

BAB 1: BADAN USAHA SEBAGAI PILAR PEREKONOMIAN	5
1. Pemahaman tentang Badan Usaha	7
2. Peran Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah	15
3. Peran dan Karakteristik Badan Usaha Milik Swasta	19
4. Prinsip, Sejarah, dan Perkembangan Koperasi	23
5. Pengelolaan dalam Badan Usaha	34
Rangkuman	47
Latihan Soal	49
Referensi	51
BAB 2: PENDAPATAN NASIONAL DAN KETIMPANGAN EKONOMI	52
1. Pendapatan Nasional	54
2. Distribusi Pendapatan Nasional	68
Rangkuman	75
Latihan Soal	76
Referensi	78
BAB 3: KETENAGAKERJAAN	79
1. Ketenagakerjaan	81
2. Sistem Pengupahan	88
3. Pengangguran	94
Rangkuman	100
Latihan Soal	101
Referensi	103
BAB 4: PERMINTAAN DAN PENAWARAN UANG, INDEKS HARGA, DAN INFLASI	104
1. Teori Permintaan dan Penawaran Uang	106
2. Indeks Harga.....	115
3. Inflasi.....	121
Rangkuman	128
Latihan Soal	129
Referensi	131
BAB 5: KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER	132
1. Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro.....	134
2. Kebijakan Moneter	141
3. Kebijakan Fiskal	147
4. APBN dan APBD	151
Rangkuman	158

Latihan Soal.....	160
Referensi.....	162



BAB 1: BADAN USAHA SEBAGAI PILAR PEREKONOMIAN

Karakter Pelajar Pancasila

Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlaq mulia: menjaga moral.

Bernalar kritis: memahami konsep usaha.

Kreatif: mampu mengembangkan pemahaman tentang badan usaha.

Tujuan Pembelajaran: Mengurai dan Memahami Badan Usaha dalam Sistem Ekonomi

1. Memahami Konsep Badan Usaha

- ▷ Memahami konsep badan usaha dalam perekonomian.
- ▷ Mendeskripsikan karakteristik badan usaha.

2. Mendeskripsikan Diferensiasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

- ▷ Menganalisis perbedaan BUMN dan BUMD.
- ▷ Menguraikan peran dan manfaat BUMN dan BUMD dalam perekonomian.

3. Menjelaskan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)

- ▷ Menguraikan jenis-jenis BUMS.
- ▷ Menjelaskan peran BUMS.

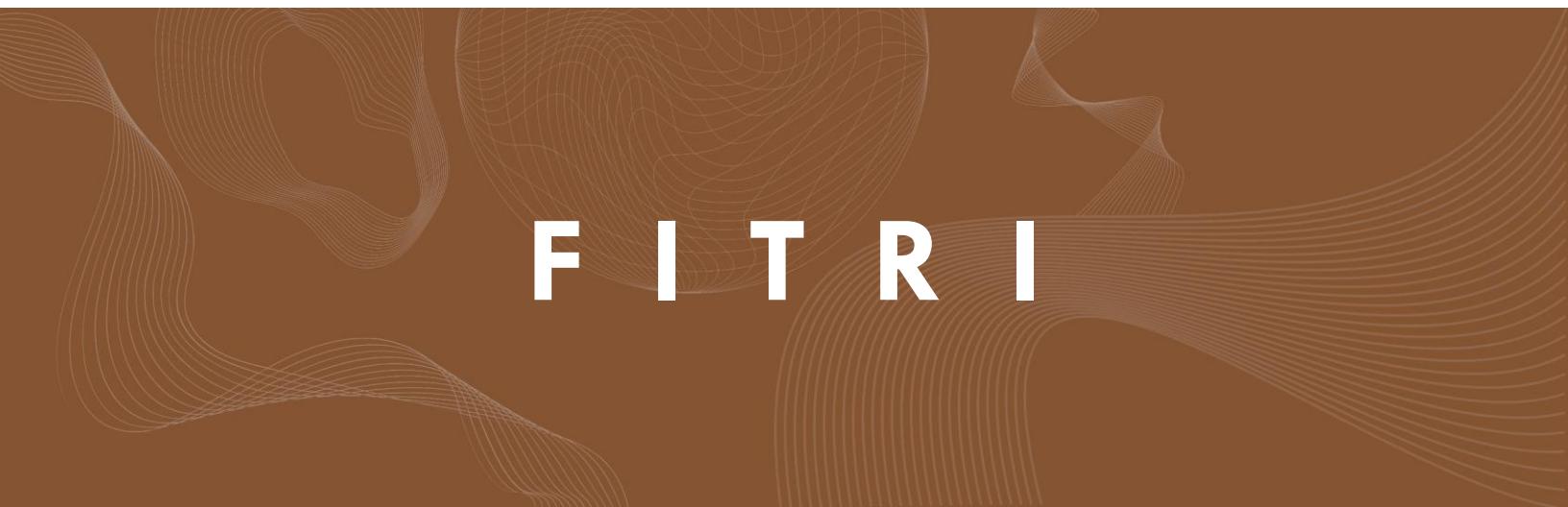
4. Mengkaji Sistem Koperasi di Indonesia

- ▷ Menjelaskan peran dan manfaat koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan.
- ▷ Mengidentifikasi prinsip-prinsip koperasi.

Kata Kunci: Badan Usaha, BUMN, BUMD, BUMS, Koperasi, Manajemen.

5. Menjelaskan Prinsip Manajemen dalam Badan Usaha

- ▷ Memahami prinsip-prinsip manajemen dalam badan usaha.
- ▷ Menjelaskan fungsi dan peran penerapan manajemen dalam operasional bisnis.



F I T R I



1. Pemahaman tentang Badan Usaha

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah "badan usaha" dan "perusahaan," baik dalam pemberitaan ekonomi maupun dalam diskusi bisnis. Namun, tahukah kita bahwa kedua istilah tersebut memiliki makna yang berbeda? Badan usaha memainkan peran penting dalam perekonomian, baik dalam skala nasional maupun lokal, dengan berbagai bentuk dan fungsi yang unik. Pemahaman yang mendalam mengenai badan usaha akan membantu kita memahami bagaimana sektor ekonomi bekerja, bagaimana lapangan kerja tercipta, serta bagaimana nilai tambah ekonomi dihasilkan.

Esensi Badan Usaha

a. Definisi Badan Usaha

Dalam perspektif ekonomi dan hukum, badan usaha didefinisikan sebagai entitas yang dibentuk dengan tujuan menghasilkan barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara yuridis, badan usaha memiliki legalitas dan regulasi yang mengatur keberadaannya, seperti perizinan, bentuk kepemilikan, serta tanggung jawab hukum. Sementara itu, secara ekonomis, badan usaha berfungsi sebagai motor penggerak aktivitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

b. Irisan antara Badan Usaha dan Perusahaan

Meskipun sering digunakan secara bergantian, badan usaha dan perusahaan memiliki perbedaan yang mendasar. Badan usaha merujuk pada entitas yang menjalankan kegiatan ekonomi secara legal, sementara perusahaan merupakan unit teknis atau operasional dalam suatu badan usaha yang berfokus pada proses produksi barang atau jasa.

Secara lebih rinci, perbedaan antara badan usaha dan perusahaan dapat dilihat dalam berbagai aspek, seperti tujuan, fungsi, dan bentuk. Badan usaha memiliki tujuan yang lebih luas, termasuk aspek hukum dan sosial, sedangkan perusahaan lebih berorientasi pada kegiatan produksi. Fungsi badan usaha mencakup perencanaan dan pengelolaan ekonomi, sementara perusahaan lebih berfokus pada operasional sehari-hari. Dari segi bentuk, badan usaha dapat berupa BUMN, BUMD, atau BUMS, sedangkan perusahaan dapat berupa pabrik, cabang, atau unit produksi tertentu.

Tabel Perbedaan Utama antara Badan Usaha dan Perusahaan

Aspek	Badan Usaha	Perusahaan
Tujuan	Memastikan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan hukum	Menghasilkan barang atau jasa untuk pasar
Fungsi	Mengatur strategi bisnis, pengelolaan modal, dan tanggung jawab hukum	Fokus pada produksi dan operasional bisnis
Bentuk	BUMN, BUMD, BUMS, Koperasi	Pabrik, cabang, unit produksi

Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat lebih jelas dalam melihat peran badan usaha dalam perekonomian serta bagaimana setiap perusahaan beroperasi dalam kerangka badan usaha yang lebih besar.

Peran Badan Usaha dalam Ekonomi

a. Peran Komersial Badan Usaha

Badan usaha memiliki fungsi utama dalam menciptakan nilai ekonomi melalui produksi dan distribusi barang atau jasa. Sebagai entitas yang berorientasi pada keuntungan, badan usaha harus memastikan keberlanjutannya finansialnya melalui strategi bisnis yang efektif. Dalam menjalankan aktivitasnya, badan usaha tidak hanya berfokus pada aspek komersial, tetapi juga pada pengelolaan internal yang mencakup fungsi manajemen dan fungsi operasional.

▷ Fungsi Manajerial dalam Badan Usaha

Dalam dunia bisnis, manajemen berperan sebagai penggerak utama agar badan usaha dapat berjalan secara efektif dan efisien. Fungsi manajerial melibatkan beberapa aspek penting, yaitu:

- **Perencanaan:** Badan usaha harus memiliki rencana strategis yang jelas untuk mencapai tujuannya. Perencanaan mencakup penetapan visi, misi, strategi pasar, serta proyeksi keuangan yang matang agar bisnis dapat bertahan dan berkembang.
- **Pengorganisasian:** Setelah perencanaan ditetapkan, badan usaha harus membangun struktur organisasi yang tepat, mendistribusikan tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing unit kerja agar operasional dapat berjalan dengan baik.
- **Motivasi:** Kepemimpinan yang baik dalam badan usaha harus mampu memotivasi karyawan untuk bekerja dengan produktif. Motivasi dapat diberikan melalui insentif, jenjang karier, atau lingkungan kerja yang mendukung.
- **Pengawasan:** Agar tetap berada dalam jalur yang sesuai dengan perencanaan, badan usaha perlu melakukan pengawasan terhadap berbagai aspek, seperti keuangan, produksi, dan kinerja karyawan. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui audit, evaluasi berkala, atau penggunaan teknologi untuk pemantauan bisnis.

▷ Fungsi Operasional dalam Badan Usaha

Fungsi operasional mencakup pengelolaan berbagai aspek yang mendukung kelangsungan bisnis sehari-hari. Beberapa aspek utama dalam fungsi operasional meliputi:

- **Manajemen Sumber Daya Manusia** merupakan aset penting dalam badan usaha. Pengelolaan SDM melibatkan perekrutan, pelatihan, serta pengembangan keterampilan karyawan agar mereka dapat memberikan kontribusi yang optimal. Dengan SDM yang kompeten, produktivitas badan usaha dapat meningkat, dan daya saing bisnis semakin kuat.
- **Produksi** adalah inti dari operasional badan usaha yang menentukan kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang dihasilkan. Dalam menjalankan proses produksi, badan usaha harus menerapkan prinsip biaya minimal, keuntungan maksimal, yaitu dengan mengoptimalkan penggunaan bahan baku, efisiensi tenaga kerja, serta inovasi teknologi yang tepat guna.

Selain itu, badan usaha harus memastikan bahwa kualitas produk



Proses produksi secara manual perlahan harus diinisiasi untuk berinovasi dengan teknologi tepat guna - shutterstock.com.2180286747

tetap terjaga tanpa meningkatkan biaya produksi secara berlebihan. Hal ini dapat dicapai melalui inovasi, penerapan metode produksi yang efisien, serta pengelolaan rantai pasokan yang baik. Dengan strategi ini, badan usaha dapat menawarkan produk yang kompetitif di pasar tanpa mengorbankan profitabilitas.

- **Pemasaran** berperan penting dalam memperkenalkan produk kepada konsumen serta membangun loyalitas pelanggan. Strategi pemasaran yang efektif melibatkan riset pasar, penentuan segmentasi pelanggan, serta penggunaan media promosi yang tepat. Dalam era digital, badan usaha juga harus memanfaatkan teknologi pemasaran berbasis internet untuk meningkatkan jangkauan pasar dan daya saing bisnis.
- **Pembelanjaan** merupakan aspek krusial dalam badan usaha yang mencakup pengelolaan dana untuk operasional, investasi, serta pengembangan bisnis. Keputusan dalam pengelolaan keuangan harus mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal agar bisnis dapat berkembang tanpa mengalami tekanan finansial yang berlebihan.

b. Peran Sosial Badan Usaha

Selain bertujuan untuk memperoleh keuntungan, badan usaha juga memiliki tanggung jawab sosial yang harus dijalankan. Peran sosial ini dapat dilihat dari tiga aspek utama. Pertama, badan usaha berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja serta distribusi pendapatan yang lebih merata. Dengan menyediakan pekerjaan bagi masyarakat, badan usaha membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Kedua, badan usaha berperan dalam membekali tenaga kerja dengan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia industri. Melalui pelatihan dan pengembangan karyawan, badan usaha tidak hanya meningkatkan kualitas tenaga kerja di internal perusahaan, tetapi juga berkontribusi dalam peningkatan kualitas SDM di tingkat nasional.

Ketiga, badan usaha juga memiliki tanggung jawab untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan konsep bisnis berkelanjutan, seperti pengurangan limbah, penggunaan energi ramah lingkungan, serta partisipasi dalam kegiatan sosial dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

c. Peran Badan Usaha dalam Pembangunan Ekonomi

Badan usaha merupakan salah satu pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Melalui investasi, penciptaan lapangan kerja, serta kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB), badan usaha membantu meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Selain itu, badan usaha juga berperan dalam mendorong inovasi dan pengembangan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi produksi serta menciptakan produk berkualitas tinggi.

Klasifikasi Badan Usaha

a. Klasifikasi Badan Usaha Berdasarkan Jenis Kegiatannya

▷ **Badan Usaha di Sektor Ekstraktif**

Badan usaha di sektor ekstraktif berfokus pada kegiatan pengambilan sumber daya alam langsung dari lingkungan tanpa proses pengolahan lebih lanjut. Sektor ini meliputi kegiatan seperti pertambangan, eksplorasi minyak bumi, serta penangkapan ikan laut. Contoh badan usaha di Indonesia yang bergerak di bidang ini adalah PT Freeport Indonesia, yang menambang emas dan tembaga.

▷ **Badan Usaha di Sektor Agraris**

Badan usaha agraris mencakup kegiatan yang berkaitan dengan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan darat. Sektor ini berkontribusi dalam penyediaan bahan pangan serta bahan baku industri. Salah satu contoh badan usaha di sektor ini adalah PT Perkebunan Nusantara (PTPN), yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan karet.

▷ **Badan Usaha di Sektor Industri**

Badan usaha industri mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang siap digunakan oleh konsumen. Industri manufaktur merupakan bagian dari sektor ini dan berperan penting dalam perekonomian. Contohnya adalah PT Unilever Indonesia, yang memproduksi barang konsumsi sehari-hari seperti sabun dan makanan.

▷ **Badan Usaha di Sektor Perdagangan**

Badan usaha yang bergerak di sektor perdagangan berperan sebagai perantara dalam distribusi barang dari produsen ke konsumen. Kegiatan yang dilakukan mencakup grosir, eceran, dan ekspor-impor. Contoh badan usaha di sektor ini adalah PT Indomarco Prismatama (Indomaret) dan PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart), yang mengelola jaringan ritel modern di Indonesia.



Alfamart dan Indomaret mendominasi industri ritel modern di Indonesia - shutterstock.com.2349021729

▷ **Badan Usaha di Sektor Jasa**

Badan usaha di sektor jasa menawarkan layanan yang membantu individu atau perusahaan dalam memenuhi kebutuhannya, tanpa menghasilkan produk fisik. Sektor ini meliputi layanan keuangan, transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Contoh badan usaha yang bergerak di bidang ini adalah Bank Mandiri di sektor keuangan.

b. Klasifikasi Badan Usaha Berdasarkan Kepemilikan Modal

▷ **Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)**

BUMS merupakan badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh individu atau kelompok swasta. Keberadaannya bertujuan untuk memperoleh keuntungan serta turut serta dalam pembangunan ekonomi. Contoh badan usaha swasta di Indonesia adalah PT Indofood Sukses Makmur, yang bergerak di industri makanan dan minuman.

▷ **Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**

BUMN adalah badan usaha yang kepemilikan modalnya sepenuhnya atau mayoritas dikuasai oleh negara. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan pelayanan publik serta mendukung pembangunan ekonomi nasional. Contoh BUMN di Indonesia PT Kereta Api Indonesia (KAI), yang melayani transportasi perkeretaapian.

▷ **Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)**

BUMD adalah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan beroperasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Badan usaha ini umumnya bergerak di sektor layanan publik atau sektor ekonomi strategis. Contohnya adalah PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), yang menyediakan layanan air bersih di berbagai daerah.

▷ **Badan Usaha Campuran**

Badan usaha campuran adalah perusahaan yang kepemilikan modalnya berasal dari gabungan antara pemerintah dan pihak swasta. Model kepemilikan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme dalam pengelolaan bisnis, sekaligus tetap mempertahankan kepentingan publik. Contoh badan usaha campuran di Indonesia adalah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara dan sebagian lainnya oleh investor swasta.

c. **Klasifikasi Badan Usaha Berdasarkan Wilayah Operasionalnya**

▷ **Badan Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)**

PMDN adalah badan usaha yang modal investasinya berasal dari dalam negeri, baik oleh individu maupun perusahaan lokal. Badan usaha jenis ini berperan dalam meningkatkan perekonomian nasional serta memperkuat industri domestik. Contoh badan usaha PMDN di Indonesia adalah PT Kalbe Farma Tbk, yang beroperasi di industri farmasi.

▷ **Badan Usaha Penanaman Modal Asing (PMA)**

PMA adalah badan usaha yang modal investasinya berasal dari investor luar negeri. Badan usaha ini biasanya bekerja sama dengan mitra lokal atau beroperasi sebagai perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia. Contoh badan usaha PMA di Indonesia adalah PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, yang merupakan perusahaan otomotif dengan investasi dari Jepang, serta PT Huawei Tech Investment, yang bergerak di bidang teknologi dan komunikasi.

Struktur Badan Usaha di Indonesia

a. **Badan Usaha yang Dimiliki oleh Pemerintah**

Berikut adalah kategori Badan Usaha Milik Pemerintah

▷ **Badan Usaha Milik Negara (BUMN)** adalah badan usaha yang kepemilikannya dikuasai oleh pemerintah pusat dengan tujuan memberikan pelayanan publik serta meningkatkan perekonomian nasional. BUMN berperan dalam mengelola sektor-sektor strategis yang berdampak luas bagi masyarakat, seperti energi, transportasi, dan keuangan.

▷ **Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)** merupakan badan usaha yang kepemilikannya dikelola oleh pemerintah daerah untuk melayani kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. BUMD biasanya beroperasi di sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan kebutuhan publik, seperti penyediaan air bersih, transportasi, dan jasa keuangan.

b. **Badan Usaha yang Dimiliki oleh Swasta**

▷ **Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)** adalah entitas bisnis yang modal dan pengelolaannya sepenuhnya dimiliki oleh individu atau kelompok non-pemerintah. Tujuan utama badan usaha ini adalah untuk memperoleh keuntungan dengan menjalankan aktivitas ekonomi dalam berbagai sektor, mulai dari manufaktur hingga jasa. BUMS memiliki peran penting dalam meningkatkan investasi dan daya saing nasional.

▷ **BUMS** dapat dikategorikan berdasarkan struktur kepemilikan dan bentuk hukumnya, seperti perusahaan perseorangan, persekutuan komanditer (CV), firma, dan perseroan terbatas (PT).



BUMN Republik Indonesia -
shutterstock.com.2415705531

Perusahaan perseorangan dimiliki oleh individu tanpa pemisahan aset pribadi dan bisnis, sedangkan PT memiliki struktur kepemilikan saham yang lebih kompleks.

c. Koperasi sebagai Badan Usaha Berbasis Keanggotaan

Koperasi merupakan badan usaha yang berlandaskan atas kekeluargaan dan gotong royong, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Undang-undang ini menegaskan bahwa koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui kegiatan ekonomi bersama.

Dalam operasionalnya, koperasi berpegang pada prinsip keanggotaan yang bersifat sukarela, pengelolaan demokratis, serta distribusi keuntungan yang adil berdasarkan partisipasi anggota. Di Indonesia, salah satu koperasi yang eksis beroperasional adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang berfokus pada layanan keuangan.

Faktor-Faktor dalam Menentukan Bentuk Badan Usaha

a. Kebutuhan Modal dalam Pendirian Badan Usaha

Salah satu aspek utama yang harus diperhatikan dalam memilih bentuk badan usaha adalah jumlah modal yang dibutuhkan. Besarnya modal akan mempengaruhi jenis badan usaha yang dapat dibentuk, baik itu dalam skala kecil seperti usaha perseorangan maupun dalam skala besar seperti perseroan terbatas. Selain itu, sumber modal juga menjadi pertimbangan, apakah berasal dari dana pribadi, pinjaman perbankan, atau investasi dari pihak lain.

b. Jenis Kegiatan Usaha yang Dijalankan

Setiap badan usaha memiliki karakteristik yang berbeda tergantung pada bidang usaha yang dijalankannya. Misalnya, usaha di sektor jasa lebih fleksibel dibandingkan usaha di sektor manufaktur yang membutuhkan fasilitas produksi. Oleh karena itu, pemilihan bentuk badan usaha harus disesuaikan dengan jenis kegiatan yang akan dilakukan agar operasional bisnis dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

c. Tingkat Risiko dalam Aktivitas Bisnis

Setiap bentuk badan usaha memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda. Misalnya, usaha perseorangan memiliki risiko yang lebih tinggi karena pemilik bertanggung jawab penuh atas seluruh kewajiban bisnisnya, termasuk utang dan kerugian. Sebaliknya, dalam perseroan terbatas (PT), risiko pemilik terbatas hanya pada jumlah modal yang ditanamkan. Oleh karena itu, pemilihan bentuk badan usaha harus mempertimbangkan sejauh mana pelaku usaha siap menanggung risiko yang ada.

d. Regulasi Hukum dan Kebijakan Pemerintah

Bentuk badan usaha juga harus disesuaikan dengan regulasi yang berlaku, baik dari segi perizinan, perpajakan, maupun kewajiban hukum lainnya. Pemerintah telah mengatur berbagai bentuk badan usaha melalui undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta regulasi yang mengatur koperasi dan badan usaha lainnya. Kepatuhan terhadap regulasi ini penting agar bisnis dapat berjalan secara legal dan terhindar dari sanksi hukum.

e. Mekanisme Pembagian Keuntungan

Cara pembagian keuntungan juga menjadi faktor penentu dalam memilih bentuk badan usaha. Dalam usaha perseorangan, seluruh keuntungan menjadi hak pemilik, sedangkan dalam perusahaan berbentuk persekutuan atau perseroan terbatas, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan atau kepemilikan saham. Adapun koperasi, membagikan keuntungan dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagi sesuai dengan kontribusi anggota.

Contoh Soal

Sebuah kelompok usaha kecil menengah (UKM) di bidang produksi makanan ringan ingin mengembangkan usahanya dengan memperluas pasar dan meningkatkan kapasitas produksi. Pemilik usaha sedang mempertimbangkan untuk mengubah bentuk badan usahanya dari usaha perseorangan menjadi badan usaha yang lebih besar, seperti CV (Commanditaire Venootschap) atau Perseroan Terbatas (PT).

Pertanyaan:

Berdasarkan analisis Anda, bentuk badan usaha mana yang lebih cocok bagi UKM tersebut? Berikan alasan yang mendukung jawaban Anda!

Pembahasan:

Pertimbangkan pemilik UKM harus memperhatikan aspek permodalan, tanggung jawab hukum, fleksibilitas pengelolaan, serta prospek pertumbuhan usaha.

Jika UKM ini ingin berkembang secara bertahap dengan tetap mempertahankan fleksibilitas dalam pengelolaan, maka CV bisa menjadi pilihan yang lebih cocok karena lebih mudah didirikan dan tidak membutuhkan modal besar. Meskipun di sisi lain, CV tidak dapat menerbitkan saham, sehingga potensi ekspansi dengan menarik investor terbatas. Ditambah lagi, kepercayaan dari institusi keuangan atau investor biasanya lebih rendah dibandingkan PT.

Namun, jika pemilik UKM ingin mempercepat pertumbuhan bisnis dengan akses modal yang lebih luas dan ingin meminimalkan risiko pribadi, maka PT akan lebih ideal. Dalam bentuk PT, keberlanjutan usaha lebih terjamin karena kepemilikan dapat dialihkan melalui saham. Namun perlu diperhatikan juga bahwa proses pendirian PT lebih rumit dan membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan CV. Kewajiban administratif bagi PT juga lebih kompleks, seperti laporan keuangan yang harus disusun secara berkala.

Fakta Unik Seputar Ekonomi

BUMN dengan Laba Tertinggi di Indonesia

Tahukah Anda bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) merupakan salah satu BUMN dengan laba tertinggi di Indonesia? Pada tahun 2023, BRI mencetak laba bersih mencapai Rp51,4 triliun, menjadikannya salah satu perusahaan negara paling menguntungkan. Keberhasilan ini didukung oleh strategi digitalisasi dan fokus pada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.



Logo BRI -
shutterstock.com.
2344110713

Kegiatan Kelompok 1

Mengamati Jenis Badan Usaha di Sekitar

Tujuan: Mengelompokkan badan usaha di lingkungan sekitar berdasarkan kepemilikan.

Langkah Kegiatan:

1. Bentuk kelompok 2–3 orang.
2. Catat minimal 10 badan usaha di sekitar tempat tinggal.
3. Cari informasi jenis kepemilikan masing-masing badan usaha.
4. Susun data dalam tabel sederhana dan beri penjelasan singkat.
5. Presentasikan hasil tabel di depan kelas.



2. Peran Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

a. Definisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN berperan dalam menyediakan barang dan jasa yang vital bagi masyarakat serta mendukung perekonomian nasional, terutama dalam sektor-sektor yang tidak dapat sepenuhnya diberikan kepada swasta.

b. Peran BUMN dalam Perekonomian

Peran strategis BUMN dalam perekonomian Indonesia dapat dikaitkan dengan Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, BUMN bertugas untuk memastikan ketersediaan layanan publik, stabilitas ekonomi, serta pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

Di tengah perkembangan globalisasi, BUMN juga harus menyesuaikan diri dengan aturan perdagangan internasional, seperti yang ditetapkan oleh World Trade Organization (WTO) dan ASEAN Free Trade Area (AFTA). Persaingan yang semakin ketat menuntut BUMN untuk meningkatkan efisiensi dan daya saingnya agar tetap relevan di pasar internasional.

Selain itu, keberadaan BUMN juga menjadi pendorong utama dalam pengembangan sektor industri dan infrastruktur. Melalui investasi yang dilakukan dalam proyek-proyek strategis, BUMN dapat meningkatkan kapasitas produksi nasional serta membuka peluang kerja bagi masyarakat luas. Hal ini menjadikan BUMN sebagai pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.



World Trade Organization (WTO) merupakan organisasi yang mengatur aturan perdagangan antar negara - shutterstock.com.1658523391

c. Klasifikasi Badan Usaha Milik Negara

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, BUMN terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum).

▷ **Perusahaan Perseroan (Persero)**

Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas di mana modalnya terdiri dari saham, dan sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. Tujuan utama persero adalah untuk mengejar keuntungan sekaligus memberikan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat. Contoh BUMN yang berbentuk persero adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk di sektor perbankan, dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk di sektor telekomunikasi.

▷ **Perusahaan Umum (Perum)**

Perum adalah BUMN yang bergerak di sektor layanan publik dan bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat dengan prinsip efisiensi dan keberlanjutan, tanpa mengutamakan keuntungan sebagai tujuan utama. Perum DAMRI (sektor transportasi umum) serta Perum BULOG (sektor ketahanan pangan nasional) merupakan diantara contoh BUMN dalam bentuk Perum.

d. Keunggulan dan Kelemahan Badan Usaha Milik Negara

▷ **Keunggulan BUMN**

- BUMN berperan dalam menyediakan layanan dasar bagi masyarakat, seperti listrik, air bersih, dan bahan bakar.
- Melalui kendali pemerintah, BUMN dapat membantu menjaga keseimbangan harga dan pasokan dalam situasi krisis ekonomi (stabilitas ekonomi).
- BUMN berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja serta mendorong pemerataan pembangunan di berbagai daerah.

▷ **Kelemahan BUMN**

- Beberapa BUMN mengalami kendala dalam manajemen dan operasional akibat birokrasi yang kompleks (tidak efisien).
- BUMN sering kali menjadi objek kebijakan yang dipengaruhi kepentingan politik, sehingga tidak selalu berorientasi pada efisiensi bisnis.
- Beberapa BUMN masih membutuhkan dukungan keuangan dari negara untuk tetap beroperasi, yang dapat membebani anggaran negara jika tidak dikelola dengan baik.

Peran dan Karakteristik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

a. Definisi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mengelola sektor-sektor ekonomi tertentu dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pembangunan daerah. BUMD didirikan dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan publik di daerahnya serta sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

b. Peran BUMD dalam Perekonomian

Sebagai bagian dari sistem perekonomian daerah, BUMD memiliki peranan penting dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Berikut adalah beberapa peran strategis BUMD dalam perekonomian:

▷ **Menyediakan layanan publik yang esensial.** BUMD berperan dalam memastikan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat, seperti air bersih, transportasi umum, dan energi.

- ▷ **Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.** Keberadaan BUMD membantu menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
- ▷ **Menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).** Melalui berbagai aktivitas usahanya, BUMD memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

c. Jenis Badan Usaha Milik Daerah

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015, BUMD terdiri dari dua jenis utama berdasarkan bentuk dan fungsi operasionalnya, yaitu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Perumda berfokus pada penyediaan layanan publik tanpa orientasi utama pada keuntungan, seperti penyediaan air bersih oleh PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum). Sementara itu, Perseroda beroperasi sebagai perusahaan yang lebih berorientasi bisnis dengan tujuan menghasilkan laba, seperti Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang beroperasi dalam sektor perbankan di berbagai provinsi.

d. Keunggulan dan Kelemahan Badan Usaha Milik Daerah

- ▷ **Keunggulan BUMD**
 - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dengan menyediakan layanan dan produk yang dibutuhkan tanpa ketergantungan pada perusahaan swasta nasional atau asing.
 - Menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah dan peningkatan kualitas layanan publik.
 - Memiliki fleksibilitas dalam memahami kebutuhan daerah karena dikelola langsung oleh pemerintah daerah yang lebih mengenal kondisi dan potensi ekonomi lokal.
 - Memperkuat ekonomi daerah dengan memberikan kesempatan kerja serta mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) di wilayahnya.
- ▷ **Kelemahan BUMD**
 - Rentan terhadap inefisiensi dan birokrasi yang berbelit karena pengelolaannya sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik daerah.
 - Terbatas dalam akses pendanaan dan inovasi bisnis, terutama dibandingkan dengan perusahaan swasta yang lebih fleksibel dalam menarik investasi.
 - Kurangnya profesionalisme dalam manajemen dan pengelolaan usaha, yang menyebabkan beberapa BUMD mengalami kesulitan dalam bersaing dengan sektor swasta.
 - Potensi intervensi politik yang tinggi, yang dapat menghambat pengambilan keputusan berbasis bisnis dan menyebabkan kurangnya transparansi dalam operasional.

Fakta Unik Seputar Ekonomi

Bank Jatim: BUMD Perbankan Terbesar yang Mampu Mengalahkan Beberapa Bank Nasional

Bank Jatim adalah salah satu contoh sukses BUMD yang mampu bersaing dengan bank swasta nasional. Pada tahun 2023, Bank Jatim mencatatkan laba bersih lebih dari **Rp1,59 triliun**, bahkan mengungguli beberapa bank swasta yang memiliki jaringan nasional. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa BUMD dapat berkembang pesat jika dikelola dengan profesional.



Bank Jatim,
kebanggaan
warga Jawa Timur -
shutterstock.com.
1967026972

Contoh Soal

Pemerintah Daerah Provinsi X memiliki Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang berperan dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat setempat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, PDAM tersebut mengalami kendala dalam operasionalnya, seperti kebocoran pipa yang tinggi, layanan pelanggan yang kurang optimal, serta rendahnya tingkat investasi dalam pengembangan infrastruktur.

Di sisi lain, beberapa daerah di Indonesia mulai menerapkan kemitraan antara BUMD dan sektor swasta untuk meningkatkan efisiensi dan layanan publik. Menurut Anda, apakah PDAM di Provinsi X sebaiknya tetap dikelola sepenuhnya oleh pemerintah daerah atau bekerja sama dengan pihak swasta? Jelaskan keuntungan dan risiko dari kedua opsi tersebut serta berikan solusi terbaik berdasarkan analisis Anda!

Pembahasan:

Dalam menganalisis masalah ini, kita perlu mempertimbangkan keunggulan dan kelemahan BUMD serta potensi kolaborasi dengan sektor swasta untuk meningkatkan efisiensi layanan publik. Jika PDAM tetap dikelola sepenuhnya oleh pemerintah daerah, maka pemerintah daerah tetap memiliki kendali penuh atas harga dan distribusi air bersih, sehingga tidak ada risiko eksploitasi harga atau monopoli oleh pihak swasta yang dapat merugikan konsumen.

Di sisi lain, keuntungan yang dihasilkan juga dapat sepenuhnya digunakan untuk pembangunan daerah tanpa perlu berbagi dengan pihak lain. Namun perlu menjadi perhatian, bahwa opsi ini tidak terlepas dari risiko-risiko, seperti rendahnya tingkat inovasi dan efisiensi, kesulitan dalam menarik investasi besar untuk perbaikan infrastruktur dan ekspansi layanan.

Adapun untuk opsi kedua, jika PDAM bekerja sama dengan sektor swasta, maka adanya investasi swasta dapat membantu dalam modernisasi infrastruktur dan peningkatan layanan pelanggan, efisiensi operasional dapat meningkat, serta pemerintah daerah tetap memiliki kontrol (meski tidak penuh), namun tidak perlu menanggung seluruh biaya operasional sendiri. Namun perlu diperhatikan juga, adanya potensi peningkatan tarif air karena pihak swasta akan berusaha mencari keuntungan.

Kesimpulannya, berdasarkan analisis di atas, opsi terbaik tergantung pada kondisi spesifik PDAM di Provinsi X. Jika pemerintah daerah memiliki sumber daya dan manajemen yang kuat, maka pengelolaan sendiri bisa menjadi pilihan terbaik. Namun, jika keterbatasan dana dan infrastruktur menjadi kendala utama, maka kemitraan dengan sektor swasta dapat dipertimbangkan dengan pengawasan ketat dan regulasi yang jelas agar tarif tetap terjangkau dan layanan tidak dikomersialisasi secara berlebihan.

Kegiatan Kelompok 2

Mengamati Informasi Seputar BUMN dan BUMD

Tujuan: Mengumpulkan informasi aktual tentang BUMN dan BUMD.

Langkah Kegiatan:

1. Bentuk kelompok 2-3 orang.
2. Temukan artikel atau berita terpercaya terkait BUMN dan BUMD.
3. Catat informasi penting dari artikel atau berita tersebut.
4. Presentasikan hasil temuan kalian di depan kelas.



3. Peran dan Karakteristik Badan Usaha Milik Swasta

Definisi Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)

Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) adalah badan usaha yang modal, kepemilikan, dan pengelolaannya sepenuhnya berada di tangan individu atau kelompok swasta tanpa campur tangan pemerintah. Berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara untuk kepentingan publik, BUMS berorientasi pada keuntungan dan dijalankan berdasarkan prinsip bisnis kompetitif. BUMS berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, serta memperkenalkan inovasi dalam berbagai sektor industri.

Kontribusi Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dalam Perekonomian

Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Sebagai entitas bisnis yang berorientasi pada keuntungan, BUMS berkontribusi dalam menciptakan nilai tambah melalui produksi barang dan jasa, meningkatkan daya saing industri, serta mendorong inovasi dan investasi.

Selain itu, BUMS juga membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan membuka lapangan kerja, meningkatkan kapasitas produksi nasional, serta menyumbang pendapatan bagi negara melalui pajak dan retribusi. Dengan fleksibilitas dan efisiensinya, BUMS mampu beradaptasi dengan perkembangan pasar, baik di tingkat domestik maupun global.

a. BUMS sebagai Mitra Strategis BUMN

BUMS sering kali menjadi mitra strategis bagi BUMN dalam berbagai proyek bisnis dan infrastruktur. Kerja sama ini memungkinkan pengembangan sektor industri yang lebih luas, mengingat BUMS dapat membawa keahlian, modal, dan inovasi yang tidak selalu dimiliki oleh BUMN. Misalnya, dalam sektor energi, PT Adaro Energy Tbk, yang merupakan perusahaan tambang batu bara swasta, berkolaborasi dengan PT PLN (Persero) untuk memasok bahan bakar pembangkit listrik di Indonesia.

b. Meningkatkan Kapasitas Produksi Nasional

BUMS memainkan peran penting dalam meningkatkan produksi nasional dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Melalui investasi dalam industri manufaktur, pertanian, dan teknologi, BUMS berkontribusi terhadap peningkatan jumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar. Dengan meningkatnya kapasitas produksi, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global.

c. Pencipta Lapangan Kerja bagi Masyarakat

Sebagai sektor bisnis yang terus berkembang, BUMS menjadi salah satu penyedia lapangan kerja terbesar di Indonesia. Dari industri kecil hingga perusahaan besar, BUMS menyerap jutaan tenaga kerja di berbagai bidang, mulai dari perbankan, ritel, manufaktur, hingga teknologi digital. Contohnya, PT Astra International Tbk, sebagai salah satu perusahaan swasta terbesar di Indonesia, telah mempekerjakan lebih dari 200.000 karyawan di berbagai lini bisnisnya.

Dengan semakin banyaknya perusahaan swasta yang berkembang, kesempatan kerja bagi masyarakat pun meningkat, yang pada akhirnya membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

d. Kontributor Pajak dan Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

BUMS juga berperan dalam menambah pendapatan negara melalui pembayaran pajak dan retribusi. Setiap transaksi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan swasta menghasilkan pajak yang masuk ke kas negara, baik dalam bentuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maupun bea ekspor-impor.

Selain itu, BUMS juga membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dengan meningkatkan daya beli masyarakat, menarik investasi asing, serta memperluas pasar ekspor produk-produk lokal ke luar negeri.

Struktur dan Ragam Kegiatan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)

a. Usaha Perseorangan

Usaha perseorangan adalah bentuk badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh satu individu tanpa pemisahan antara aset pribadi dan aset bisnisnya. Bentuk usaha ini memiliki keunggulan dalam hal kemudahan perizinan, fleksibilitas dalam pengambilan keputusan, serta biaya operasional yang relatif rendah.

Namun, karena segala tanggung jawab usaha ditanggung sepenuhnya oleh pemilik, risiko finansial yang dihadapi juga lebih besar. Warung makan, toko kelontong, dan usaha jasa kecil seperti bengkel atau salon kecantikan merupakan contoh dari sekian banyak usaha perseorangan. Meski cenderung berskala kecil, usaha perseorangan memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian lokal dan menciptakan lapangan kerja di masyarakat.



Layanan jasa potong rambut (barbershop) termasuk usaha perseorangan - freepik.com.

b. Badan Usaha Persekutuan (Partnership)

Badan usaha persekutuan adalah bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk menjalankan bisnis bersama dengan berbagi modal, tanggung jawab, dan keuntungan. Persekutuan ini dapat berbentuk firma, persekutuan komanditer (CV), atau perseroan terbatas (PT), yang masing-masing memiliki karakteristik serta tingkat tanggung jawab yang berbeda bagi para pemiliknya.

▷ **Firma**

Firma adalah badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan satu nama bersama, di mana setiap anggota memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sama dalam menjalankan bisnis. Firma sering digunakan dalam usaha di bidang jasa profesional seperti kantor hukum dan akuntansi, misalnya Kantor Hukum Lubis, Santosa, & Maramis (LSM) atau firma konsultasi keuangan.

▷ **Persekutuan Komanditer (CV)**

CV atau *Commanditaire Vennootschap* adalah badan usaha yang terdiri dari dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif bertanggung jawab penuh dalam mengelola usaha dan menanggung seluruh kewajiban perusahaan, sedangkan sekutu pasif hanya berperan sebagai investor yang menyuntikkan modal tanpa ikut serta dalam pengelolaan bisnis. CV sering menjadi pilihan saat modal yang dimiliki terbatas.

▷ **Perseroan Terbatas (PT)**

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan usaha berbadan hukum yang modalnya terbagi dalam saham, di mana tanggung jawab pemilik hanya sebatas modal yang disetorkan. PT memiliki struktur organisasi yang kompleks dengan adanya direksi, komisaris, dan pemegang saham. PT

lebih mudah menarik investasi dari pihak eksternal dan memiliki keberlanjutan usaha yang lebih baik karena kepemilikan saham dapat dialihkan kepada pihak lain.

Dalam CV, pembagian keuntungan biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan awal. Sekutu aktif mendapatkan bagian lebih besar karena mereka menjalankan bisnis secara langsung, sementara sekutu pasif memperoleh bagian keuntungan berdasarkan proporsi modal yang mereka miliki. Berbeda dengan CV, dalam PT, pembagian keuntungan dilakukan dalam bentuk dividen yang diberikan kepada pemegang saham sesuai jumlah saham yang dimiliki. Dengan sistem ini, keuntungan yang diperoleh lebih merata dan tidak hanya terpusat pada manajemen perusahaan.

Salah satu keunggulan utama PT dibandingkan CV adalah kemampuannya dalam menggalang dana melalui penerbitan saham. PT dapat memperoleh modal tambahan dengan menjual saham kepada investor atau mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) agar dapat menarik lebih banyak pemodal. Hal ini membuat PT memiliki kapasitas yang lebih besar untuk berekspansi dan bertahan dalam persaingan bisnis jangka panjang. Dengan adanya pemisahan antara pemilik dan pengelola bisnis, PT juga memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pemegang saham dibandingkan dengan CV.

Kelebihan dan Kekurangan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)

a. Kelebihan Badan Usaha Milik Swasta

BUMS memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya menjadi salah satu motor utama dalam perekonomian nasional. Berikut adalah beberapa keunggulan utama dari badan usaha ini:

- ▷ **Fleksibilitas dalam Pengambilan Keputusan.** BUMS dapat dengan cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan pasar tanpa terhambat oleh birokrasi yang kompleks, seperti yang sering terjadi pada BUMN.
- ▷ **Mendorong Inovasi dan Efisiensi.** Karena berorientasi pada keuntungan, BUMS selalu mencari cara baru untuk meningkatkan efisiensi, baik dalam hal produksi, pemasaran, maupun distribusi.
- ▷ **Mampu Menarik Investasi Lebih Besar.** BUMS, terutama dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), memiliki kemudahan dalam mendapatkan pendanaan dari investor melalui pasar modal.
- ▷ **Menyediakan Lapangan Kerja yang Luas.** Dengan berkembangnya sektor swasta, banyak tenaga kerja terserap dalam berbagai bidang, dari manufaktur hingga industri jasa.
- ▷ **Meningkatkan Daya Saing Nasional.** Persaingan antar perusahaan swasta mendorong peningkatan kualitas produk dan layanan, yang pada akhirnya membuat produk dalam negeri lebih kompetitif di pasar global.
- ▷ **Menyumbang Pendapatan Negara melalui Pajak.** BUMS memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara dalam bentuk pajak penghasilan, pajak perusahaan, serta pajak lainnya yang mendukung pembangunan nasional.

Fakta Unik Seputar Ekonomi

GESITS Si Paling Gesit

Di tengah dominasi perusahaan kendaraan listrik global seperti Tesla, Indonesia memiliki perusahaan swasta yang siap bersaing dalam industri ini, yaitu **PT GESITS Technologies Indo**. Perusahaan ini mengembangkan sepeda motor listrik GESITS, yang merupakan produk asli Indonesia dengan komponen lokal lebih dari 85%. GESITS menunjukkan bahwa BUMS Indonesia memiliki potensi untuk bersaing di industri teknologi tinggi dan ramah lingkungan.



gesitsmotors.com

b. Kelemahan Badan Usaha Milik Swasta

Meskipun memiliki banyak keunggulan, BUMS juga menghadapi berbagai tantangan dan risiko dalam operasionalnya. Berikut beberapa kelemahan yang sering ditemui dalam badan usaha ini:

- ▷ **Ketidakstabilan Finansial.** Tidak seperti BUMN yang mendapatkan dukungan pemerintah, BUMS harus sepenuhnya mengandalkan pemasukan dari operasional bisnisnya. Jika terjadi krisis ekonomi atau kesalahan strategi, perusahaan swasta berisiko mengalami kebangkrutan.
- ▷ **Kesenjangan Sosial dan Monopoli.** Beberapa BUMS yang sangat dominan di pasar dapat menciptakan monopoli atau oligopoli, yang bisa menyebabkan ketimpangan ekonomi dan eksploitasi tenaga kerja jika tidak diatur dengan baik.
- ▷ **Rentan terhadap Fluktuasi Pasar Global.** BUMS yang beroperasi di sektor ekspor-impor atau komoditas sering kali mengalami ketidakpastian akibat perubahan harga di pasar internasional, perubahan kebijakan perdagangan, atau gejolak ekonomi dunia.

Contoh Soal

Di sebuah negara berkembang seperti Indonesia, Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) memiliki peran yang besar dalam pertumbuhan ekonomi, namun juga menghadapi berbagai tantangan dalam operasionalnya. Di satu sisi, BUMS mampu menciptakan inovasi, meningkatkan daya saing industri, serta membuka lapangan kerja yang luas. Namun, di sisi lain, BUMS juga rentan terhadap krisis keuangan, potensi monopoli pasar, serta fluktuasi ekonomi global.

Pertanyaan:

Jika Anda adalah seorang pengambil kebijakan di pemerintah, langkah apa yang akan Anda terapkan untuk memaksimalkan keunggulan BUMS dalam perekonomian, sekaligus meminimalisir kelemahannya?

Pembahasan:

Untuk mengoptimalkan peran BUMS dalam perekonomian serta mengurangi risiko yang dihadapi, pemerintah dapat menerapkan beberapa strategi berikut:

1. **Meningkatkan Akses Pendanaan bagi BUMS.** Pemerintah dapat mempermudah akses kredit usaha dengan bunga rendah. Selain itu, insentif pajak di sektor BUMS juga dapat diterapkan untuk mendorong pertumbuhan bisnis swasta.
2. **Regulasi untuk Mencegah Monopoli dan Eksplorasi Pasar.** Perusahaan besar berpotensi menciptakan monopoli atau oligopoli, yang dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengawasi persaingan usaha dengan ketat.
3. **Melindungi BUMS dari Dampak Fluktuasi Pasar Global.** Pemerintah dapat memberikan subsidi atau insentif bagi industri strategis, seperti insentif ekspor bagi produk lokal agar kompetitif di pasar global.
4. **Mendorong Riset dan Inovasi Teknologi dalam Sektor Swasta.** Agar BUMS tetap memiliki daya saing, pemerintah perlu mendukung riset dan pengembangan (R&D) dalam industri swasta.



4. Prinsip, Sejarah, dan Perkembangan Koperasi

Definisi dan Sejarah Perkembangan Koperasi

a. Definisi Koperasi

Istilah koperasi berasal dari bahasa Latin "co-" yang berarti bersama, dan "operari" yang berarti bekerja, sehingga koperasi dapat diartikan sebagai bentuk kerja sama dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan ekonomi bersama. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dalam operasionalnya, koperasi mengedepankan prinsip keanggotaan sukarela, pengelolaan demokratis, serta pembagian hasil usaha yang adil berdasarkan partisipasi anggota.

b. Perjalanan Koperasi di Dunia

Gagasan awal tentang koperasi pertama kali muncul pada awal abad ke-19 di Inggris melalui pemikiran seorang reformis sosial bernama Robert Owen (1771-1858). Owen percaya bahwa sistem ekonomi berbasis koperasi dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan cara berbagi keuntungan secara adil dan meningkatkan kesejahteraan komunitas. Pada tahun 1844, konsep ini diwujudkan oleh Rochdale Society of Equitable Pioneers, yang menjadi koperasi modern pertama di dunia dan dikenal dengan Prinsip Rochdale, yang masih digunakan sebagai pedoman koperasi hingga saat ini.

Seiring berkembangnya konsep koperasi, pada tahun 1895 dibentuk organisasi internasional yang menaungi gerakan koperasi global, yaitu *International Co-operative Alliance* (ICA). ICA bertujuan untuk menyebarluaskan nilai-nilai koperasi dan memperkuat jaringan kerja sama antar koperasi di berbagai negara. Hingga saat ini, ICA masih aktif dalam mempromosikan koperasi sebagai model bisnis yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial.

c. Sejarah Koperasi di Indonesia

Konsep koperasi pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja, seorang Patih di Purwokerto, yang pada tahun 1896 mendirikan lembaga keuangan berbasis koperasi untuk membantu pegawai negeri yang mengalami kesulitan ekonomi. Gagasan ini kemudian berkembang menjadi cikal bakal gerakan koperasi di Indonesia.



Bapak koperasi Indonesia: Drs. Muhammad Hatta -
wikimedia.com

Pada masa penjajahan Belanda, koperasi mengalami berbagai tantangan karena kebijakan kolonial yang lebih mengutamakan kepentingan ekonomi pemerintah Hindia Belanda. Namun, pada tahun 1908, organisasi pergerakan nasional Budi Utomo mulai memperkenalkan konsep koperasi sebagai bagian dari strategi ekonomi rakyat. Selanjutnya, pada tahun 1927, Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dipimpin oleh Soekarno juga mendukung koperasi sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi ketergantungan terhadap ekonomi kapitalis kolonial.

Setelah Indonesia merdeka, koperasi semakin mendapatkan tempat dalam kebijakan ekonomi nasional. Pada tahun 1947, diadakan Kongres Koperasi Pertama di Tasikmalaya, yang menghasilkan keputusan penting, salah satunya adalah penetapan 12 Juli sebagai Hari Koperasi Indonesia. Kongres ini juga menekankan pentingnya koperasi sebagai pilar perekonomian nasional.

Untuk memperkuat organisasi koperasi, pada tahun 1947 dibentuk Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) sebagai lembaga yang bertugas mengembangkan dan mengawasi koperasi di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, koperasi tetap menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi Indonesia, dengan berbagai bentuk koperasi yang berkembang, mulai dari koperasi simpan pinjam hingga koperasi produksi dan konsumsi.

Dasar Hukum, Prinsip, dan Tujuan Koperasi

a. Dasar Hukum Koperasi

Koperasi di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam konteks ini, koperasi menjadi bagian utama dari sistem ekonomi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi diakui sebagai badan usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggota serta masyarakat secara umum.

b. Asas Koperasi

Koperasi berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong, yang menekankan kerja sama antar anggota dalam mencapai kesejahteraan bersama. Dengan asas ini, koperasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata tetapi juga pada keseimbangan ekonomi dan sosial bagi seluruh anggotanya.

c. Tujuan Koperasi

Koperasi didirikan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan anggota serta berkontribusi dalam membangun perekonomian nasional. Selain itu, koperasi juga bertujuan untuk memperkuat daya saing ekonomi rakyat melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta memastikan distribusi ekonomi yang lebih merata.

d. Nilai-Nilai Koperasi

Sebagai badan usaha yang berbasis sosial-ekonomi, koperasi mengusung beberapa nilai utama, yaitu kemandirian, solidaritas, keadilan, demokrasi, dan tanggung jawab bersama. Nilai-nilai ini memastikan bahwa koperasi dapat berjalan sesuai dengan prinsip ekonomi yang adil serta memberikan manfaat bagi anggotanya secara berkelanjutan.

e. Prinsip-Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi adalah pedoman dasar dalam menjalankan aktivitas koperasi agar tetap berpegang pada nilai-nilai dan tujuannya. Berikut adalah tujuh prinsip utama koperasi:

- ▷ Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- ▷ Pengelolaan secara demokratis
- ▷ Partisipasi anggota dalam ekonomi koperasi
- ▷ Otonomi dan kemandirian
- ▷ Pendidikan, pelatihan, dan informasi bagi anggota
- ▷ Kerja sama antar koperasi untuk memperkuat sektor ekonomi rakyat
- ▷ Peduli terhadap komunitas dan pembangunan sosial

Bentuk dan Jenis Koperasi

a. Bentuk Koperasi

Berdasarkan tingkat keanggotaannya, koperasi dibagi menjadi koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang terdiri dari minimal 20 orang anggota perorangan yang memiliki kepentingan ekonomi yang sama. Sementara itu, koperasi sekunder merupakan koperasi yang

beranggotakan beberapa koperasi primer dan memiliki lingkup usaha yang lebih luas, sering kali bertujuan untuk memperkuat sektor koperasi secara kolektif.

b. Jenis-Jenis Koperasi

Koperasi dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis usaha yang dijalankannya. Berikut adalah beberapa jenis koperasi yang umum di Indonesia:

- ▷ **Koperasi Konsumsi** menyediakan kebutuhan barang konsumsi bagi anggotanya dengan harga lebih terjangkau.
- ▷ **Koperasi Simpan Pinjam** bergerak di bidang keuangan dengan memberikan pinjaman dan layanan simpanan bagi anggota.
- ▷ **Koperasi Produksi** berfokus pada pengelolaan produksi barang dan jasa, di mana anggota adalah produsen atau pengrajin.
- ▷ **Koperasi Jasa** memberikan layanan tertentu kepada anggota, seperti koperasi angkutan atau koperasi tenaga kerja.
- ▷ **Koperasi Serba Usaha (KSU)** menggabungkan beberapa jenis usaha dalam satu koperasi untuk memberikan layanan lebih luas kepada anggota.

Selain jenis koperasi di atas, terdapat dua model koperasi berdasarkan fokus usahanya:

- ▷ **Koperasi Single Purpose**, yaitu koperasi yang hanya memiliki satu jenis usaha utama, seperti koperasi simpan pinjam yang hanya bergerak di bidang keuangan.
- ▷ **Koperasi Multi Purpose**, yaitu koperasi yang menjalankan lebih dari satu bidang usaha.

Fakta Unik Seputar Ekonomi

Koperasi Terbesar di Dunia Berasal dari Prancis

Tahukah Anda bahwa koperasi terbesar di dunia adalah Groupe Crédit Agricole, yang berasal dari Prancis? Koperasi ini bergerak di sektor keuangan dan perbankan, dengan aset lebih dari USD 2,5 triliun. Koperasi ini memiliki jutaan anggota dan telah beroperasi selama lebih dari satu abad, menunjukkan bahwa koperasi bisa menjadi entitas bisnis yang sangat besar dan berdaya saing global.



Groupe Crédit Agricole -
shutterstock.com.2415307325

Struktur dan Organisasi Koperasi

Organisasi koperasi memiliki struktur internal yang terdiri dari beberapa perangkat utama, yaitu Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang memiliki wewenang untuk menentukan kebijakan utama. Pengurus koperasi bertugas mengelola operasional koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota, sementara Pengawas koperasi bertanggung jawab dalam mengawasi kinerja pengurus agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip koperasi.

Dalam pengorganisasianya, koperasi menerapkan sistem demokratis, di mana setiap anggota memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan. Proses pengelolaan koperasi harus mengedepankan transparansi, di mana laporan keuangan dan kebijakan operasional wajib dipertanggungjawabkan secara berkala kepada seluruh anggota. Selain itu, koperasi juga harus aktif dalam meningkatkan kompetensi anggotanya melalui pelatihan dan pendidikan koperasi.

Selain struktur utama, koperasi juga dapat memiliki unit-unit usaha yang dikelola secara profesional. Unit usaha ini memungkinkan koperasi untuk berkembang lebih luas, misalnya dengan membuka toko koperasi,

menyediakan layanan kredit, atau mengelola usaha berbasis komunitas. Dengan struktur yang jelas dan pengelolaan yang profesional, koperasi dapat lebih mudah berkembang dan memberikan manfaat maksimal bagi anggotanya.

Dalam lingkup yang lebih luas, koperasi dapat membentuk kerja sama dengan koperasi lain dalam skala yang lebih besar, baik dalam bentuk federasi maupun konfederasi. Penggabungan koperasi sejenis bertujuan untuk memperkuat daya saing di pasar serta meningkatkan efisiensi dalam penyediaan barang dan jasa bagi anggotanya. Di tingkat nasional, terdapat beberapa organisasi yang menaungi koperasi dalam skala lebih besar, yaitu:

- a. **Koperasi Induk**, yaitu koperasi yang menghimpun beberapa koperasi sekunder untuk memperkuat sektor usaha tertentu.
- b. **Gabungan Koperasi Produksi Nasional (GKPN)**, yaitu organisasi koperasi yang berfokus pada produksi barang dan jasa untuk meningkatkan daya saing industri berbasis koperasi.
- c. **Pusat Koperasi Produksi Nasional (PKPN)**, yaitu lembaga yang berperan dalam pengembangan koperasi produksi dengan memberikan pendampingan, pelatihan, dan akses pasar bagi koperasi yang bergerak di sektor industri.

Dengan adanya struktur eksternal ini, koperasi dapat lebih mudah berkembang, memperluas jaringan bisnis, serta meningkatkan daya saing dalam sistem ekonomi nasional.

Keanggotaan dalam Koperasi

Keanggotaan dalam koperasi didasarkan pada prinsip sukarela dan terbuka, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Artinya, setiap individu yang memenuhi syarat dapat bergabung tanpa adanya diskriminasi, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam koperasi. Keanggotaan ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi berbasis kebersamaan, di mana setiap anggota memiliki peran aktif dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan koperasi.

Dalam praktiknya, koperasi menerapkan sistem "satu anggota, satu suara", yang memastikan bahwa setiap anggota memiliki hak suara yang setara dalam keputusan penting koperasi. Selain itu, anggota koperasi juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung operasional koperasi melalui penyetoran simpanan wajib, partisipasi dalam usaha koperasi, serta kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan bersama.

a. Kewajiban Anggota Koperasi

- ▷ Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
- ▷ Mematuhi ketentuan dan keputusan koperasi, termasuk hasil keputusan rapat anggota.
- ▷ Berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam pemanfaatan layanan koperasi.

b. Hak Anggota Koperasi

- ▷ Menghadiri dan memberikan suara dalam rapat anggota, yang merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi koperasi.
- ▷ Memilih dan dipilih sebagai pengurus atau pengawas koperasi.
- ▷ Mendapatkan pembagian sisa hasil usaha (SHU) berdasarkan tingkat partisipasi dalam koperasi.
- ▷ Mendapatkan pelayanan dan manfaat dari koperasi, baik dalam bentuk pinjaman, penyediaan barang, atau jasa lainnya.
- ▷ Mengajukan usulan, saran, dan kritik terhadap pengelolaan koperasi.
- ▷ Memperoleh informasi terkait laporan keuangan dan perkembangan koperasi.

Sistem Pengelolaan Koperasi

Koperasi dikelola berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, di mana seluruh kebijakan dan operasionalnya ditentukan melalui mekanisme musyawarah dalam rapat anggota. Pengelolaan koperasi melibatkan tiga elemen utama, yaitu rapat anggota, pengurus, dan pengawas, yang masing-masing memiliki fungsi dan kewenangan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1992. Keberhasilan koperasi sangat bergantung pada efektivitas pengelolaannya, termasuk transparansi keuangan, keterlibatan aktif anggota, serta pengawasan yang ketat terhadap jalannya usaha koperasi.

a. Rapat Anggota Koperasi

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, di mana seluruh keputusan strategis dan kebijakan utama ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota. Melalui forum ini, anggota koperasi memiliki hak untuk menentukan arah kebijakan koperasi, mengevaluasi kinerja pengurus, serta memastikan koperasi dikelola secara demokratis dan bertanggung jawab.

▷ **Wewenang Rapat Anggota**

Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1992, rapat anggota memiliki beberapa wewenang utama, di antaranya:

- Menetapkan anggaran dasar koperasi serta perubahan-perubahannya.
- Memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengurus serta pengawas koperasi.
- Menetapkan kebijakan umum koperasi dalam bidang organisasi, keuangan, dan usaha.
- Mengevaluasi dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas.
- Menetapkan pembagian sisa hasil usaha (SHU) untuk anggota.
- Menentukan penggabungan, peleburan, atau pembubaran koperasi jika diperlukan.
- Menetapkan kebijakan kerja sama dengan badan usaha lain atau pihak eksternal.

▷ **Tata Cara Pengambilan Keputusan dalam Rapat Anggota**

Keputusan dalam rapat anggota umumnya diambil melalui mekanisme berikut:

- Musyawarah untuk mencapai mufakat.
- Jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan, dilakukan pemungutan suara (voting).
- Setiap anggota memiliki hak suara yang sama tanpa melihat besar kecilnya simpanan.
- Hasil keputusan rapat anggota bersifat mengikat.

Sebagai forum tertinggi dalam koperasi, rapat anggota juga berfungsi sebagai wadah pertanggungjawaban pengurus terhadap seluruh aktivitas koperasi. Dalam rapat tahunan, pengurus wajib menyampaikan laporan mengenai kondisi keuangan koperasi, perkembangan usaha, serta rencana strategis ke depan. Laporan ini bertujuan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, sehingga seluruh anggota mengetahui kondisi koperasi yang mereka ikuti.

Selain itu, rapat anggota juga menjadi momen evaluasi kinerja pengurus, di mana anggota dapat mengajukan pertanyaan, memberikan kritik, serta mengusulkan perbaikan dalam tata kelola koperasi. Dengan sistem ini, koperasi dapat memastikan bahwa seluruh kebijakan tetap selaras dengan prinsip demokrasi ekonomi dan kepentingan anggota.

b. Pengurus Koperasi

Pengurus koperasi adalah pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan operasional koperasi sehari-hari. Mereka dipilih melalui rapat anggota untuk mengelola koperasi secara profesional dan memastikan tujuan koperasi dapat tercapai. Masa jabatan pengurus biasanya ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi.

Dalam menjalankan tugasnya, pengurus harus bertindak secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip koperasi. Pengelolaan koperasi yang baik mencakup pengaturan keuangan yang sehat, pengembangan usaha yang berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan anggota melalui berbagai program dan layanan koperasi.

▷ Tugas Pengurus Koperasi

Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1992, pengurus memiliki beberapa tugas utama, antara lain:

- Mengelola operasional koperasi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.
- Mewakili koperasi dalam urusan hukum dan perjanjian bisnis.
- Menjaga aset dan keuangan koperasi agar dikelola secara efisien dan transparan.
- Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada rapat anggota.
- Mengembangkan usaha koperasi agar lebih kompetitif dan menguntungkan anggota.
- Melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan dalam rapat anggota.

▷ Wewenang Pengurus

Selain tugasnya, pengurus juga memiliki beberapa kewenangan dalam menjalankan koperasi, antara lain:

- Mengambil keputusan strategis dalam menjalankan koperasi sehari-hari.
- Menandatangani perjanjian bisnis dan kerja sama dengan pihak lain.
- Menunjuk dan mengawasi karyawan koperasi yang membantu operasional koperasi.

c. Pengawas Koperasi

Pengawas koperasi adalah perangkat organisasi yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan koperasi serta memastikan kinerja pengurus sesuai dengan peraturan dan tujuan koperasi. Pengawas dipilih oleh rapat anggota dan memiliki hak untuk melakukan audit serta memberikan rekomendasi kepada pengurus dalam mengelola koperasi.

Pengawas koperasi bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan audit terhadap laporan keuangan koperasi, mengawasi pelaksanaan kebijakan koperasi agar sesuai dengan keputusan rapat anggota, serta memberikan saran dan rekomendasi kepada pengurus untuk perbaikan manajemen koperasi.



Audit terhadap laporan keuangan adalah salah satu unsur pengawasan terhadap kinerja keuangan koperasi -
shutterstock.com.2389358201

Sumber Pendanaan dalam Koperasi

Keberlanjutan operasional koperasi sangat bergantung pada sumber permodalan yang dimilikinya. Modal yang dikelola koperasi digunakan untuk menjalankan usaha, memberikan layanan kepada anggota, serta memastikan koperasi dapat berkembang secara berkelanjutan. Secara umum, sumber modal koperasi terbagi menjadi modal sendiri dan modal pinjaman, di mana masing-masing memiliki karakteristik dan mekanisme penggunaan yang berbeda.

a. Modal Internal Koperasi (Modal Sendiri)

Modal sendiri adalah sumber dana yang berasal dari anggota koperasi atau keuntungan yang ditahan untuk kepentingan koperasi. Modal ini menjadi dasar kekuatan keuangan koperasi dan mencerminkan tingkat partisipasi anggota dalam mendukung kegiatan usaha koperasi.

- ▷ **Simpanan Pokok** adalah dana yang wajib dibayarkan oleh setiap anggota koperasi saat pertama kali bergabung. Besarnya simpanan pokok ditentukan dalam anggaran dasar koperasi dan tidak dapat diambil kembali selama anggota masih terdaftar sebagai bagian dari koperasi. Simpanan ini berfungsi sebagai modal dasar dalam menjalankan usaha koperasi.
- ▷ **Simpanan Wajib** adalah kontribusi berkala yang harus dibayarkan oleh anggota selama masih tergabung dalam koperasi. Besarnya simpanan wajib dapat berbeda-beda tergantung dari kebijakan koperasi, dan dana ini digunakan untuk mengembangkan kegiatan koperasi, seperti menambah inventaris, memperluas usaha, atau meningkatkan layanan kepada anggota.
- ▷ **Dana Cadangan** merupakan bagian dari keuntungan koperasi (Sisa Hasil Usaha/SHU) yang tidak langsung dibagikan kepada anggota, tetapi disimpan untuk keperluan darurat atau pengembangan usaha. Dana ini berfungsi sebagai bentuk proteksi keuangan koperasi agar tetap stabil dalam menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu.
- ▷ **Hibah** adalah dana yang diperoleh koperasi dari pihak eksternal, baik individu, lembaga, maupun pemerintah, tanpa kewajiban pengembalian. Hibah sering kali digunakan untuk program pengembangan koperasi, pelatihan anggota, atau investasi dalam sektor usaha baru yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi koperasi.

b. Modal dari Sumber Eksternal (Modal Pinjaman)

Selain mengandalkan modal internal, koperasi juga dapat memperoleh modal dari sumber eksternal dalam bentuk pinjaman. Modal pinjaman digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha koperasi dan memungkinkan koperasi untuk melakukan ekspansi usaha atau menutupi kebutuhan dana dalam jangka pendek. Sumber utama modal pinjaman koperasi meliputi:

- ▷ **Pinjaman dari anggota.** Anggota koperasi dapat memberikan pinjaman kepada koperasi dengan skema yang disepakati bersama.
- ▷ **Pinjaman dari koperasi lain.** Koperasi dapat bekerja sama dengan koperasi lain dalam bentuk pinjaman atau investasi bersama.
- ▷ **Pinjaman dari lembaga perbankan.** Koperasi dapat mengakses fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan lainnya untuk membiayai operasionalnya.
- ▷ **Pinjaman dari pemerintah.** Beberapa koperasi mendapatkan akses pendanaan dari program pemerintah dalam bentuk dana bergulir atau subsidi modal usaha.
- ▷ **Pinjaman dari investor atau mitra bisnis.** Dalam beberapa kasus, koperasi dapat bekerja sama dengan investor swasta yang bersedia memberikan pendanaan dengan sistem bagi hasil.

Modal pinjaman menjadi solusi bagi koperasi yang ingin berkembang lebih cepat, tetapi perlu pengelolaan keuangan yang bijak agar tidak menimbulkan beban hutang yang berlebihan.

Penggunaan modal pinjaman harus didasarkan pada analisis kebutuhan modal dan kemampuan pengembalian, sehingga koperasi tetap dapat menjalankan usahanya tanpa mengalami kendala keuangan di masa mendatang.

Selain itu, koperasi perlu mempertimbangkan risiko dan manfaat dari setiap sumber pinjaman. Misalnya, pinjaman dari anggota dapat lebih fleksibel dan memiliki suku bunga yang lebih ringan dibandingkan pinjaman dari bank. Namun, untuk ekspansi besar, pinjaman dari lembaga perbankan dapat menjadi pilihan karena menawarkan jumlah dana yang lebih besar meskipun dengan kewajiban pembayaran bunga. Oleh karena itu, koperasi harus memiliki strategi keuangan yang matang agar setiap sumber permodalan dapat dikelola dengan efektif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh anggota koperasi.

Perhitungan dan Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam Koperasi

a. Definisi Sisa Hasil Usaha (SHU)



Momen pembagian SHU (sisa hasil usaha) adalah 'cuan'nya para anggota koperasi - shutterstock.com.2148359855

Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah keuntungan bersih yang diperoleh koperasi dalam satu periode usaha setelah dikurangi dengan biaya operasional, pajak, serta cadangan dana koperasi. Berbeda dengan laba dalam perusahaan komersial yang sepenuhnya menjadi hak pemegang saham, SHU dalam koperasi dibagikan kepada anggota berdasarkan asas keadilan dan partisipasi. SHU tidak hanya dibagikan sebagai keuntungan tetapi juga digunakan untuk kepentingan pengembangan koperasi dan kesejahteraan anggotanya.

Penggunaan SHU dalam koperasi mencakup beberapa aspek utama, antara lain:

- ▷ **Cadangan koperasi.** Sebagian SHU disisihkan untuk dana cadangan yang digunakan dalam pengembangan koperasi dan antisipasi risiko keuangan di masa depan.
- ▷ **Pembagian kepada anggota.** SHU dibagikan kepada anggota berdasarkan kontribusi mereka dalam koperasi, seperti besarnya simpanan dan transaksi yang dilakukan.
- ▷ **Dana sosial.** Sejumlah SHU dialokasikan untuk kegiatan sosial dan kesejahteraan anggota, seperti program bantuan pendidikan atau kesehatan.
- ▷ **Dana pengembangan koperasi.** SHU juga digunakan untuk memperluas usaha koperasi, meningkatkan fasilitas, serta mengembangkan produk atau layanan baru.

Jika dalam suatu periode usaha koperasi mengalami stagnasi atau penurunan pendapatan, dana cadangan koperasi memainkan peran penting sebagai penyangga keuangan. Dana ini digunakan untuk menjaga stabilitas operasional koperasi serta memastikan bahwa koperasi tetap dapat memberikan manfaat bagi anggotanya, meskipun tidak ada keuntungan yang besar di tahun tersebut.

b. Komponen Dasar dalam Perhitungan Pembagian SHU

Dalam melakukan pembagian SHU, beberapa informasi utama diperlukan agar perhitungannya adil dan sesuai dengan kontribusi setiap anggota. Informasi dasar yang digunakan dalam perhitungan SHU meliputi:

- ▷ **Total sisa hasil usaha** koperasi dalam satu periode setelah dikurangi pajak dan biaya operasional.
- ▷ **Persentase SHU yang dialokasikan untuk anggota**, sesuai dengan ketetapan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) koperasi.
- ▷ **Total simpanan seluruh anggota**, yang digunakan sebagai dasar perhitungan pembagian SHU berbasis modal.
- ▷ **Total transaksi yang berasal dari anggota**, yang mencerminkan partisipasi ekonomi anggota dalam koperasi.
- ▷ **Jumlah simpanan per anggota**, yang menentukan hak masing-masing anggota terhadap bagian SHU berbasis modal.
- ▷ **Total nilai transaksi pembelian anggota dari koperasi**, yang menjadi dasar perhitungan SHU berbasis usaha.
- ▷ **Persentase bagi hasil atas pembelian anggota**, yang mengatur proporsi SHU yang diberikan berdasarkan transaksi anggota dalam koperasi.

c. Rumus Pembagian SHU dan Penetapan Besaran SHU untuk Anggota

Pembagian SHU dalam koperasi ditetapkan berdasarkan aturan dalam AD/ART koperasi, yang mencerminkan prinsip keadilan dalam distribusi keuntungan. SHU biasanya dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu SHU jasa modal (berdasarkan simpanan anggota) dan SHU jasa usaha (berdasarkan transaksi anggota dengan koperasi).

▷ SHU atau Jasa Modal

SHU jasa modal adalah bagian keuntungan yang diberikan kepada anggota berdasarkan jumlah simpanan mereka di koperasi. Berikut ini adalah rumus persentase jasa modal serta jasa modal per anggota:

$$\text{Persentase jasa modal} = \frac{\text{Totak SHU untuk jasa modal}}{\text{Total simpanan seluruh anggota}} \times 100\%$$

$$\text{Jasa modal per anggota} = \text{Persentase jasa modal} \times \text{Simpanan per anggota}$$

▷ SHU atau Jasa Usaha Anggota

SHU jasa usaha adalah bagian keuntungan yang dibagikan berdasarkan transaksi atau kontribusi anggota dalam kegiatan usaha koperasi. Berikut ini adalah rumus perhitungan SHU jasa usaha:

$$\text{Persentase jasa anggota} = \frac{\text{Totak SHU untuk jasa usaha}}{\text{Total transaksi anggota dengan koperasi}} \times 100\%$$

$$\text{Jasa usaha per anggota} = \text{Persentase jasa anggota} \times \text{Transaksi per anggota}$$

▷ **Contoh Ilustrasi Pembagian SHU**

Diilustrasikan kondisi Koperasi XYZ diinformasikan bahwa total SHU tahun ini sejumlah Rp 100.000.000, ditentukan bahwa persentase pembagian SHU adalah 40% untuk jasa modal dan 60% untuk jasa usaha. Diketahui juga total simpanan anggota berjumlah Rp 500.000.000, dan total transaksi anggota dengan koperasi adalah Rp 800.000.000.

Berikut ini ilustrasi perhitungan SHU jasa modal:

$$\text{SHU untuk jasa modal: } 40\% \times 100.000.000 = 40.000.000$$

$$\text{Persentase jasa modal: } \frac{40.000.000}{500.000.000} \times 100\% = 8\%$$

Jika seorang anggota memiliki simpanan Rp10.000.000, maka SHU yang diperoleh:
$$8\% \times 10.000.000 = 800.000$$

Selanjutnya, dideskripsikan perhitungan SHU jasa usaha:

$$\text{SHU untuk jasa usaha: } 60\% \times 100.000.000 = 60.000.000$$

$$\text{Persentase jasa usaha: } \frac{60.000.000}{800.000.000} \times 100\% = 7,5\%$$

Jika seorang anggota memiliki simpanan Rp20.000.000, maka SHU yang diperoleh:
$$7,5\% \times 20.000.000 = 1.500.000$$

d. Prinsip-Prinsip dalam Pembagian SHU

Dalam pembagian SHU, koperasi harus mengacu pada prinsip keadilan dan transparansi, sesuai dengan nilai-nilai koperasi. Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam pembagian SHU:

- ▷ **Berbasis kontribusi anggota.** SHU dibagikan berdasarkan partisipasi anggota dalam koperasi, baik dari sisi simpanan maupun transaksi.
- ▷ **Mengutamakan keadilan, bukan kesetaraan absolut.** Pembagian dilakukan secara proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing anggota.
- ▷ **Sebagian dialokasikan untuk cadangan dan pengembangan koperasi.** Tidak seluruh SHU dibagikan kepada anggota, melainkan sebagian dialokasikan untuk dana cadangan dan pengembangan koperasi.
- ▷ **Dilakukan secara transparan dan terbuka.** Perhitungan SHU harus dapat diakses dan dipahami oleh seluruh anggota agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan dalam pengelolaan koperasi.

Contoh Soal

Koperasi "Sejahtera Bersama" telah menetapkan sistem pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang mengutamakan prinsip keadilan berdasarkan kontribusi anggota dalam bentuk simpanan dan transaksi usaha dengan koperasi. Namun, beberapa anggota koperasi mengajukan keberatan karena merasa bahwa pembagian SHU tidak dilakukan secara merata untuk semua anggota.

Pertanyaan:

Bagaimana pembagian SHU yang adil dapat mendorong partisipasi aktif anggota dalam koperasi?

Pembahasan:

Sistem pembagian SHU yang proporsional mendorong anggota untuk lebih aktif dalam koperasi karena mereka tahu bahwa semakin besar kontribusinya, semakin besar pula bagian SHU yang akan diterima. Hal ini menciptakan insentif ekonomi bagi anggota untuk menambah jumlah simpanannya dalam koperasi, lebih sering bertransaksi dengan koperasi dibandingkan dengan pihak lain, serta mengajak anggota lain untuk lebih aktif dalam kegiatan koperasi. Dengan adanya hubungan langsung antara kontribusi dan keuntungan, koperasi akan berkembang lebih cepat karena anggotanya lebih terlibat secara aktif.



5. Pengelolaan dalam Badan Usaha

Definisi Manajemen

Manajemen adalah konsep fundamental dalam dunia bisnis dan organisasi yang mencakup berbagai aspek perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien dan efektif. Berbagai pakar telah memberikan definisi tentang manajemen berdasarkan sudut pandang masing-masing.

Menurut Henry Fayol (1916), seorang tokoh yang dikenal sebagai bapak teori manajemen modern, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan pengendalian dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fayol menekankan bahwa manajemen bukan hanya tentang kepemimpinan, tetapi juga mencakup pembagian kerja yang sistematis serta fungsi administratif yang jelas.

Sementara itu, Peter Drucker (1954), seorang pakar manajemen asal Austria, mendefinisikan manajemen sebagai seni dalam mencapai tujuan melalui orang lain. Drucker menyoroti bahwa keberhasilan manajemen bergantung pada efektivitas dalam mengarahkan sumber daya manusia, mengembangkan strategi bisnis, serta membangun organisasi yang inovatif dan responsif terhadap perubahan.

Dari perspektif yang lebih kontemporer, Stephen P. Robbins dan Mary Coulter (2016) menyatakan bahwa manajemen adalah proses koordinasi dan pengintegrasian aktivitas kerja agar dapat diselesaikan secara efisien dan efektif melalui orang lain. Definisi ini lebih menekankan pada aspek koordinasi kerja dan pengelolaan sumber daya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan optimal.

Dari sudut pandang keislaman, Al-Mawardi (975-1058 M), seorang pemikir muslim di era Abbasiyah, mengartikan manajemen sebagai seni kepemimpinan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui sistem yang terorganisir, keadilan dalam kepemimpinan, serta pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Konsep ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mengutamakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan umum.

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah proses sistematis yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk mencapai hasil yang optimal melalui pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif. Konsep ini berlaku di berbagai bidang, termasuk bisnis, pemerintahan, pendidikan, serta sektor sosial lainnya.



Manajemen ialah satuan sistem yang terorganisir untuk mencapai kesejahteraan - shutterstock.com.1302112870

Peran Manajemen dalam Pengelolaan Badan Usaha

Manajemen memiliki fungsi utama dalam mengarahkan dan mengelola sumber daya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Dalam dunia bisnis, manajemen bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis, pengorganisasian sumber daya, serta pengendalian kinerja agar perusahaan dapat berjalan sesuai dengan visi dan misinya. Fungsi manajemen tidak hanya berorientasi pada pencapaian target jangka pendek tetapi juga bertujuan untuk memastikan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

Berbagai pakar manajemen telah menguraikan fungsi-fungsi utama manajemen dalam perspektif yang berbeda. George R. Terry menekankan bahwa fungsi manajemen terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Sementara itu, Henry Fayol menyebutkan bahwa fungsi utama manajemen meliputi merancang, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan. Ernest Dale menambahkan bahwa fungsi pengawasan dan koordinasi menjadi bagian penting dalam memastikan efektivitas organisasi. Sedangkan menurut Sondang Siagian, manajemen tidak hanya mencakup aspek teknis tetapi juga membutuhkan kepemimpinan untuk mengarahkan individu dalam organisasi menuju tujuan bersama.

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan langkah awal dalam proses manajemen yang bertujuan untuk menentukan arah dan strategi organisasi. Melalui perencanaan yang matang, perusahaan dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi dan menyesuaikan langkah-langkah yang harus diambil agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.



'Planning questions' -
Shutterstock.com.3708139155

▷ Pertanyaan Dasar dalam Perencanaan

Dalam menyusun rencana yang efektif, beberapa pertanyaan mendasar harus dijawab, yaitu: **What**: Apa yang ingin dicapai? **Why**: Mengapa hal ini penting dilakukan? **Where**: Di mana rencana ini akan diterapkan? **When**: Kapan waktu pelaksanaannya? **Who**: Siapa yang bertanggung jawab atas rencana ini? **How**: Bagaimana langkah-langkah untuk mencapai tujuan?

▷ Jenjang Perencanaan dalam Organisasi

Setidaknya terbagi menjadi tiga jenjang, yakni perencanaan tingkat atas (*top-level planning*), level dimana ditentukan visi, misi, dan strategi jangka panjang perusahaan. Lalu, perencanaan tingkat menengah (*middle-level planning*), level disusunnya kebijakan operasional berdasarkan strategi yang ditetapkan manajemen puncak, dan perencanaan tingkat bawah (*low-level planning*), level dimana perencanaan berfokus pada implementasi teknis dan pelaksanaan tugas harian di tingkat operasional.

▷ Syarat-Syarat Perencanaan yang Baik

- **Realistik**: rencana harus sesuai dengan kondisi yang ada.
- **Fleksibel**: harus dapat menyesuaikan dengan perubahan lingkungan.
- **Terukur**: keberhasilan rencana dapat diukur dengan indikator yang jelas.
- **Spesifik**: memiliki tujuan yang jelas dan tidak ambigu.
- **Berorientasi pada hasil**: harus mengarah pada pencapaian tujuan organisasi.
- **Dapat diterapkan**: rencana harus dapat diimplementasikan dengan sumber daya yang ada.

▷ **Manfaat Perencanaan dalam Manajemen**

Perencanaan yang baik akan memberikan arah yang jelas dalam pengelolaan organisasi, membantu mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi di masa depan, dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis. Selain itu, dengan perencanaan yang baik, sumber daya yang digunakan akan lebih efektif dan efisien.

b. Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian adalah proses menyusun dan mengatur sumber daya organisasi agar dapat bekerja secara sistematis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam tahap ini, manajemen mengalokasikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada individu atau unit kerja yang tepat.

▷ **Unsur-Unsur Organisasi**

Setidaknya, organisasi memiliki tiga unsur utama, yakni sumber daya manusia (karyawan dan tim kerja yang menjalankan organisasi), struktur organisasi (hierarki dan hubungan antar bagian dalam organisasi), serta proses kerja (alur kerja dan sistem yang mengatur pelaksanaan tugas).

▷ **Manfaat Pengorganisasian**

- Memastikan tugas dan tanggung jawab terdistribusi dengan baik.
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja.
- Memudahkan koordinasi dan komunikasi antar bagian.

▷ **Fungsi Pengorganisasian**

Manajemen dalam organisasi memiliki beberapa fungsi utama, diantaranya berfungsi untuk membantu pembagian kerja yang adil dan efektif, meningkatkan kolaborasi dan sinergi antar individu dalam organisasi, dan berfungsi dalam memfasilitasi pengawasan terhadap jalannya operasional organisasi.

▷ **Struktur Organisasi dalam Perusahaan**

Dalam dunia bisnis, perusahaan menerapkan berbagai bentuk organisasi yang disesuaikan dengan skala usaha, jumlah karyawan, serta kompleksitas operasionalnya. Struktur organisasi yang diterapkan pada usaha kecil, menengah, hingga konglomerasi memiliki perbedaan dalam sistem kerja, alur komunikasi, serta mekanisme pengambilan keputusan. Beberapa bentuk organisasi yang lazim digunakan dalam dunia usaha antara lain organisasi garis, organisasi fungsional, dan organisasi garis dan staf.

● **Organisasi Garis (Line Organization)**

Organisasi garis adalah bentuk struktur organisasi yang paling sederhana dan umum digunakan dalam usaha kecil dan menengah. Dalam sistem ini, alur komando berjalan secara vertikal, dari pimpinan tertinggi hingga ke level bawah, tanpa ada unit kerja khusus yang berfungsi sebagai staf pendukung atau konsultan.

Kelebihan dari organisasi garis adalah kejelasan dalam wewenang dan tanggung jawab, karena setiap anggota organisasi memiliki jalur komunikasi yang langsung dengan atasan atau bawahannya. Namun, kelemahan dari sistem ini adalah beban kerja yang besar bagi pimpinan, karena semua keputusan harus diambil secara langsung tanpa dukungan dari divisi khusus seperti keuangan, pemasaran, atau sumber daya manusia.

Organisasi garis cocok diterapkan dalam usaha kecil, seperti toko retail keluarga, bengkel, atau perusahaan manufaktur skala kecil, di mana pemilik bisnis masih bisa langsung mengawasi operasional dan mengontrol seluruh aspek usaha.

- Organisasi Fungsional (*Functional Organization*)

Organisasi fungsional adalah struktur organisasi yang membagi tugas dan tanggung jawab berdasarkan spesialisasi pekerjaan. Dalam sistem ini, perusahaan memiliki divisi-divisi yang menangani fungsi tertentu, seperti divisi pemasaran, divisi produksi, divisi keuangan, dan divisi sumber daya manusia. Berikut ini adalah ciri-ciri organisasi fungsional:

- 1) Pembagian kerja berdasarkan spesialisasi keahlian.
- 2) Setiap departemen memiliki wewenang tersendiri dalam bidangnya.
- 3) Pimpinan tidak hanya satu, tetapi terdiri dari beberapa kepala divisi.
- 4) Meningkatkan efisiensi karena pekerjaan dilakukan oleh orang yang ahli dalam bidangnya.
- 5) Komunikasi antar divisi harus dilakukan dengan koordinasi yang jelas.

Model ini sering diterapkan pada perusahaan manufaktur, rumah sakit, atau perusahaan jasa yang membutuhkan keahlian khusus dalam berbagai bidang operasionalnya.

- Organisasi Garis dan Staf (*Line and Staff Organization*)

Organisasi garis dan staf merupakan pengembangan dari sistem organisasi garis, di mana terdapat unit staf yang berfungsi sebagai pendukung pengambilan keputusan dalam organisasi. Dalam model ini, terdapat dua jenis peran utama, yaitu:

- 1) Wewenang garis, yang dimiliki oleh pimpinan utama dan manajer dalam jalur komando.
- 2) Wewenang staf, yang berupa tim pendukung atau konsultan yang membantu dalam bidang tertentu seperti perencanaan strategis, penelitian pasar, dan pengembangan SDM.

Diketahui bahwa hierarki dalam organisasi garis dan staf terdiri dari direktur utama atau pimpinan perusahaan yang memiliki otoritas tertinggi, manajer divisi yang memiliki wewenang operasional dalam masing-masing bidang (misalnya produksi, pemasaran, keuangan), dan tim staf yang berfungsi sebagai konsultan atau pendukung dalam pengambilan keputusan, tetapi tidak memiliki wewenang langsung terhadap operasional.

Dalam model ini, tanggung jawab utama dalam operasional tetap berada pada pimpinan garis, tetapi mereka didukung oleh tim staf yang membantu dalam analisis, perencanaan, dan evaluasi. Pada penerapannya organisasi garis dan staf memiliki beberapa keunggulan, diantaranya:

- 1) Pengambilan keputusan lebih akurat, karena didukung oleh tim staf yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu.
- 2) Struktur kerja lebih fleksibel, memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar.



Pimpinan berwenang untuk memberi arahan dan instruksi kepada seluruh tim dibawahnya - istock.com.

3) Tugas pimpinan utama lebih ringan, karena dapat berkonsultasi dengan staf ahli sebelum mengambil keputusan besar.

Di sisi lain, organisasi garis dan staf juga memiliki beberapa kelemahan. Biaya operasional menjadi tinggi, karena membutuhkan lebih banyak tenaga ahli dan unit pendukung. Selain itu, komunikasi menjadi lebih kompleks, karena keputusan harus melalui koordinasi antara pimpinan garis dan tim staf. Konflik peran juga berpotensi terjadi, terutama jika ada ketidakseahaman antara manajer garis dan staf pendukung.

c. Pelaksanaan (Actuating)

Pelaksanaan merupakan tahapan dalam manajemen yang berfokus pada bagaimana strategi dan rencana diterapkan dalam operasional sehari-hari. Manajer harus mampu menggerakkan individu dan tim kerja agar dapat bekerja sesuai dengan tujuan organisasi.

Dalam implementasi manajemen, terdapat pepatah "rambut sama hitam, tetapi jalan pikiran berbeda-beda," yang menekankan bahwa setiap individu memiliki pola pikir dan cara kerja yang berbeda. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus mampu memahami karakteristik masing-masing individu agar dapat menggerakkan mereka secara efektif.

Abraham Maslow (1954) dalam bukunya "Motivation and Personality" menjelaskan bahwa manusia memiliki kebutuhan yang menjadi dasar dalam motivasi kerja:

- ▷ **Kebutuhan fisiologis** yaitu kebutuhan dasar seperti makan dan tidur.
- ▷ **Kebutuhan keamanan** yaitu stabilitas pekerjaan dan perlindungan dari risiko.
- ▷ **Kebutuhan sosial** yakni interaksi dengan rekan kerja dan lingkungan yang mendukung.
- ▷ **Kebutuhan penghargaan** yakni pengakuan atas prestasi dan pencapaian individu.
- ▷ **Kebutuhan aktualisasi diri** yaitu kesempatan untuk berkembang dan mencapai potensi maksimal.

Dalam menggerakkan individu, kepemimpinan memainkan peran penting. Terdapat tiga gaya kepemimpinan utama yang umum dapat kita temui pada zaman sekarang. Pertama, **kepemimpinan otoriter**, dimana pemimpin mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan bawahan. Kedua, **kepemimpinan demokratis** dimana keputusan dibuat berdasarkan diskusi dan partisipasi anggota tim. Ketiga, **kepemimpinan bebas (laissez-faire)** yaitu gaya memimpin yang memberikan kebebasan penuh kepada bawahan dalam menjalankan tugasnya.

d. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan merupakan tahap akhir dalam fungsi manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Henry Fayol dalam bukunya "General Industrial Management" (1916) menekankan bahwa pengawasan adalah proses membandingkan hasil aktual dengan standar yang telah ditentukan serta melakukan koreksi jika terjadi penyimpangan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengawasan:

- ▷ **Routing** yakni menentukan jalur atau metode kerja yang harus diikuti.
- ▷ **Scheduling** yaitu menyusun jadwal kerja agar sesuai dengan target yang ditetapkan.
- ▷ **Dispatching** yaitu mengarahkan dan memberikan instruksi kepada karyawan.
- ▷ **Follow-up** yakni mengevaluasi hasil kerja dan memberikan umpan balik untuk perbaikan.

Achmad Firdaus (2017), pakar manajemen performa, menekankan bahwa pengawasan yang baik harus ekonomis, tidak membebani organisasi, serta memberikan manfaat nyata bagi perbaikan kinerja. Oleh karena itu, sistem pengawasan harus dirancang sedemikian rupa agar tidak

menimbulkan birokrasi yang berlebihan, tetapi tetap dapat memberikan kendali yang efektif terhadap jalannya operasional organisasi.

Jenjang Manajemen dalam Organisasi

Dalam suatu organisasi atau badan usaha, terdapat tingkatan manajemen yang memiliki peran dan tanggung jawab berbeda sesuai dengan tingkat otoritas dan cakupan kerja masing-masing. Struktur ini memastikan bahwa pengambilan keputusan strategis, pengelolaan operasional, dan pengawasan kerja dapat berjalan secara efektif. Secara umum, manajemen terbagi menjadi tiga tingkatan utama, yaitu manajemen puncak (*top management*), manajemen menengah (*middle management*), dan manajemen pelaksana (*supervisory management*).

a. Manajemen Puncak (*Top Management*)

Manajemen puncak merupakan tingkatan tertinggi dalam struktur organisasi yang bertanggung jawab atas perumusan strategi, visi, dan arah kebijakan utama perusahaan. Pada tingkat ini, para pemimpin memiliki peran dalam mengambil keputusan strategis serta mengontrol jalannya organisasi secara keseluruhan.

Posisi yang termasuk dalam manajemen puncak antara lain CEO (Chief Executive Officer), Direktur Utama, Presiden Direktur, dan Komisaris. Mereka berperan dalam mengarahkan organisasi secara makro, menetapkan target jangka panjang, serta membangun hubungan dengan pemangku kepentingan eksternal seperti investor dan mitra bisnis. Keputusan yang diambil di level ini memiliki dampak besar terhadap keberlangsungan perusahaan.

b. Manajemen Menengah (*Middle Management*)

Manajemen menengah berfungsi sebagai jembatan antara manajemen puncak dan manajemen pelaksana. Mereka bertugas untuk menerjemahkan kebijakan strategis dari manajemen puncak ke dalam rencana operasional yang dapat diterapkan di tingkat bawah.

Posisi yang termasuk dalam manajemen menengah antara lain manajer departemen, kepala divisi, atau kepala cabang. Mereka memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kinerja tim dalam bidang tertentu, seperti pemasaran, keuangan, produksi, atau sumber daya manusia. Selain itu, manajer menengah juga berperan dalam melakukan koordinasi antar unit kerja, memastikan bahwa setiap bagian dapat bekerja secara selaras untuk mencapai tujuan organisasi.

c. Manajemen Pelaksana (*Supervisory Management*)

Manajemen pelaksana adalah tingkatan manajemen terdekat dengan operasional sehari-hari. Mereka bertanggung jawab atas pengawasan langsung terhadap karyawan dan pekerja di lapangan, memastikan bahwa tugas-tugas operasional berjalan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Posisi yang termasuk dalam manajemen pelaksana meliputi supervisor, mandor, atau kepala tim (foreman). Mereka bertugas untuk memberikan instruksi kerja, mengawasi produktivitas karyawan, serta menyelesaikan permasalahan teknis yang terjadi dalam operasional perusahaan. Selain itu, manajemen pelaksana juga berperan dalam memberikan umpan balik kepada manajemen menengah mengenai kendala atau perbaikan yang diperlukan dalam proses kerja.

Fakta Unik Seputar Ekonomi

Filosofi Kaizen

Toyota adalah salah satu perusahaan otomotif yang paling efisien di dunia, berkat penerapan filosofi Kaizen, yang berarti perbaikan berkelanjutan. Konsep ini menekankan pada penyempurnaan sistem kerja, pengurangan pemborosan, dan peningkatan produktivitas secara bertahap. Bahkan, di tingkat administrasi, Toyota memiliki aturan 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke) untuk memastikan semua dokumen, alat kerja, dan sistem administrasi tertata rapi, mudah diakses, dan terus diperbarui agar lebih efektif.



Toyota, termasuk perusahaan besar dalam industri otomotif - shutterstock.com.207705892

Aspek-Aspek Manajemen dalam Organisasi

Manajemen dalam sebuah organisasi tidak hanya berfokus pada perencanaan dan pengendalian secara umum, tetapi juga memiliki pembagian bidang-bidang spesifik yang mendukung kelancaran operasional bisnis. Setiap bidang manajemen memiliki tanggung jawab dan fungsi yang berbeda, namun semuanya saling terkait dalam mencapai tujuan perusahaan.

Bidang-bidang utama dalam manajemen meliputi manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan manajemen sumber daya manusia (SDM). Keempat bidang ini merupakan elemen kunci dalam memastikan keberlanjutan organisasi. Salah satu aspek paling krusial adalah manajemen produksi, yang menjadi dasar dalam menghasilkan barang atau jasa dengan efisiensi tinggi dan kualitas terbaik.

a. Manajemen Produksi

Manajemen produksi adalah bagian dari manajemen yang bertanggung jawab atas proses pengolahan bahan baku menjadi produk jadi atau jasa yang siap digunakan oleh konsumen. Keberhasilan dalam manajemen produksi dapat memberikan dampak positif seperti peningkatan efisiensi, kualitas produk yang lebih baik, serta kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika manajemen produksi tidak diterapkan dengan baik, maka dapat berdampak negatif seperti pemborosan sumber daya, serta menurunnya daya saing di pasar.

▷ Definisi Manajemen Produksi dalam Ilustrasi Dunia Pendidikan

Untuk memahami konsep manajemen produksi secara lebih konkret, kita bisa mengambil ilustrasi dari dunia pendidikan, khususnya dalam manajemen sekolah menengah atas (SMA). Dalam konteks ini, sekolah dapat dianggap sebagai "pabrik" yang bertujuan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Input meliputi siswa sebagai peserta didik, kurikulum yang diterapkan, serta tenaga pendidik yang kompeten. Input yang baik akan menentukan kualitas proses pembelajaran.

Proses produksi dalam dunia pendidikan meliputi kegiatan belajar-mengajar, pelatihan, evaluasi akademik, serta kegiatan ekstrakurikuler. Di sinilah berbagai metode pengajaran dan teknologi pendidikan diterapkan agar siswa dapat memperoleh ilmu dan keterampilan dengan baik. Adapun output dari manajemen produksi sekolah adalah lulusan yang siap bersaing dalam dunia pendidikan maupun dunia kerja. Output ini juga mencerminkan efektivitas sistem pendidikan yang diterapkan oleh sekolah.

▷ **Perancangan Sistem Produksi**

Dalam proses produksi, perusahaan harus merancang sistem produksi yang efisien. Beberapa faktor utama dalam perancangan sistem produksi meliputi:

- **Rancangan produk atau jasa**, yaitu menentukan spesifikasi dan standar produk atau layanan yang akan ditawarkan kepada pelanggan.
- **Volume produksi**, yaitu menyesuaikan jumlah produksi dengan permintaan pasar agar tidak terjadi over production atau kekurangan stok.
- **Proses produksi**, yaitu menentukan metode dan tahapan produksi agar berjalan dengan efisien dan menghasilkan produk berkualitas tinggi.
- **Lokasi dan tata letak**, yaitu menentukan lokasi produksi yang strategis serta desain tata letak pabrik atau tempat produksi agar proses kerja lebih optimal.
- **Rancangan kerja**, yaitu menyusun tugas dan tanggung jawab pekerja, termasuk pengaturan shift kerja serta sistem otomatisasi dalam produksi.

▷ **Pengendalian Sistem Produksi**

Pengendalian dalam sistem produksi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahapan produksi berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga kualitas produk tetap terjaga dan biaya produksi dapat ditekan.

- **Pengendalian Mutu (Quality Control)**

Pengendalian mutu bertujuan untuk memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tanpa adanya kontrol yang baik, produk cacat bisa meningkat, yang akhirnya berdampak pada reputasi bisnis dan meningkatnya biaya produksi. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pengendalian mutu diantaranya:

- 1) Input, memastikan bahan baku dan tenaga kerja memiliki standar kualitas tinggi sebelum masuk ke dalam proses produksi.
- 2) Inovasi dan teknologi, menggunakan metode terbaru dalam produksi agar lebih efisien dan menghasilkan produk berkualitas.
- 3) Tanggal berlaku produk, khusus untuk industri makanan dan farmasi, pengawasan terhadap masa berlaku produk menjadi hal yang krusial.
- 4) Pengemasan, kemasan yang baik tidak hanya melindungi produk tetapi juga menarik perhatian konsumen dan meningkatkan daya saing di pasar.

- **Manajemen Persediaan (Inventory Management)**



Tata kelola barang persediaan yang baik menjadi sebab utama tercapainya efisiensi dalam produksi - shutterstock.com/2581165449

Manajemen persediaan berfungsi untuk mengatur jumlah stok bahan baku dan barang jadi agar tetap optimal. Jika persediaan terlalu banyak, maka akan meningkatkan biaya penyimpanan. Sebaliknya, jika terlalu sedikit, produksi bisa terganggu akibat kekurangan bahan baku.

Pendekatan yang sering digunakan dalam manajemen persediaan adalah *economic order quantity* (EOQ), yang merupakan metode untuk menentukan jumlah pesanan

bahan baku yang paling efisien sehingga dapat menekan biaya persediaan dan pemesanan. Dengan metode EOQ, perusahaan dapat menghindari kelebihan stok (overstock) maupun kekurangan stok (stockout), serta mengoptimalkan biaya operasional produksi.

Dengan penerapan manajemen produksi yang baik, perusahaan dapat memastikan bahwa seluruh proses berjalan dengan efisien, menghasilkan produk berkualitas tinggi, serta mampu bersaing di pasar. Tanpa adanya sistem produksi yang terencana dengan baik, perusahaan berisiko mengalami pemborosan sumber daya, inefisiensi kerja, serta menurunnya daya saing dalam industri.

b. Strategi Manajemen Pemasaran

Dalam dunia bisnis, pemasaran memiliki peran krusial dalam menarik pelanggan, meningkatkan penjualan, serta membangun loyalitas terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Philip Kotler (2000) mendefinisikan pemasaran sebagai suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok memperoleh kebutuhan serta keinginan mereka melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk yang bernilai dengan pihak lain. Definisi ini menekankan bahwa pemasaran bukan sekadar menjual produk, tetapi juga memahami keinginan pelanggan dan menciptakan nilai bagi mereka.

Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan strategi pemasaran untuk mencapai kepuasan pelanggan sekaligus keuntungan bagi perusahaan. Manajemen pemasaran melibatkan berbagai aspek, mulai dari riset pasar, segmentasi pelanggan, penentuan strategi promosi, hingga evaluasi kepuasan pelanggan. Tujuannya adalah memastikan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan dapat diterima oleh target pasar dan memiliki daya saing di industri.

- ▷ **Riset Pasar** merupakan tahap awal dalam manajemen pemasaran yang berfungsi untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi mengenai kebutuhan, preferensi, serta perilaku pelanggan. Dengan riset pasar yang baik, perusahaan dapat memahami tren yang sedang berkembang, mengidentifikasi peluang bisnis, serta menghindari kesalahan dalam strategi pemasaran. Riset pasar dapat dilakukan melalui survei, wawancara pelanggan, atau analisis kompetitor.
- ▷ **Segmentasi, Targeting, dan Positioning (STP)** merupakan pendekatan untuk menentukan siapa pelanggan utama perusahaan dan bagaimana produk atau jasa harus diposisikan dalam pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok pelanggan berdasarkan karakteristik tertentu, seperti usia, lokasi, gaya hidup, atau perilaku konsumsi. Adapun targeting merupakan pemilihan segmen pasar yang paling sesuai dengan produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Sedangkan positioning adalah strategi membangun citra produk di benak pelanggan agar memiliki keunikan dan keunggulan dibandingkan pesaing.
- ▷ **Bauran Pemasaran (Marketing Mix)** merupakan strategi yang mencakup empat elemen utama (4P) dalam pemasaran.
 - 1) *Product* (produk). Perusahaan harus menawarkan produk atau layanan yang memiliki nilai bagi pelanggan, baik dari segi kualitas, desain, maupun manfaat yang diberikan.
 - 2) *Price* (Harga). Penentuan harga harus mempertimbangkan daya beli pelanggan, harga kompetitor, serta strategi keuntungan perusahaan.
 - 3) *Promotion* (Promosi). Perusahaan menggunakan berbagai metode komunikasi, seperti iklan, media sosial, sponsorship, dan diskon untuk menarik pelanggan.
 - 4) *Place* (Distribusi). Produk harus tersedia di tempat yang mudah dijangkau pelanggan, baik melalui toko fisik, distributor, maupun e-commerce.

- ▷ **Kepuasan Pelanggan** merupakan salah satu tujuan utama dalam pemasaran. Kepuasan pelanggan terjadi ketika mereka merasa bahwa produk atau layanan yang diterima sesuai atau bahkan melebihi ekspektasi mereka. Kepuasan dipengaruhi oleh mutu barang atau jasa yang ditawarkan. Selain itu, kemudahan produk untuk ditemukan dan diperoleh oleh pelanggan melalui berbagai saluran distribusi yang nyaman juga menjadi pengaruh utama. Selain itu, adanya layanan tambahan seperti garansi, customer service responsif, serta program loyalitas untuk meningkatkan pengalaman pelanggan juga dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, serta memperkuat posisi merek di pasar.



Service excellent termasuk faktor utama dalam tercapainya kepuasan pelanggan - shutterstock.com.182011382

c. Pengelolaan Keuangan dalam Bisnis

Manajemen keuangan adalah aspek krusial dalam mengelola badan usaha, karena berkaitan dengan bagaimana perusahaan memperoleh, mengalokasikan, dan mengendalikan dana agar dapat beroperasi secara efisien serta mencapai keuntungan yang optimal. Manajemen keuangan tidak hanya memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk mendukung aktivitas bisnis, tetapi juga mengatur strategi investasi, perencanaan anggaran, serta evaluasi kinerja keuangan perusahaan. Keputusan keuangan yang tepat akan membantu perusahaan bertahan dalam persaingan dan berkembang secara berkelanjutan.

- ▷ **Sumber Dana dalam Perusahaan**

Perusahaan membutuhkan modal untuk menjalankan operasionalnya. Sumber dana ini dapat berasal dari dua kategori utama, yaitu dana yang berasal dari internal perusahaan dan dana yang berasal dari sumber eksternal perusahaan.

- **Dana yang Berasal dari Internal Perusahaan**

- 1) Laba ditahan, yaitu keuntungan yang tidak dibagikan sebagai dividen, tetapi digunakan kembali untuk ekspansi bisnis.
- 2) Penyusutan aset, yakni dana yang dialokasikan dari depresiasi aset untuk penggantian atau peremajaan peralatan produksi.
- 3) Modal pemilik atau pemegang saham.

- **Dana yang Berasal dari Sumber Eksternal**

- 1) Pinjaman bank, yaitu kredit modal kerja yang diperoleh dari lembaga keuangan untuk membiayai kegiatan usaha.
- 2) Penerbitan obligasi, yaitu proses dimana perusahaan mengumpulkan dana dari investor dengan menjual surat utang (obligasi).
- 3) Modal ventura, yaitu dana yang diperoleh dari investor yang bersedia menanamkan modal dengan harapan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang.

▷ Penggunaan Dana dalam Perusahaan

Dana yang diperoleh perusahaan harus dialokasikan dengan bijak agar dapat mendukung pertumbuhan bisnis dan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Penggunaan dana dalam perusahaan dapat dibedakan berdasarkan jangka waktu investasinya.

- **Penanaman Modal Jangka Pendek**

Digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional sehari-hari, seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, serta biaya pemasaran dan distribusi. Modal jangka pendek juga memiliki sifat likuid, sehingga dana dapat digunakan dengan cepat tanpa menimbulkan risiko keuangan yang besar.

- **Penanaman Modal Jangka Panjang**

Digunakan untuk investasi dalam pengadaan aset tetap seperti mesin, peralatan, kendaraan operasional, atau pembangunan pabrik baru. Modal jangka panjang bersifat strategis dan berorientasi pada pengembangan bisnis jangka panjang, sehingga membutuhkan analisis yang lebih mendalam sebelum keputusan investasi dibuat.

▷ Pengawasan dalam Penggunaan Dana

Agar keuangan perusahaan tetap sehat dan terkendali, perlu dilakukan pengawasan terhadap penggunaan dana dengan fokus pada efisiensi dan efektivitas. Pengawasan ini memastikan bahwa dana yang dikeluarkan perusahaan benar-benar mendukung pencapaian tujuan bisnis tanpa adanya pemborosan atau penyalahgunaan anggaran. Adapun prinsip utama dalam pengawasan keuangan meliputi:

- **Efisiensi**, yaitu memastikan bahwa dana digunakan dengan cara yang paling hemat tanpa mengurangi kualitas produk atau layanan.
- **Efektivitas**, yaitu memastikan bahwa setiap pengeluaran yang dilakukan benar-benar berkontribusi pada peningkatan kinerja dan pertumbuhan bisnis.
- **Melalui sistem pengawasan yang ketat**, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan, menghindari risiko kebangkrutan, serta meningkatkan kepercayaan investor dan pemegang saham.

d. Pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam Organisasi

Manajemen personalia atau manajemen sumber daya manusia (SDM) adalah aspek penting dalam suatu organisasi, karena berkaitan dengan perekrutan, pengelolaan, pengembangan, serta kesejahteraan karyawan. Dengan sistem manajemen personalia yang baik, perusahaan dapat memastikan bahwa tenaga kerja yang dimiliki kompeten, termotivasi, dan memiliki produktivitas tinggi, sehingga dapat memberikan kontribusi optimal bagi organisasi.

▷ Penerimaan Pegawai



Job interview merupakan salah satu rangkaian dalam proses rekrutmen - shutterstock.com:79903759

Proses penerimaan pegawai harus dilakukan dengan sistematis dan selektif agar perusahaan mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dalam perekrutan pegawai terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan. Pertama, menentukan posisi yang dibutuhkan, tugas dan tanggung jawabnya, serta kualifikasi yang harus dimiliki oleh calon pegawai. Berikutnya, melalui proses penyaringan yang meliputi tes

kemampuan, wawancara, dan evaluasi kecocokan dengan budaya perusahaan.

Selanjutnya setelah diterima, pegawai perlu diberikan orientasi, pelatihan keterampilan, dan pengembangan kompetensi agar dapat bekerja secara optimal. Dan yang terakhir adalah proses penerimaan pegawai, dimana pertimbangan tidak hanya pada aspek keterampilan teknis, tetapi juga karakter, komitmen, dan kemampuan beradaptasi dengan budaya kerja perusahaan.

▷ **Penilaian Pegawai**

Penilaian pegawai dilakukan untuk mengukur kinerja karyawan serta menentukan apakah mereka memenuhi standar kerja yang telah ditetapkan. Proses ini dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti:

- Kualitas dan kuantitas pekerjaan yang diselesaikan.
- Kedisiplinan, etika kerja, dan kepatuhan terhadap peraturan perusahaan.
- Kemampuan kerja sama dalam tim serta kontribusi terhadap pencapaian organisasi.
- Hasil penilaian kinerja ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait promosi, mutasi, atau pelatihan lebih lanjut bagi karyawan.

▷ **Promosi dan Mutasi Pegawai**

Pergantian posisi dalam organisasi dilakukan untuk menyesuaikan keahlian pegawai dengan kebutuhan perusahaan, serta untuk memberikan kesempatan pengembangan karier bagi karyawan. Pergantian posisi ini bisa berupa mutasi maupun promosi, tergantung pada performa karyawan serta kebutuhan organisasi.

Pegawai dapat diberhentikan jika mereka tidak lagi memenuhi standar kerja perusahaan, sering melakukan pelanggaran, atau tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja. Jika didapatkan perusahaan sedang melakukan perampingan organisasi, maka mutasi ke posisi yang lebih terbatas dapat dijadikan pilihan. Sementara itu, rotasi atau perpindahan jabatan, dilakukan untuk menyesuaikan keterampilan pegawai dengan kebutuhan organisasi, atau sebagai bagian dari pengembangan karier pegawai.

Di sisi lain, promosi jabatan dapat diberikan kepada pegawai yang menunjukkan kinerja unggul, loyalitas tinggi, serta memiliki keterampilan kepemimpinan yang baik. Promosi ini bertujuan untuk memberikan penghargaan atas kerja keras karyawan serta memotivasi mereka untuk terus berkembang.

▷ **Motivasi dalam Dunia Kerja**

Motivasi sangat berperan dalam meningkatkan semangat, produktivitas, dan loyalitas pegawai terhadap organisasi. Umar Chapra (1992) dalam kajiannya tentang ekonomi Islam menyatakan bahwa motivasi tidak hanya bersifat material, tetapi juga harus didasarkan pada nilai-nilai moral dan spiritual. Artinya, perusahaan tidak cukup hanya memberikan insentif finansial, tetapi juga harus menciptakan lingkungan kerja yang adil, memberikan penghargaan atas kinerja baik, serta membangun budaya kerja yang menghargai kontribusi setiap individu.

Dalam upaya meningkatkan motivasi pegawai, perusahaan dapat memberikan penghargaan atas pencapaian kerja, membangun lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung, dan memberikan kesempatan bagi karyawan untuk berkembang melalui pelatihan dan jenjang karier.

e. Manajemen Administrasi dalam Organisasi

Manajemen administrasi merupakan aspek penting dalam menjaga kelancaran operasional organisasi. Administrasi yang baik memastikan bahwa seluruh proses pencatatan, pengarsipan, serta pengelolaan sumber daya organisasi dilakukan secara sistematis dan efisien.

▷ **Administrasi dalam Kegiatan Operasional**

Administrasi kegiatan dalam perusahaan meliputi pengelolaan dokumen, data karyawan, laporan keuangan, serta pencatatan transaksi bisnis. Administrasi yang rapi dan terstruktur membantu perusahaan dalam mempermudah akses terhadap informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bisnis, serta menghindari kesalahan akibat kurangnya pencatatan atau kehilangan data penting.

▷ **Pengelolaan dan Penggunaan Alat-Alat Perkantoran**

Efisiensi dalam penggunaan alat-alat perkantoran juga menjadi bagian dari manajemen administrasi. Perusahaan perlu memastikan bahwa peralatan kantor seperti komputer, mesin fotokopi, serta sistem komunikasi digunakan secara optimal. Selain itu, perlu ada pengelolaan inventaris agar tidak terjadi pemborosan dalam pengadaan alat kerja.

▷ **Pemeliharaan Organisasi**

Agar organisasi tetap berjalan dengan baik, perlu adanya pemeliharaan yang berkelanjutan, baik dalam aspek struktur organisasi, sistem kerja, maupun hubungan antar karyawan. Pemeliharaan organisasi dapat dilakukan melalui:

- Evaluasi berkala terhadap efektivitas struktur organisasi.
- Peningkatan kualitas kerja melalui inovasi dalam prosedur administrasi.
- Membangun budaya organisasi yang kuat dan profesional.

Manajemen personalia dan administrasi yang terstruktur dengan baik akan memastikan kelangsungan bisnis yang lebih stabil, meningkatkan produktivitas karyawan, serta memperkuat daya saing perusahaan dalam industri.

Contoh Soal

Sebuah perusahaan menghadapi tantangan dalam mengelola sumber daya manusia karena banyak karyawan yang merasa kurang termotivasi, serta adanya ketidakefisienan dalam administrasi perusahaan. Jika Anda adalah seorang manajer, langkah apa yang akan Anda ambil untuk meningkatkan motivasi pegawai dan mengoptimalkan sistem administrasi? Jelaskan secara singkat!

Pembahasan:

Untuk meningkatkan motivasi pegawai, perusahaan dapat menerapkan langkah-langkah berikut:

- 1) Memberikan penghargaan dan insentif bagi pegawai yang berprestasi.
- 2) Menyediakan pelatihan dan pengembangan karier agar karyawan memiliki kesempatan berkembang.
- 3) Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, dengan budaya kerja yang mendukung.

Sementara itu, untuk mengoptimalkan sistem administrasi, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah:

- 1) Menerapkan sistem pencatatan digital agar data lebih mudah diakses dan dikelola.
- 2) Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan komputer dan perangkat lunak manajemen.
- 3) Melakukan evaluasi berkala terhadap administrasi.

Dengan mengelola sumber daya manusia dan administrasi secara efektif, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

Rangkuman

- ▷ Konsep badan usaha mencakup berbagai entitas ekonomi yang berfungsi untuk menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat, memperoleh keuntungan, serta berkontribusi dalam perekonomian nasional.
- ▷ Perbedaan badan usaha dan perusahaan terletak pada aspek hukumnya, di mana badan usaha merupakan entitas yang mengatur kegiatan bisnis secara luas, sementara perusahaan lebih berfokus pada unit produksi atau operasionalnya.
- ▷ Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berperan dalam mengelola sektor strategis guna mendukung pembangunan ekonomi, menyediakan layanan publik, serta memastikan distribusi sumber daya yang adil sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.
- ▷ BUMN terdiri dari dua jenis utama, yaitu Persero, yang berorientasi pada keuntungan dengan kepemilikan saham oleh negara, dan Perum, yang lebih berfokus pada pelayanan masyarakat dengan tetap mempertahankan aspek bisnis yang sehat.
- ▷ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki fungsi utama dalam mengembangkan perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor industri, perbankan, dan layanan publik.
- ▷ Kelebihan BUMN dan BUMD terletak pada dukungan pemerintah serta akses terhadap sumber daya strategis, sementara kelemahannya sering kali berkaitan dengan birokrasi yang panjang dan efisiensi yang kurang optimal.
- ▷ Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) merupakan entitas bisnis yang dijalankan oleh individu atau kelompok swasta dengan tujuan utama memperoleh keuntungan, serta memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan BUMN dan BUMD.
- ▷ BUMS memiliki peran penting dalam perekonomian sebagai mitra BUMN, pencipta lapangan kerja, pemicu inovasi, serta sumber utama pajak dan devisa negara melalui kegiatan ekspor dan investasi.
- ▷ Bentuk BUMS mencakup usaha perseorangan, persekutuan (firma dan CV), serta perseroan terbatas (PT), dengan masing-masing memiliki keunggulan dan tantangan tersendiri dalam aspek kepemilikan, pengelolaan, serta pengumpulan modal.
- ▷ Koperasi merupakan badan usaha yang berlandaskan prinsip gotong royong, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota melalui kegiatan ekonomi yang berbasis partisipasi aktif dan keadilan sosial.
- ▷ Jenis koperasi di Indonesia meliputi koperasi konsumsi, produksi, simpan pinjam, jasa, dan multiusaha, dengan peran utama dalam mendukung sektor ekonomi kerakyatan serta menciptakan akses yang lebih luas bagi anggotanya dalam mendapatkan layanan keuangan dan usaha.
- ▷ Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam koperasi dilakukan secara adil berdasarkan kontribusi anggota, baik dalam bentuk simpanan modal maupun transaksi yang dilakukan dengan koperasi, sehingga berbeda dari pembagian laba dalam badan usaha konvensional.
- ▷ Manajemen dalam badan usaha bertujuan untuk mengelola sumber daya secara efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian agar operasional berjalan optimal dan mencapai tujuan bisnis.
- ▷ Tingkat manajemen dalam organisasi terbagi menjadi tiga, yaitu manajemen puncak (top management) yang menetapkan strategi bisnis, manajemen menengah (middle management) yang menerjemahkan strategi ke dalam kebijakan, serta manajemen pelaksana (supervisory management) yang memastikan operasional berjalan sesuai rencana.
- ▷ Manajemen produksi berperan dalam mengatur proses produksi agar berjalan efisien, minim pemborosan, dan menghasilkan produk berkualitas tinggi, dengan fokus pada perancangan sistem produksi, pengendalian mutu, serta pengelolaan persediaan bahan baku.
- ▷ Manajemen pemasaran bertujuan untuk menciptakan permintaan melalui riset pasar, strategi segmentasi, targeting, dan positioning (STP), serta penerapan bauran pemasaran (4P: produk, harga, promosi, dan distribusi) guna meningkatkan daya saing produk di pasar.

- ▷ Manajemen keuangan mengatur sumber dan penggunaan dana agar bisnis tetap stabil, dengan fokus pada pengelolaan modal kerja, investasi jangka pendek dan jangka panjang, serta pengawasan efisiensi keuangan untuk menghindari risiko keuangan yang tidak terkendali.
- ▷ Manajemen personalia bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya manusia, meliputi perekrutan pegawai, penilaian kinerja, promosi dan mutasi, serta strategi motivasi untuk meningkatkan produktivitas dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan.
- ▷ Manajemen administrasi memastikan kelancaran operasional bisnis dengan mengelola sistem pencatatan, pengarsipan, serta efisiensi penggunaan peralatan kantor, yang menjadi faktor pendukung dalam pengambilan keputusan berbasis data yang akurat.
- ▷ Keseluruhan sistem manajemen dalam badan usaha harus berjalan selaras agar menciptakan organisasi yang efisien, inovatif, dan kompetitif, serta mampu bertahan dalam persaingan global dengan tetap memberikan nilai tambah bagi stakeholder dan masyarakat.

Latihan Soal

1. Salah satu perbedaan utama antara badan usaha dan perusahaan adalah...
 - A. Badan usaha hanya berorientasi pada laba, sedangkan perusahaan tidak
 - B. Badan usaha merupakan entitas ekonomi, sedangkan perusahaan merupakan unit produksi
 - C. Perusahaan lebih besar dari badan usaha dalam cakupan hukum
 - D. Badan usaha tidak memiliki tanggung jawab hukum dalam operasionalnya
 - E. Perusahaan dan badan usaha memiliki definisi yang sama
2. Salah satu tujuan utama pendirian BUMN adalah...
 - A. Memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham
 - B. Memonopoli sektor bisnis yang menguntungkan
 - C. Menjalankan fungsi pelayanan publik dan mendukung ekonomi nasional
 - D. Mencegah keterlibatan swasta dalam industri strategis
 - E. Menghindari pajak dengan kepemilikan negara
3. Perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dengan tujuan melayani kebutuhan masyarakat setempat disebut...
 - A. BUMN
 - B. BUMS
 - C. BUMD
 - D. Koperasi
 - E. Perseroan Terbatas
4. Salah satu ciri utama koperasi dibandingkan dengan badan usaha lainnya adalah...
 - A. Berorientasi pada profit yang maksimal
 - B. Beroperasi berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi
 - C. Dikelola oleh pemegang saham terbesar
 - D. Pemiliknya adalah pemerintah pusat
 - E. Tidak memiliki anggota tetap
5. Manajemen memiliki fungsi utama dalam mengelola badan usaha. Fungsi yang bertanggung jawab atas penyusunan struktur organisasi dan pembagian kerja adalah...
 - A. Planning
 - B. Organizing
 - C. Actuating
 - D. Controlling
 - E. Supervising
6. Dalam pemasaran, strategi yang berfokus pada bagaimana suatu produk dipersepsikan di benak pelanggan disebut...
 - A. Segmentasi pasar
 - B. Targeting
 - C. Positioning
 - D. Diferensiasi
 - E. Diversifikasi

7. Salah satu tantangan utama dalam manajemen keuangan adalah...
 - A. Mengatur jadwal rapat tim
 - B. Menjaga keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran perusahaan
 - C. Menentukan promosi produk
 - D. Mengelola hubungan pelanggan
 - E. Meningkatkan jumlah tenaga kerja tanpa perhitungan anggaran
8. Seorang manajer SDM ingin meningkatkan motivasi kerja pegawai. Salah satu cara efektif yang dapat diterapkan adalah...
 - A. Menambah jam kerja tanpa memberikan insentif tambahan
 - B. Memberikan kesempatan pengembangan karier dan pelatihan
 - C. Mengurangi gaji pegawai untuk efisiensi anggaran
 - D. Menerapkan sistem kerja yang lebih ketat dan kaku
 - E. Menghapus evaluasi kinerja tahunan

**Akses latihan soal
lainnya di sini yuk!**



Referensi

- Abdullah, M., & Tantri, F. (2019). Microeconomics and Macroeconomics: Economic Concepts and Policies in Indonesia. Rajawali Press.
- Chapra, M. U. (1992). Islam and the Economic Challenge. Islamic Foundation.
- Drucker, P. (1954). The Practice of Management. Harper & Brothers.
- Fayol, H. (1916). General and Industrial Management. Dunod et E. Pinat.
- Firdaus, A. (2017). Manajemen Kinerja: Strategi Efektif Meningkatkan Produktivitas Organisasi. Pustaka Pelajar.
- Hanel, A. (1992). Cooperative Economy in the New Millennium: A Conceptual Framework for the Future. ICA Publications.
- Hansmann, H. (1996). The Ownership of Enterprise. Harvard University Press.
- Kotler, P. (2000). Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation, and Control (10th ed.). Prentice Hall.
- Mankiw, N. G. (2020). Principles of Economics (9th ed.). Cengage Learning.
- Maslow, A. H. (1954). Motivation and Personality. Harper & Row.
- Mawardi, A. (1058). Al-Ahkam Al-Sultaniyyah. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- McGregor, D. (1960). The Human Side of Enterprise. McGraw-Hill.
- O'Donnell, C., & Newman, W. H. (1965). Principles of Management. Prentice Hall.
- Porter, M. E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. The Free Press.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2016). Management (13th ed.). Pearson.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2010). Economics (19th ed.). McGraw-Hill Education.
- Siagian, S. P. (2002). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara.
- Simanjuntak, P. J. (2001). Ekonomi Koperasi dan Kewirausahaan. Erlangga.
- Soetrisno, H. (2018). Manajemen Koperasi dan Kewirausahaan. Graha Ilmu.
- Tambunan, T. T. H. (2017). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia: Isu-isu Penting. LP3ES.
- Terry, G. R. (1953). Principles of Management. Richard D. Irwin Inc.
- Toyota Production System. (2011). Kaizen: The Key to Japan's Competitive Success. McGraw Hill.
- Umar, H. (2020). Strategic Human Resource Management: Teori dan Aplikasi di Indonesia. Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.



BAB 2: PENDAPATAN NASIONAL DAN KETIMPANGAN EKONOMI

Karakter Pelajar Pancasila

Berkeberagaman global: menghargai perbedaan kesejahteraan.

Bergotong royong: peduli terhadap pemerataan ekonomi.

Kreatif: mampu menganalisis ekonomi nasional.

Tujuan Pembelajaran: Mengurai Konsep Pendapatan Nasional dan Ketimpangan Ekonomi

1. Memahami Konsep Pendapatan Nasional

- ▷ Menjelaskan pengertian pendapatan nasional dalam hal perekonomian negara.
- ▷ Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional.

2. Menganalisis Komponen dan Manfaat Pendapatan Nasional

- ▷ Menguraikan elemen-elemen utama yang menyusun pendapatan nasional.
- ▷ Menjelaskan manfaat pendapatan nasional bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

3. Menjelaskan Metode Perhitungan Pendapatan Nasional

● **Kata Kunci:** Pendapatan Nasional, Pendapatan per Kapita, PDB, PNB, Produksi, Pengeluaran, Kesenjangan Ekonomi, Distribusi Pendapatan.

- ▷ Mengidentifikasi berbagai metode perhitungan pendapatan nasional, seperti metode produksi, pendapatan, dan pengeluaran.
- ▷ Membandingkan kelebihan dan keterbatasan masing-masing metode dalam analisis ekonomi.

4. Memahami Konsep Pendapatan Per Kapita

- ▷ Menguraikan cara perhitungan pendapatan per kapita.
- ▷ Menganalisis hubungan antara pendapatan per kapita dan tingkat kesejahteraan.

5. Mengidentifikasi dan Menganalisis Kesenjangan Ekonomi

- ▷ Menjelaskan konsep kesenjangan ekonomi dan faktor-faktor penyebabnya.
- ▷ Menguraikan dampak kesenjangan ekonomi terhadap stabilitas sosial.

6. Menganalisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Nasional

- ▷ Menjelaskan bagaimana distribusi pendapatan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.
- ▷ Mengevaluasi kebijakan yang dapat mengurangi ketimpangan ekonomi.



F I T R I



1. Pendapatan Nasional

Setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berfungsi untuk mengukur dan mengelola kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu indikator penting dalam sistem ini adalah pendapatan nasional, yang menggambarkan total nilai ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Konsep ini tidak hanya berhubungan dengan angka-angka makro ekonomi, tetapi juga mencerminkan bagaimana kekayaan suatu negara didistribusikan kepada masyarakatnya. Oleh karena itu, memahami pendapatan nasional menjadi langkah awal untuk menilai apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi telah merata atau justru memperlebar kesenjangan sosial.

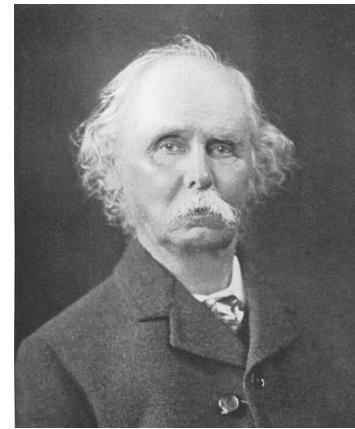
Konsep Dasar Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional memiliki berbagai definisi yang dikembangkan oleh para ekonom dari waktu ke waktu. Beberapa definisi yang umum digunakan antara lain bahwa pendapatan nasional adalah total pendapatan yang diperoleh oleh faktor-faktor produksi dalam suatu negara dalam satu periode tertentu, biasanya satu tahun. Disebutkan juga bahwa pendapatan nasional menggambarkan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan.

Lebih luas lagi, pendapatan nasional didefinisikan sebagai akumulasi dari seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara, termasuk gaji, keuntungan usaha, dan pajak tidak langsung. Di sisi lain, pendapatan nasional diartikan sebagai indikator untuk mengukur kesejahteraan ekonomi suatu negara dan seberapa efektif sistem ekonominya dalam mendistribusikan kekayaan.

Alfred Marshall, dalam bukunya *Principles of Economics* (1890), mendefinisikan pendapatan nasional sebagai total pendapatan yang diperoleh oleh penduduk suatu negara dalam satu tahun, termasuk gaji, keuntungan usaha, dan pendapatan dari aset produktif lainnya. Marshall menekankan bahwa pendapatan nasional tidak hanya mencakup nilai barang dan jasa yang dihasilkan, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kesejahteraan yang diperoleh masyarakat dari pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, memahami pendapatan nasional bukan hanya sekadar menghitung angka, tetapi juga menelaah bagaimana ekonomi suatu negara berkembang dari waktu ke waktu dan bagaimana distribusi pendapatan dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.



Alfred Marshall - wikimedia.com.

Selanjutnya, **Ibnu Khaldun** berpendapat bahwa pendapatan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh produksi barang dan jasa, tetapi juga oleh stabilitas sosial, politik, dan moral masyarakatnya. Menurutnya, perekonomian yang sehat lahir dari keseimbangan antara sektor produksi, perdagangan, dan distribusi yang adil. Selain itu, ditekankan juga bahwa pendapatan nasional suatu negara akan meningkat seiring dengan kemajuan peradaban dan tata kelola pemerintahan yang baik. Jika suatu negara memiliki pemimpin yang adil dan sistem perpajakan yang tidak membebani rakyat, maka perekonomian akan berkembang pesat.

Di sisi lain, **Irving Fisher** menitikberatkan pada konsep *capital and income*, di mana pendapatan nasional seharusnya tidak hanya dihitung berdasarkan jumlah uang yang beredar, tetapi juga mempertimbangkan nilai produktif dari aset yang dimiliki negara. Pendekatan Fisher ini menjadi dasar bagi berbagai analisis ekonomi modern, terutama dalam melihat hubungan antara investasi, tabungan, dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, semakin besar kapasitas suatu negara dalam mengelola sumber daya dan investasinya, semakin tinggi pula tingkat pendapatan nasional yang dapat dicapai.

Konsep-Konsep yang Berkaitan dengan Pendapatan Nasional

a. Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product/GDP)

Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP) adalah nilai total seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dalam batas wilayah suatu negara dalam periode tertentu, biasanya satu tahun. GDP sering digunakan sebagai indikator utama untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, GDP Indonesia mencapai Rp 20.500,2 triliun, mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka Rp 19.000,3 triliun. Kenaikan ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi yang kuat setelah pandemi serta peningkatan aktivitas produksi dan konsumsi domestik. Dengan tren pertumbuhan ini, Indonesia menunjukkan potensi ekonomi yang stabil meskipun masih menghadapi tantangan seperti inflasi dan ketimpangan ekonomi antar wilayah.

b. Produk Nasional Bruto (Gross National Product/GNP)

Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP) adalah nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara suatu negara, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam periode tertentu. Berbeda dengan GDP yang hanya memperhitungkan aktivitas ekonomi dalam batas negara, GNP memasukkan pendapatan yang diperoleh dari investasi dan tenaga kerja warga negara yang bekerja di luar negeri, serta mengurangi pendapatan yang dihasilkan oleh pihak asing di dalam negeri.

Misalnya, jika terdapat banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri dan mengirimkan pendapatan mereka ke Indonesia, maka nilai GNP akan lebih besar dari GDP. Namun, sebaliknya jika terdapat banyak perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia dan mengirimkan keuntungannya ke luar negeri, maka GNP bisa lebih kecil dari GDP. Perbedaan antara GNP dan GDP dapat memberikan gambaran tentang seberapa besar keterlibatan warga negara dalam ekonomi global.

c. Produk Nasional Neto (Net National Product/NNP)

Produk Nasional Neto (NNP) adalah nilai GNP setelah dikurangi depresiasi atau penyusutan terhadap barang modal yang digunakan dalam proses produksi. Dengan kata lain, NNP menunjukkan nilai bersih dari barang dan jasa yang tersedia untuk konsumsi dan investasi setelah memperhitungkan penyusutan aset produksi. Berikut adalah rumus perhitungan NNP:

$$\text{NNP} = \text{GNP} - (\text{penyusutan} + \text{barang pengganti modal})$$

d. Pendapatan Nasional Neto (Net National Income/NNI)

Pendapatan Nasional Neto (NNI) adalah NNP setelah dikurangi pajak tidak langsung, seperti pajak pertambahan nilai (PPN) dan cukai. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dibebankan kepada konsumen secara tidak langsung melalui harga barang dan jasa. Berikut ialah rumus perhitungan NNI:

$$\text{NNI} = \text{NNP} - \text{pajak tidak langsung} + \text{subsidi}$$

e. Pendapatan Individu/Perseorangan (Personal Income/PI)

Pendapatan Individu atau Personal Income (PI) adalah pendapatan yang diterima oleh individu atau rumah tangga sebelum dikurangi pajak penghasilan. PI mencakup gaji, upah, keuntungan usaha, bunga, dividen, serta transfer pembayaran dari pemerintah, seperti tunjangan sosial atau subsidi. Rumus perhitungan PI sebagai berikut:

$$\text{PI} = \text{NNI} + \text{transfer payment} - (\text{laba ditahan} + \text{iuran asuransi} + \text{iuran jaminan sosial} + \text{pajak perseroan})$$

f. **Pendapatan Disposabel/Setelah Pajak (Disposable Income/DI)**

Pendapatan Disposabel atau Disposable Income (DI) adalah pendapatan individu setelah dikurangi pajak penghasilan. Ini merupakan pendapatan yang benar-benar dapat digunakan oleh masyarakat untuk konsumsi dan tabungan. Berikut ini adalah rumus perhitungan DI:

$$\text{Disposable Income (DI)} = \text{personal income} - \text{pajak langsung}$$

g. **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan di suatu daerah atau provinsi dalam periode tertentu. PDRB merupakan indikator utama dalam mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dan sering digunakan untuk membandingkan perkembangan ekonomi antar daerah.

PDRB membantu dalam merumuskan kebijakan ekonomi daerah dan menunjukkan sektor-sektor yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan memahami PDRB, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif untuk mengurangi kesenjangan antar daerah. Untuk lebih memahami konsep diatas, perhatikan ilustrasi pendapatan suatu negara berikut:

Diketahui sebuah negara memiliki data sebagai berikut (dalam miliar).

Produk domestik bruto (gross domestic product)	Rp 380,00
Produk yang dihasilkan masyarakat asing di dalam negeri	Rp 42,00
Produk yang dihasilkan masyarakat nasional di luar negeri	Rp 30,00
Penyusutan dan pergantian modal	Rp 25,00
Pajak tidak langsung	Rp 42,00
Dana sosial	Rp 10,00
Laba ditahan	Rp 15,00
Pajak perseroan	Rp 28,00
Iuran asuransi	Rp 16,00
Pembayaran transfer pemerintah	Rp 14,00
Pajak langsung	Rp 11,00

Berdasarkan data yang diberikan, berikut ini adalah tahapan perhitungan pendapatan yang siap dibelanjakan (disposable income):

Produk domestik bruto (gross domestic product)	Rp 380,00
Produk yang dihasilkan masyarakat asing di dalam negeri	Rp 42,00
	_____ (-)
	Rp 338,00
Produk yang dihasilkan masyarakat nasional di luar negeri	Rp 30,00
	_____ (+)
Produk nasional bruto (gross national product)	Rp 368,00
Penyusutan dan pergantian modal	Rp 25,00
	_____ (-)

Produk nasional neto (<i>net national product</i>)	Rp 343,00
Pajak tidak langsung	Rp 42,00
	_____ (-)
Pendapatan nasional neto (<i>net national income</i>)	Rp 301,00
Dana sosial	Rp 10,00
Laba ditahan	Rp 15,00
Pajak perseroan	Rp 28,00
Iuran asuransi	Rp 16,00
	_____ (-)
Pembayaran transfer pemerintah	Rp 232,00
	Rp 14,00
	_____ (+)
Pendapatan pribadi	Rp 246,00
Pajak langsung	Rp 11,00
	_____ (-)
Pendapatan yang siap dibelanjakan (<i>disposable income</i>)	Rp 235,00

Signifikansi Pendapatan Nasional dalam Perekonomian

Pendapatan nasional tidak hanya berfungsi sebagai indikator ekonomi, tetapi juga sebagai alat analisis yang membantu pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam memahami kondisi perekonomian suatu negara. Data pendapatan nasional dapat digunakan untuk mengidentifikasi pertumbuhan ekonomi, pola distribusi pendapatan, serta efektivitas kebijakan yang diterapkan. Dengan memahami pendapatan nasional, suatu negara dapat menyusun strategi ekonomi yang lebih tepat guna, baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun dalam mengurangi kesenjangan ekonomi. Secara umum manfaat dari pendapatan nasional ialah sebagai rujukan informasi untuk:

a. Menganalisis Tren Pertumbuhan Ekonomi

Pendapatan nasional memberikan gambaran tentang perkembangan ekonomi dari waktu ke waktu. Data tersebut membantu pemerintah dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan fiskal dan moneter.

b. Mengidentifikasi Struktur Ekonomi Negara

Melalui pendapatan nasional, kita dapat memahami sektor-sektor dominan dalam perekonomian, seperti pertanian, industri, atau jasa. Di sisi lain, struktur ekonomi suatu negara mencerminkan ketahanan dan potensi pertumbuhannya dalam jangka panjang.

c. Menilai Kemajuan dan Daya Saing Negara

Pendapatan nasional dapat menjadi parameter untuk membandingkan tingkat kesejahteraan antar negara. Data tersebut membantu dalam perumusan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Adapun manfaat dari mempelajari pendapatan nasional adalah sebagai berikut:

a. Sebagai Ukuran Kesejahteraan Masyarakat

Memahami pendapatan nasional membantu dalam menilai tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat.

b. Sebagai Acuan Perencanaan Pembangunan

Pemerintah dapat menggunakan data pendapatan nasional untuk menentukan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

c. Sebagai Panduan dalam Keputusan Investasi

Investor dapat menilai potensi pertumbuhan ekonomi suatu negara sebelum berinvestasi.

d. Sebagai Indikator Stabilitas Ekonomi

Dengan melihat tren pendapatan nasional, pemerintah dapat mengidentifikasi tanda-tanda krisis ekonomi dan mengambil langkah mitigasi.

Unsur-Unsur dalam Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional dapat diukur melalui beberapa pendekatan utama yang digunakan dalam analisis ekonomi makro. Pendekatan ini mencerminkan berbagai sumber pendapatan yang diperoleh oleh individu, perusahaan, dan pemerintah dalam suatu negara.

a. Berdasarkan Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

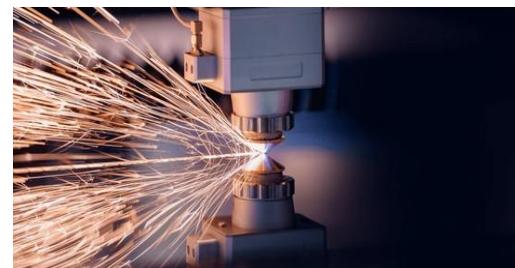
Pendekatan ini menghitung pendapatan nasional berdasarkan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam suatu perekonomian. Berikut adalah lima komponen utama yang digunakan dalam perhitungan pendapatan nasional berdasarkan pendekatan ini:

- ▷ Kompensasi untuk Pekerja (*Compensation of Employees*)
- ▷ Keuntungan Perusahaan (*Corporate Profits*)
- ▷ Pendapatan Usaha Perseorangan (*Proprietors' Income*)
- ▷ Pendapatan Sewa (*Rental Income*)
- ▷ Bunga Neto (*Net Interest*)

b. Berdasarkan Pendekatan Produksi (*Production Approach*)

Pendapatan nasional dapat diukur berdasarkan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi dalam suatu negara. Badan Pusat Statistik (BPS) mengelompokkan perekonomian Indonesia ke dalam 17 sektor utama, yang mencerminkan struktur produksi dan kontribusi setiap sektor terhadap perekonomian nasional.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian, pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan limbah, sampah dan daur ulang, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, pariwisata, jasa keuangan dan asuransi, real estat, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya mencakup berbagai layanan yang tidak masuk dalam kategori sebelumnya, seperti hiburan, reparasi barang pribadi, dan layanan rumah tangga.



Sektor pengolahan / fabrikasi masih mendominasi kegiatan perekonomian di Indonesia - shutterstock.com.2475387515

Dengan adanya 17 sektor utama ini, pemerintah dapat menganalisis kontribusi masing-masing sektor terhadap perekonomian nasional serta menyusun strategi pembangunan yang lebih efektif. Pemahaman terhadap struktur produksi ini juga memungkinkan adanya kebijakan yang lebih terarah untuk meningkatkan daya saing ekonomi serta mengurangi ketimpangan antar sektor.

c. Berdasarkan Pendekatan Pengeluaran (Expenditure Approach)

Pendekatan pengeluaran menghitung pendapatan nasional berdasarkan jumlah total pengeluaran dalam perekonomian. Komponen utama dalam pendekatan ini adalah:

- ▷ **Konsumsi Rumah Tangga (Household Consumption)**, yakni pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga untuk barang dan jasa, seperti makanan, pakaian, perumahan, dan transportasi.
- ▷ **Investasi Domestik Bruto (Gross Domestic Investment)**, yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk pembelian barang modal, seperti mesin, peralatan, dan infrastruktur.
- ▷ **Belanja Pemerintah (Government Spending)**, yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyediakan layanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pertahanan.
- ▷ **Eksport Neto (Net Exports)**, yakni selisih antara nilai eksport dan impor. Jika eksport lebih besar dari impor, maka terdapat surplus perdagangan yang meningkatkan pendapatan nasional.
- ▷ **Tabungan dan Transfer Pembayaran (Savings and Transfers)**, yaitu termasuk tabungan rumah tangga, transfer pembayaran seperti subsidi, dana pensiun, serta hibah.

Teknik Penghitungan Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan. Dalam perhitungannya, penting untuk menghindari *double counting*, yaitu perhitungan ganda yang dapat menyebabkan nilai pendapatan nasional menjadi lebih besar dari yang sebenarnya.

Double counting terjadi ketika suatu barang dihitung lebih dari sekali dalam tahapan produksi, misalnya dalam industri roti: jika kita menjumlahkan nilai tepung, adonan, dan roti jadi secara terpisah, maka terjadi perhitungan ganda. Oleh karena itu, pendekatan nilai tambah digunakan untuk memastikan setiap tahapan produksi hanya dihitung kontribusinya terhadap nilai akhir barang atau jasa.

a. Pendekatan Pendapatan (Income Approach)

Pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan semua pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam suatu perekonomian. Komponen utama dalam pendekatan ini meliputi:

- ▷ **Compensation for Employees (Kompensasi untuk Pekerja)** merupakan gaji, upah, dan tunjangan yang diterima pekerja dari perusahaan sebagai balas jasa atas tenaga yang diberikan.
- ▷ **Corporate Profits (Keuntungan Perusahaan)** yaitu keuntungan yang diperoleh perusahaan setelah dikurangi semua biaya operasional, termasuk pajak perusahaan.
- ▷ **Sole Proprietor's Income (Pendapatan Usaha Perorangan)** yakni pendapatan yang diperoleh oleh pemilik usaha kecil atau wiraswasta yang tidak berbadan hukum.
- ▷ **Rental Income of Persons (Pendapatan Sewa Perorangan)** yaitu pendapatan yang diperoleh individu atau badan usaha dari penyewaan aset seperti tanah, bangunan, atau kendaraan.
- ▷ **Net Interest (Bunga Neto)** adalah pendapatan bunga yang diterima oleh individu atau perusahaan setelah dikurangi bunga yang harus dibayarkan kepada pihak lain.

Pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pendapatan dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$Y = w + r + i + p$$

Dimana:

Y = National Income (Pendapatan Nasional)

r = Rental Income (Pendapatan Sewa)

w = Compensation of Employees (Kompensasi Pekerja)

i = Net Interest (Bunga Neto)

p = Corporate Profits (Keuntungan Perusahaan)

Setelah diperoleh nilai Pendapatan Nasional, kita bisa mengklasifikasikannya ke dalam dua perspektif. Pertama, *National income as factor income* yaitu pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan pendapatan yang diterima oleh faktor produksi, seperti tenaga kerja, modal, pengusaha, dan pemilik lahan. Hal ini mencerminkan distribusi pendapatan di antara pelaku ekonomi. Kedua, *national income as factor cost* yakni pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan oleh produsen untuk membayar faktor produksi. Perspektif ini lebih menekankan biaya produksi dibandingkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Dengan pendekatan ini, pendapatan nasional dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai kondisi ekonomi suatu negara.

b. Pendekatan Produksi (*Increased Value*)

Pendekatan produksi atau nilai tambah menghitung pendapatan nasional berdasarkan total nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi dalam proses produksi. Nilai tambah adalah selisih antara nilai output (barang dan jasa yang dihasilkan) dan nilai input antara (barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi). Pendekatan ini menekankan kontribusi masing-masing sektor terhadap perekonomian nasional.

Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung Produk Domestik Bruto (PDB) menggunakan dua jenis harga yaitu, Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). ADHB mencerminkan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam suatu periode berdasarkan harga yang berlaku pada periode tersebut. Sementara itu, ADHK mengukur nilai tambah dengan menggunakan harga tetap pada tahun dasar tertentu, sehingga memungkinkan analisis pertumbuhan ekonomi tanpa terpengaruh oleh perubahan harga atau inflasi.

Nilai tambah merupakan indikator penting dalam mengukur kontribusi sektor atau industri terhadap perekonomian. Secara matematis, nilai tambah dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Nilai Tambah Bruto} = \text{Output} - \text{Input Antara}$$

$$\text{Output} = \text{Produksi} \times \text{Harga}$$

Dengan pendekatan produksi, PDB dapat dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi:

$$\text{PDB} = \sum \text{Nilai Tambah Bruto} + \text{Pajak atas produk} - \text{Subsidi atas produk}$$

*Pajak atas produk adalah pajak yang dibayar per unit barang atau jasa. Pajak ini dapat berupa uang per kuantitas barang atau jasa, atau pajak yang nilainya dihitung sebagai persentase dari harga per unit atau total nilai barang dan jasa yang ditransaksikan.

**Subsidi atas produk adalah subsidi yang dibayar per unit barang atau jasa. Subsidi ini dapat berupa nilai spesifik atau persentase nilai barang dan jasa yang dihasilkan atau selisih antara harga tertentu dan harga pasar aktual yang dibayar pembeli.

Berikut ini diilustrasikan contoh sederhana perhitungan nilai tambah dalam industri pembuatan susu kedelai. Diketahui unsur input dalam industri pembuatan susu kedelai terdiri dari kedelai senilai Rp2.000.000, gula senilai Rp500.000 dan bahan tambahan lainnya senilai Rp300.000. Adapun outputnya yakni penjualan susu kedelai tercatat sejumlah Rp4.000.000. Berikut ini perhitungan nilai tambah:

$$\text{Nilai Tambah} = \text{Rp}4.000.000 - (\text{Rp}2.000.000 - \text{Rp}500.000 - \text{Rp}300.000)$$

$$\text{Nilai Tambah} = \text{Rp}4.000.000 - \text{Rp}2.800.000$$

$$\text{Nilai Tambah} = \text{Rp}1.200.000$$

Diilustrasikan setelahnya terdapat pajak atas produk sebesar Rp100.000 dan subsidi atas produk sebesar Rp50.000. Maka, perhitungan PDB adalah:

$$\begin{aligned} PDB &= Rp1.200.000 - Rp100.000 - Rp50.000 \\ PDB &= Rp1.250.000 \end{aligned}$$

Berikut adalah data PDB Indonesia tahun 2021 menurut lapangan usaha berdasarkan atas dasar harga berlaku (ADHB), dikelompokkan berdasarkan lapangan usaha dan dideskripsikan dalam nilai tambah:

No	Lapangan Usaha	Nilai Tambah (Rp)
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	2.253.836,80
2	Pertambangan dan penggalian	1.523.650,10
3	Industri pengolahan	3.266.903,50
4	Pengadaan listrik dan gas	190.047,20
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	12.024,90
6	Konstruksi	1.771.726,70
7	Perdagangan besar dan eceran	2.200.528,90
8	Transportasi dan pergudangan	719.632,60
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	412.260,60
10	Informasi dan komunikasi	748.754,70
11	Jasa keuangan dan asuransi	736.188,80
12	Real estat	468.221,70
13	Jasa perusahaan	301.085,20
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	584.361,00
15	Jasa pendidikan	556.317,80
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	226.970,80
17	Jasa lainnya	312.179,50
Nilai tambah produk		16.284.690,80
Pajak dikurangi subsidi produk		686.098,40
Produk domestik bruto		16.970.789,20

Data di atas bersumber dari bps.go.id

Jika diperhatikan, dua sektor pertama yang disajikan pada tabel adalah sektor primer. Selanjutnya sektor ke-3 sampai sektor ke-6 disebut sektor sekunder. Adapun sektor-sektor setelahnya merupakan sektor tersier. Jika dikalkulasi secara detail, sektor primer menyumbang 22,26 persen dari total PDB Indonesia pada tahun 2021. Adapun sektor yang paling banyak berkontribusi terhadap total PDB Indonesia tahun 2021 ialah sektor pengolahan yang menyumbang 19,25 persen dari total PDB. Menegaskan bahwa sektor pengolahan menjadi lapangan usaha terpenting dalam perekonomian Indonesia pada tahun 2021.

c. Pendekatan Belanja dalam Perhitungan Pendapatan Nasional

Pendekatan belanja atau expenditure approach menghitung pendapatan nasional dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai pelaku ekonomi dalam suatu negara. Negara maju sangat mengandalkan pendekatan ini karena ekonomi mereka cenderung berbasis konsumsi dan investasi, sehingga perhitungan pengeluaran agregat menjadi indikator utama dalam memahami pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makroekonomi. Dengan pendekatan ini, dapat dianalisis bagaimana distribusi konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi sektor swasta, serta perdagangan internasional memengaruhi kesejahteraan ekonomi suatu negara.

Pendekatan belanja mencakup empat komponen utama, yaitu:

▷ **Konsumsi Rumah Tangga sebagai Penggerak Ekonomi**



Mobil untuk kebutuhan bersama keluarga termasuk produk konsumsi rumah tangga - shutterstock.com.2235487265

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencerminkan jumlah total belanja yang dilakukan oleh individu dan keluarga untuk berbagai kebutuhan, seperti makanan, pakaian, transportasi, perumahan, serta hiburan. Konsumsi rumah tangga memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi, karena semakin tinggi daya beli masyarakat, semakin tinggi pula permintaan terhadap barang dan jasa, yang akhirnya mendorong produksi dan penciptaan lapangan kerja.

Dalam banyak negara berkembang maupun maju, konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar dalam PDB, sering kali menyumbang lebih dari 50% dari total pendapatan nasional. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi sering kali difokuskan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, misalnya melalui subsidi, insentif pajak, atau kebijakan suku bunga rendah agar kredit konsumsi lebih mudah diakses.

▷ **Peran Strategis Pengeluaran Pemerintah dalam Ekonomi**

Belanja pemerintah mencakup seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh negara untuk menjalankan administrasi pemerintahan, menyediakan layanan publik, serta membangun infrastruktur. Dalam konteks ekonomi makro, pengeluaran pemerintah berperan sebagai alat stabilisasi ekonomi, karena dapat digunakan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi ketika sektor swasta melemah atau mengalami kontraksi. Terdapat dua kategori utama dalam pengeluaran pemerintah yaitu pengeluaran konsumsi dan pengeluaran investasi.

Pengeluaran konsumsi pemerintah ialah pengeluaran untuk layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan nasional. Sementara, pengeluaran investasi pemerintah adalah pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, serta fasilitas umum lainnya yang dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dalam jangka panjang.

Di banyak negara, belanja pemerintah yang berlebihan dapat menyebabkan defisit anggaran, namun di sisi lain, belanja yang tepat sasaran dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Oleh karena itu, keseimbangan antara belanja pemerintah dan pendapatan pajak menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas fiskal suatu negara.

▷ **Investasi Swasta sebagai Motor Pertumbuhan Ekonomi**

Investasi sektor swasta mencerminkan pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan dan individu untuk meningkatkan kapasitas produksi. Komponen ini meliputi belanja modal untuk mendirikan

pabrik, membeli peralatan baru, atau memperluas bisnis. Investasi swasta sangat penting karena mencerminkan kepercayaan dunia usaha terhadap prospek ekonomi suatu negara. Pengeluaran modal dalam investasi sektor swasta diklasifikasi menjadi tiga jenis utama, yaitu:

- **Investasi dalam aset tetap** berupa pembelian gedung, mesin, dan peralatan yang digunakan dalam produksi jangka panjang.
- **Investasi dalam stok atau persediaan** berupa pengeluaran untuk menambah stok bahan baku dan barang setengah jadi.
- **Investasi dalam modal finansial** yakni investasi dalam bentuk saham dan obligasi sebagai bentuk ekspansi bisnis.

▷ **Eksport Neto sebagai Penentu Neraca Perdagangan**



Peremajaan mesin pabrik termasuk investasi dalam aset tetap - istock.com.

Eksport neto dihitung dengan mengurangkan nilai impor dari nilai eksport suatu negara. Eksport mencerminkan barang dan jasa yang dijual ke luar negeri, sementara impor adalah barang dan jasa yang dibeli dari luar negeri. Jika nilai eksport lebih besar dari impor, maka negara tersebut mengalami surplus perdagangan, yang meningkatkan PDB. Sebaliknya, jika impor lebih besar dari eksport, maka terjadi defisit perdagangan, yang dapat mengurangi pendapatan nasional.

Dalam perhitungan pendapatan nasional, nilai impor tidak dimasukkan karena bukan bagian dari output domestik, melainkan output dari negara lain. Oleh karena itu, dalam rumus PDB dengan pendekatan pengeluaran, eksport neto dihitung sebagai:

$$Y = C + G + I + (X - M)$$

Dimana:

Y = Produk Domestik Bruto (PDB)

C = Konsumsi Rumah Tangga

G = Pengeluaran Pemerintah

I = Investasi Sektor Swasta

X = Eksport

M = Impor

d. Simulasi Perhitungan Pendapatan Nasional

Berikut adalah tabel ilustrasi perhitungan pendapatan nasional dalam industri otomotif. Perhitungan ini dilakukan menggunakan tiga pendekatan: Produksi, Pengeluaran, dan Pendapatan, dengan hasil akhir yang sama.

Pada ilustrasi di bawah ini, diketahui bahwa produsen baja memproduksi baja senilai Rp65 juta, Rp15 juta dijual kepada produsen mesin dan Rp50 juta dijual kepada produsen mobil. Dalam memproduksi baja, nilai tambah yang dihasilkan adalah sama dengan nilai baja tersebut, yaitu Rp65 juta, jumlah inilah yang dicantumkan pada kolom pendekatan produksi (5) di baris 1 dan 2, juga dicantumkan di kolom pendekatan pendapatan (7) karena akhirnya uang tersebut mengalir ke rumah tangga dan produsen.

Tabel Ilustrasi Penghitungan Pendapatan Nasional dalam Industri Otomotif

Produk (1)	Penjual (2)	Pembeli (3)	Harga Barang (4)	Pendekatan Produksi (5)	Pendekatan Pengeluaran (6)	Pendekatan Pendapatan (7)
Baja	Produsen baja	Produsen mesin	Rp15 juta	Rp15 juta	-	Rp15 juta
Baja	Produsen baja	Produsen mobil	Rp50 juta	Rp50 juta	-	Rp50 juta
Mesin	Produsen mesin	Produsen mobil	Rp30 juta	Rp15 juta	Rp30 juta	Rp15 juta
Ban	Produsen ban	Produsen mobil	Rp10 juta	Rp10 juta	-	Rp10 juta
Mobil	Produsen mobil	Rumah tangga	Rp120 juta	Rp60 juta	Rp120 juta	Rp60 juta
Total harga barang (nilai transaksi)			Rp225 juta			
Pendapatan nasional				Rp150 juta	Rp150 juta	Rp150 juta

Selanjutnya, jika diperhatikan pada kolom pendekatan pengeluaran (6) masih kosong. Hal tersebut disebabkan karena baja yang diproduksi dibeli oleh rumah tangga produksi (produk antara). Sebagaimana teori pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan pengeluaran untuk pembelian produk akhir.

Adapun jika kita perhatikan baris dimana produsen mesin menjual produksi kepada produsen mobil. Nilai jual mesin tersebut adalah Rp30 juta. Jika nilai jual dikurang dengan nilai pembelian bahan baja yang senilai Rp15 juta, maka didapat nilai tambahnya adalah Rp15 juta. Nilai tambah yang didapatkan akan mengalir ke setiap rumah tangga para pekerja dalam bentuk upah dan gaji, sehingga dituliskan di kolom pendekatan produksi (5) dan pendekatan pendapatan (7).

Mesin yang dibeli oleh produsen mobil hanya akan digunakan dan bukan diolah kembali, sehingga mesin dikategorikan sebagai produk akhir. Oleh karena itu, pengeluaran Rp30 juta untuk mesin dicatat di baris ketiga pada kolom pendekatan pengeluaran (6). Sementara itu, ban dikategorikan sebagai produk antara karena akan kembali diolah menjadi produk akhir yang nantinya akan dijual kembali. Sehingga, pada baris produk ban, dicantumkan di kolom pendekatan produksi (5) dan kolom pendekatan pendapatan (7). Di sisi lain, pendekatan pengeluaran (6) dikosongkan karena ban merupakan produk antara.

Akhirnya, jika dikalkulasi, nilai tambah pada produksi mobil adalah Rp60 juta, dimana harga jual Rp120 juta dikurangi biaya pembelian baja Rp50 juta dan ban Rp10 juta. Berikutnya, nilai tambah tersebut akan dialirkan ke rumah tangga dalam bentuk upah dan gaji para pekerja. Sehingga, pada kolom pendekatan pendapatan (7) dicantumkan senilai Rp60 juta.

Jika pendapatan nasional diambil dari jumlah kalkulasi keseluruhan transaksi, maka terjadi surplus pendapatan nasional sebesar Rp75 juta (Rp225 juta - Rp150 juta). Hal tersebut terjadi karena adanya *double conting* (penghitungan ganda) dalam perekonomian. Dimana nilai baja (Rp50 juta) dan nilai ban (Rp10 juta) kembali dikalkulasi, padahal sudah *include* dalam penghitungan biaya dasar produksi mobil oleh produsen mobil senilai Rp60 juta.

Pendapatan per Kapita

Pendapatan per kapita adalah indikator ekonomi yang menggambarkan rata-rata pendapatan yang diperoleh per individu dalam suatu negara dalam periode tertentu. Meskipun sering digunakan untuk menilai kesejahteraan ekonomi, indikator ini memiliki keterbatasan, terutama dalam mencerminkan distribusi pendapatan yang sebenarnya.

Misalnya, terdapat dua negara, Negara A dan Negara B, masing-masing dengan PDB sebesar \$1.000.000. Jika Negara A memiliki populasi 1.000 orang, maka pendapatan per kapitanya adalah \$1.000. Sebaliknya, jika Negara B memiliki populasi 100 orang, pendapatan per kapitanya adalah \$10.000. Meskipun Negara B memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi, hal ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa semua warganya lebih sejahtera dibandingkan warga Negara A, terutama jika terdapat ketimpangan pendapatan yang signifikan di Negara B. Penting untuk memahami bahwa pendapatan per kapita hanya memberikan gambaran rata-rata dan tidak mencerminkan distribusi pendapatan di dalam masyarakat.

a. Definisi dan Manfaat Pendapatan per Kapita

▷ Definisi Pendapatan per Kapita

Pendapatan per kapita adalah hasil pembagian produk domestik bruto (PDB) suatu negara dengan jumlah penduduknya. Secara matematis, rumusnya adalah:

$$\text{Pendapatan per kapita} = \frac{\text{pendapatan domestik bruto (PDB)}}{\text{jumlah penduduk}}$$

▷ Manfaat Penghitungan Pendapatan per Kapita

- Membandingkan tingkat kemakmuran antar periode dengan cara membandingkan pendapatan per kapita dari waktu ke waktu. Misalnya, data BPS menunjukkan bahwa pendapatan per kapita Indonesia meningkat dari Rp56 juta pada tahun 2018 menjadi Rp62 juta pada tahun 2022, mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang positif.
- Membandingkan tingkat kesejahteraan antar negara. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2021, pendapatan per kapita Indonesia adalah \$4.291, sedangkan Malaysia mencapai \$11.371 dan Singapura \$72.794. Perbedaan ini menunjukkan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi di Malaysia dan Singapura dibandingkan Indonesia.
- Sebagai pembanding standar hidup dan kualitas hidup antar negara. Negara dengan pendapatan per kapita tinggi cenderung memiliki akses yang lebih baik ke layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
- Sebagai data untuk pengambilan kebijakan ekonomi. Pemerintah menggunakan data pendapatan per kapita untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat, seperti penetapan upah minimum, pajak, dan program kesejahteraan sosial.

b. Hubungan Antara Pendapatan Nasional, Populasi, dan Pendapatan per Kapita

Pendapatan per kapita dipengaruhi oleh total pendapatan nasional dan jumlah penduduk. Jika pendapatan nasional meningkat lebih cepat daripada pertumbuhan penduduk, pendapatan per kapita akan naik, menunjukkan peningkatan kesejahteraan. Sebaliknya, jika pertumbuhan penduduk lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dapat menurun. Sebagai deskripsi tambahan, dapat dilihat tabel berikut:

Tabel Pendapatan per Kapita Beberapa Negara pada Tahun 2021

Negara	PDB per Tahun (miliar US\$)	Jumlah Penduduk	Pendapatan per Kapita (US\$)
Tiongkok	19,91	1.412 miliar	14.100
India	8,91	1.366 miliar	6.500
Korea Selatan	2,00	51 juta	39.200
Indonesia	3,30	273 juta	12.100
Arab Saudi	2,37	35 juta	67.700

(Diolah dari databank.worldbank.org dan bps.go.id)

c. Perbandingan Pendapatan per Kapita

Pendapatan per kapita adalah indikator penting yang digunakan untuk mengukur rata-rata pendapatan yang diperoleh per individu dalam suatu negara dalam periode tertentu. Indikator ini sering digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi dan standar hidup suatu negara. Namun, penting untuk diingat bahwa pendapatan per kapita adalah rata-rata dan mungkin tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang sebenarnya di dalam masyarakat. Berikut adalah tabel yang menunjukkan pendapatan per kapita nominal (dalam dolar AS) dari negara-negara anggota ASEAN berdasarkan data tahun 2022:

Tabel Perbandingan Pendapatan per Kapita Indonesia dengan Negara-Negara di ASEAN

ASEAN	PDB per Kapita (US\$)	ASEAN	Pendapatan per Kapita (US\$)
Brunei	37,667	Singapura	82,807
Malaysia	12,364	Thailand	7,650
Indonesia	4,798	Filipina	3,623
Vietnam	4,086	Laos	1,784
Kamboja	1,228	Myanmar	1,053

(Diolah dari databank.worldbank.org dan bps.go.id)

Pada proses analisisnya, Bank Dunia (World Bank) mengklasifikasi pendapatan per kapita negara-negara di dunia dalam empat kelompok, yaitu:

- ▷ **Negara dengan Pendapatan Tinggi (High Income).** Kategori ini mencakup pendapatan per kapita lebih dari \$4.798. Contohnya Singapura dan Brunei yang memiliki pendapatan per kapita yang jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Hal ini mencerminkan tingkat kemakmuran dan standar hidup yang tinggi di kedua negara tersebut.
- ▷ **Negara dengan Pendapatan Menengah (Upper Middle Income).** Kategori ini mencakup pendapatan per kapita antara \$4.096 hingga \$12.695. Tercatat bahwa Malaysia dan Thailand berada dalam kategori pendapatan menengah atas, dengan pendapatan per kapita masing-masing sekitar \$12.364 dan \$7.650. Kedua negara ini menunjukkan perkembangan ekonomi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir.
- ▷ **Negara dengan Pendapatan Menengah Bawah (Lower Middle Income).** Kategori ini mencakup pendapatan per kapita antara \$1.046 hingga \$4.095, dimana Indonesia, Filipina, dan Vietnam memiliki pendapatan per kapita antara \$3.623 hingga \$4.798. Meskipun berada dalam kategori

ini, ketiga negara tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan potensi untuk naik ke kategori pendapatan yang lebih tinggi.

- ▷ **Negara dengan Pendapatan Rendah (Low Income).** Kategori ini mencakup pendapatan per kapita yang kurang dari \$1.045, seperti Laos, Kamboja, dan Myanmar memiliki pendapatan per kapita di bawah \$2.000, mencerminkan tantangan ekonomi yang masih dihadapi oleh negara-negara tersebut.

Dengan pendapatan per kapita sekitar \$4.798 pada tahun 2022, Indonesia termasuk dalam kategori negara berpendapatan menengah atas (*upper middle income*). Ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mencapai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan beberapa dekade sebelumnya, namun masih memiliki ruang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan standar hidup masyarakatnya. Meskipun pendapatan per kapita memberikan gambaran umum tentang kesejahteraan ekonomi suatu negara, indikator ini tidak mencerminkan distribusi pendapatan di dalam negara tersebut.

Contoh Soal

Jelaskan mengapa Pendapatan Nasional sering digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara, namun tidak selalu mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan!

Pembahasan:

Pendapatan nasional merupakan ukuran total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Indikator ini sering digunakan untuk menilai pertumbuhan ekonomi karena mencerminkan kapasitas produksi dan aktivitas ekonomi suatu negara. Namun, pendapatan nasional tidak selalu mencerminkan kesejahteraan masyarakat karena:

- 1) Distribusi pendapatan tidak merata, dimana sebagian besar kekayaan mungkin terkonsentrasi pada kelompok kecil masyarakat, sementara sebagian besar penduduk tetap hidup dalam kemiskinan.
- 2) Tidak memperhitungkan daya beli masyarakat, dimana pendapatan nasional yang tinggi tidak selalu berarti masyarakat memiliki daya beli yang baik, terutama jika terjadi inflasi yang tinggi.
- 3) Tidak mencerminkan kualitas hidup, dimana faktor seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan tidak diperhitungkan dalam perhitungan pendapatan nasional, padahal sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan.

Fakta Unik Seputar Ekonomi

1% Orang Terkaya Menguasai Lebih dari 50% Kekayaan di Indonesia

Menurut laporan Oxfam dan Bank Dunia, 1% penduduk terkaya di Indonesia menguasai lebih dari 50% total kekayaan nasional, sementara 40% penduduk terbawah hanya memiliki sekitar 10% dari total pendapatan nasional. Menariknya, jurang ketimpangan ini menjadi salah satu yang tertinggi di dunia dan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia belum sepenuhnya inklusif, karena keuntungan ekonomi masih terkonsentrasi di kelompok tertentu



James Riadi, salah satu orang terkaya di Indonesia
- [wikimedia.com](https://commons.wikimedia.org).



2. Distribusi Pendapatan Nasional

Kesenjangan Ekonomi

a. Esensi Kesenjangan Ekonomi

Kesenjangan ekonomi merujuk pada ketidakseimbangan distribusi pendapatan dan kekayaan di antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Fenomena ini mencerminkan perbedaan signifikan dalam akses terhadap sumber daya ekonomi, yang dapat mengakibatkan perbedaan kualitas hidup. Menurut **Joseph Stiglitz**, seorang ekonom peraih Nobel, kesenjangan ekonomi yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan merusak tatanan sosial.

Di Indonesia, kesenjangan ekonomi terlihat jelas antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok sosial yang berbeda. Peningkatan kesenjangan ekonomi sering kali menyebabkan berbagai masalah sosial, termasuk meningkatnya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas.

Kesenjangan ekonomi juga dapat diukur menggunakan koefisien gini, yang mencerminkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu negara. Semakin tinggi koefisien Gini, semakin besar ketimpangan yang terjadi. Di Indonesia, koefisien gini sempat mencapai 0,41 pada tahun 2021, menunjukkan tingkat ketimpangan yang cukup tinggi.

Perbedaan kesenjangan ekonomi antara negara kaya dan miskin juga mencolok. Negara-negara maju cenderung memiliki sistem distribusi pendapatan yang lebih merata dibandingkan negara berkembang. Namun, beberapa negara maju juga menghadapi peningkatan kesenjangan akibat kebijakan ekonomi yang tidak merata dan akses terbatas ke pendidikan serta peluang ekonomi bagi kelompok tertentu.

b. Faktor-Faktor Penyebab Kesenjangan Ekonomi

▷ Kondisi Demografi

Demografi terkait dengan kependudukan. Kondisi demografi meliputi beberapa aspek, diantaranya:

- Jumlah penduduk: Kepadatan penduduk yang tinggi di suatu wilayah dapat menyebabkan persaingan ketat dalam memperoleh pekerjaan dan sumber daya, yang berpotensi meningkatkan kesenjangan ekonomi.
- Komposisi penduduk: Struktur usia, tingkat pendidikan, dan keterampilan penduduk memengaruhi kemampuan mereka dalam mengakses peluang ekonomi. Misalnya, populasi dengan proporsi usia produktif yang tinggi cenderung memiliki potensi ekonomi lebih besar.
- Persebaran penduduk: Ketidakmerataan persebaran penduduk antara perkotaan dan pedesaan dapat menyebabkan perbedaan akses terhadap infrastruktur, pendidikan, dan peluang kerja, yang berkontribusi pada kesenjangan ekonomi.

▷ Kondisi Pendidikan

Akses dan kualitas pendidikan yang tidak merata menyebabkan perbedaan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja. Individu dengan pendidikan rendah cenderung memiliki peluang kerja dan pendapatan yang lebih terbatas, sehingga memperlebar kesenjangan ekonomi.

▷ Kondisi Ekonomi

Ketidakmerataan pembangunan ekonomi antarwilayah, seperti perbedaan infrastruktur dan investasi, dapat menyebabkan kesenjangan dalam kesempatan kerja dan pendapatan. Wilayah yang kurang berkembang sering kali tertinggal dalam pertumbuhan ekonomi.

▷ **Kondisi Kesehatan**

Akses terhadap layanan dan fasilitas kesehatan yang tidak merata dapat memengaruhi produktivitas tenaga kerja. Masyarakat dengan akses kesehatan yang buruk cenderung memiliki kualitas hidup dan kemampuan kerja yang lebih rendah, yang berdampak pada pendapatan mereka.

▷ **Kondisi Infrastruktur**

Ketersediaan dan kualitas infrastruktur, seperti transportasi dan komunikasi, memengaruhi akses masyarakat terhadap pasar dan peluang ekonomi. Wilayah dengan infrastruktur yang buruk cenderung terisolasi dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang lambat.

▷ **Kondisi Lapangan Kerja**

Keterbatasan lapangan kerja yang layak dan pengangguran yang tinggi dapat meningkatkan kesenjangan ekonomi. Kurangnya kesempatan kerja menyebabkan pendapatan yang tidak merata dan meningkatkan angka kemiskinan.



Fasilitas kesehatan yang baik mempengaruhi kualitas hidup masyarakat -
shutterstock.com.2414873815

Signifikansi Distribusi Pendapatan Nasional dalam Pembangunan Ekonomi

Distribusi pendapatan nasional yang merata sangat penting bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Jika pendapatan terkonsentrasi hanya pada kelompok tertentu, maka daya beli masyarakat secara keseluruhan akan rendah, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, ketika pendapatan didistribusikan secara lebih merata, masyarakat memiliki daya beli yang lebih baik, sehingga permintaan terhadap barang dan jasa meningkat. Hal ini akan mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan produktivitas ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, distribusi pendapatan yang adil juga mengurangi risiko ketimpangan sosial, yang sering kali menjadi pemicu ketidakstabilan ekonomi dan politik dalam suatu negara.

Dalam konteks pembangunan jangka panjang, distribusi pendapatan yang lebih merata memungkinkan investasi yang lebih besar dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Negara-negara dengan distribusi pendapatan yang lebih adil cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Sebagai contoh, negara-negara Skandinavia seperti Norwegia dan Swedia memiliki kebijakan redistribusi yang efektif, yang berkontribusi terhadap tingkat kesejahteraan yang tinggi dan stabilitas ekonomi. Sebaliknya, negara-negara dengan tingkat ketimpangan yang tinggi

sering kali menghadapi stagnasi ekonomi akibat terbatasnya akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi bagi sebagian besar penduduknya. Oleh karena itu, distribusi pendapatan yang seimbang menjadi faktor kunci dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Menilai Ketimpangan dalam Distribusi Pendapatan Nasional

Ketimpangan dalam distribusi pendapatan nasional dapat dianalisis dengan berbagai metode statistik dan ekonomi. Salah satu alat yang umum digunakan adalah Kurva Lorenz, yang menggambarkan sejauh mana distribusi pendapatan dalam suatu negara menyimpang dari distribusi yang sempurna (merata). Semakin melengkung kurva ini, semakin besar ketimpangan distribusi pendapatan.

Selain itu, ketimpangan juga dapat diukur menggunakan Koefisien gini, sebuah indeks yang menunjukkan ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan. Nilai koefisien berkisar antara 0 hingga 1, di mana 0 menunjukkan distribusi yang sepenuhnya merata, sementara 1 mencerminkan ketimpangan yang ekstrem. Negara dengan tingkat koefisien Gini tinggi sering kali mengalami masalah sosial dan ekonomi, seperti meningkatnya angka kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap pendidikan serta layanan kesehatan.

a. Distribusi Pendapatan Perorangan atau Distribusi Ukuran Pendapatan

Distribusi pendapatan perorangan, juga dikenal sebagai *size distribution of income*, mengacu pada bagaimana pendapatan didistribusikan di antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Pendekatan ini hanya melihat bagaimana kekayaan tersebar di seluruh populasi.

Misalnya, dalam ekonomi suatu negara berkembang, sering kali 10% populasi terkaya menguasai lebih dari 50% total pendapatan, sementara kelompok masyarakat termiskin mendapatkan bagian yang sangat kecil. Ketimpangan seperti ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan memicu kesenjangan sosial yang lebih dalam.

Untuk memahami distribusi pendapatan, para ekonom seperti Michael Todaro dan Stephen Smith (2013) sering menggunakan pendapatan hipotesis atau rekaan untuk mengilustrasikan bagaimana pendapatan dialokasikan di antara kelompok-kelompok masyarakat berdasarkan kuintil dan desil. Model ini membantu dalam mengidentifikasi pola distribusi pendapatan di negara berkembang dan menjadi dasar dalam analisis ketimpangan ekonomi. Berikut adalah contoh tabel distribusi pendapatan individu berdasarkan pangsa pendapatan di negara berkembang:

Tabel Distribusi Pendapatan Individu dalam Hipotesis Todar dan Smith (2013)

Kelompok Pendapatan	Pangsa Pendapatan (%)
10% termiskin	2%
20% penduduk termiskin	5%
40% penduduk menengah	20%
20% penduduk terkaya	35%
10% penduduk terkaya	38%

Pada tabel data hipotesis berdasarkan model Todaro dan Smith (2013) tersebut, dapat dilihat bahwa kelompok 10% penduduk terkaya memperoleh hampir 38% dari total pendapatan, sementara 20% kelompok termiskin hanya mendapatkan 5% dari total pendapatan nasional. Hal ini mencerminkan ketimpangan yang signifikan dalam distribusi pendapatan, yang merupakan karakteristik umum di negara berkembang. Jika pola distribusi ini tidak dikendalikan melalui kebijakan yang tepat, ketimpangan dapat semakin meningkat dan menyebabkan stagnasi sosial serta ekonomi.

Dalam konteks kebijakan ekonomi, distribusi yang tidak merata dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif, di mana hanya kelompok kaya yang menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi, sementara kelompok berpenghasilan rendah tetap tertinggal. Oleh karena itu, redistribusi pendapatan melalui kebijakan seperti subsidi, pajak progresif, dan investasi dalam sektor pendidikan serta kesehatan menjadi sangat penting untuk mengurangi ketimpangan dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera.

Salah satu alat yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan adalah **Rasio Kuznets**, yang menghitung rasio pendapatan antara kelompok kaya dan kelompok miskin dalam suatu negara. Rasio ini umumnya dibandingkan antara 20% penduduk terkaya dan 20% penduduk termiskin untuk melihat seberapa besar kesenjangan pendapatan di suatu ekonomi. Berdasarkan tabel sebelumnya, dapat dihitung rasio Kuznets sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kuznets} = \frac{\text{Pendapatan 20% terkaya}}{\text{Pendapatan 20% termiskin}}$$

$$\text{Rasio Kuznets} = \frac{35}{5} = 7$$

Nilai 7 menunjukkan bahwa 20% populasi terkaya memiliki pendapatan 7 kali lebih besar dibandingkan dengan 20% populasi termiskin. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar ketimpangan yang terjadi dalam suatu negara.

Analisis rasio Kuznets ini dapat digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan ekonomi yang diterapkan dalam suatu negara. Di negara dengan kebijakan redistribusi yang baik, seperti negara-negara Skandinavia, rasio ini cenderung lebih rendah, sementara di negara berkembang yang memiliki sistem ekonomi yang kurang inklusif, rasio ini bisa sangat tinggi. Dengan memahami dan memantau rasio Kuznets secara berkala, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, misalnya dengan meningkatkan akses terhadap pendidikan, dan menciptakan lebih banyak peluang kerja.

b. Distribusi Pendapatan dengan Kurva Lorenz

Kurva Lorenz adalah alat visual yang digunakan untuk menggambarkan distribusi pendapatan dalam suatu masyarakat. Kurva ini membandingkan distribusi pendapatan aktual dengan distribusi yang sempurna (merata). Pada sumbu horizontal (X), terdapat persentase kumulatif populasi yang diurutkan dari yang termiskin hingga terkaya. Sementara pada sumbu vertikal (Y), terdapat persentase kumulatif pendapatan yang diperoleh populasi tersebut. Jika distribusi pendapatan sempurna, maka kurva akan membentuk garis lurus diagonal 45° dari titik $(0,0)$ ke $(1,1)$, yang disebut sebagai garis kesempurnaan distribusi. Namun, dalam kenyataannya, kurva Lorenz selalu berada di bawah garis 45° karena pendapatan tidak pernah terdistribusi secara merata.

Fakta Unik Seputar Ekonomi

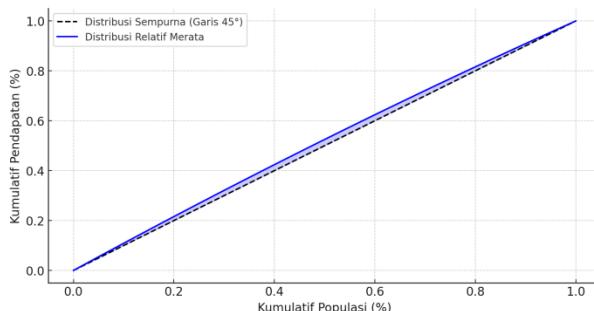
Koefisien Gini di Indonesia Sebesar 0,41

Pada tahun 2013, Indonesia mencatat Koefisien Gini sebesar 0,41, yang menunjukkan kesenjangan ekonomi cukup tinggi. Namun, melalui berbagai program pemerintah seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Dana Desa, angka ini berhasil diturunkan menjadi 0,38 pada tahun 2021. Namun demikian, meski mengalami perbaikan, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam pemerataan pendapatan, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan.

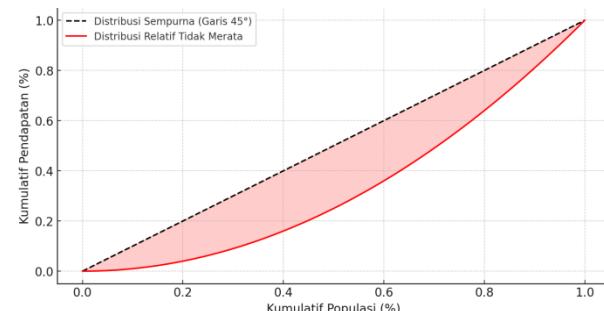


Fenomena 'inequality' - shutterstock.com. 654727156

Berikut adalah dua ilustrasi Kurva Lorenz yang menggambarkan dua kondisi distribusi pendapatan yang berbeda:



Kurva Lorenz Distribusi Cukup Merata - diolah sendiri



Kurva Lorenz Distribusi Relatif tidak Merata - diolah sendiri

Pada kondisi distribusi relatif merata, kurva Lorenz hanya sedikit melengkung dari garis diagonal 45° , menunjukkan bahwa distribusi pendapatan cukup merata. Masyarakat berpenghasilan rendah tetap memperoleh sebagian besar pendapatan, sehingga tingkat ketimpangannya rendah. Namun berbeda dengan kondisi distribusi relatif tidak merata, kurva Lorenz melengkung tajam jauh dari garis diagonal, menunjukkan ketimpangan yang sangat besar. Sebagian besar pendapatan terkonsentrasi di tangan segelintir orang terkaya, sementara kelompok masyarakat miskin hanya memperoleh sedikit bagian dari total pendapatan.

Kurva Lorenz memiliki prinsip utama yang dapat membantu memahami tingkat ketimpangan dalam suatu ekonomi. Diantaranya saat kurva Lorenz semakin dekat dengan Garis 45° maka distribusi semakin merata. Pada kondisi ini kurva Lorenz hampir menyerupai garis diagonal (45°), yang berarti pendapatan terdistribusi dengan baik di seluruh populasi. Kondisi ini biasanya terjadi pada negara dengan sistem pajak progresif yang efektif dan jaminan sosial yang kuat.

Sebaliknya, semakin jauh kurva Lorenz melengkung dari Garis 45° maka ketimpangan semakin besar. Jika kurva Lorenz melengkung tajam menjauhi garis diagonal, berarti hanya sebagian kecil masyarakat yang menguasai sebagian besar pendapatan. Hal ini terjadi di negara dengan ketimpangan ekonomi yang tinggi, di mana kelompok kaya mendominasi pendapatan nasional.

Dengan pemahaman ini, Kurva Lorenz menjadi alat penting dalam menilai efektivitas kebijakan ekonomi dalam mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Koefisien Gini: Mengukur Ketimpangan Pendapatan

Koefisien Gini adalah salah satu ukuran utama yang digunakan untuk menilai ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu negara. Indikator ini dikembangkan oleh **Corrado Gini** pada tahun 1912 sebagai cara untuk mengukur sejauh mana distribusi pendapatan suatu populasi menyimpang dari distribusi yang sempurna.

Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1, di mana 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang sempurna (setiap individu memiliki pendapatan yang sama), sedangkan 1 menunjukkan ketimpangan ekstrem (seluruh pendapatan hanya dimiliki oleh satu individu atau kelompok kecil saja, sementara sisanya tidak memiliki apa-apa). Semakin tinggi nilai Koefisien Gini, semakin besar ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat.

Secara umum, Koefisien Gini dapat dikategorikan pada rentang skor 0 - 0,3 kondisi distribusi relatif merata (ketimpangan rendah), 0,3 - 0,5 berada pada kondisi ketimpangan sedang, >0,5 masuk pada kondisi ketimpangan tinggi, dan >0,7 berada pada kondisi ketimpangan ekstrem.

Kebijakan ekonomi yang efektif harus diarahkan untuk menekan Koefisien Gini agar tidak mencapai tingkat yang ekstrem, dengan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu tetapi juga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pilihan Langkah Kebijakan dalam Distribusi Pendapatan

a. Pembayaran Langsung serta Penyediaan Barang dan Jasa



Program bantuan langsung tunai (BLT) diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat - shutterstock.com.2035468319

Salah satu strategi pemerintah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi adalah melalui pembayaran langsung kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Contohnya dari kebijakan ini adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan kepada keluarga miskin untuk meningkatkan daya beli mereka dan memenuhi kebutuhan dasar. Kebijakan semacam ini bertujuan untuk memberikan bantuan finansial secara langsung, sehingga dapat segera dirasakan manfaatnya oleh penerima.

Selain pembayaran langsung, pemerintah juga menyediakan barang dan jasa publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Penyediaan layanan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan

memberikan akses yang lebih merata terhadap sumber daya penting. Dengan demikian, diharapkan kesenjangan sosial dan ekonomi dapat diminimalkan.

Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada mekanisme penyaluran yang tepat sasaran dan bebas dari penyalahgunaan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan mencapai mereka yang benar-benar membutuhkan.

b. Meningkatkan Aset Kaum Miskin

Di Indonesia, ketimpangan kepemilikan aset masih menjadi masalah serius. Menurut data, sekitar 74% lahan negeri ini dikuasai oleh 0,2% penduduk saja. Konsentrasi aset yang tinggi pada sejumlah orang ini menyebabkan kesenjangan ekonomi yang signifikan dan membatasi peluang bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah menginisiasi reformasi agraria yang bertujuan mendistribusikan lahan kepada masyarakat yang tidak memiliki tanah. Kebijakan ini tidak hanya memberikan akses terhadap lahan, tetapi juga meningkatkan kapasitas produksi dan pendapatan masyarakat pedesaan. Dengan memiliki aset produktif, masyarakat miskin dapat lebih mandiri secara ekonomi dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemikiran para ekonom klasik Islam juga menekankan pentingnya distribusi aset yang adil. Abu Yusuf, misalnya, menekankan bahwa pendistribusian harta harus dilakukan secara adil dan merata, tidak menumpuk di tangan sejumlah orang saja. Dengan demikian, kebijakan yang meningkatkan kepemilikan aset bagi kaum miskin sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang telah lama diakui.

c. Penerapan Pajak Penghasilan Progresif

Pajak penghasilan progresif adalah sistem perpajakan di mana tarif pajak meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan wajib pajak. Di Indonesia, sistem ini diterapkan melalui Pajak Penghasilan (PPH) dengan tarif yang berjenjang mulai dari 5% hingga 35%, tergantung pada besarnya

penghasilan. Konsep dasar dari kebijakan ini adalah prinsip keadilan vertikal, yaitu bahwa mereka yang memiliki kemampuan finansial lebih besar harus berkontribusi lebih banyak kepada negara.

Penerapan pajak progresif bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dengan mendistribusikan kembali sebagian kekayaan dari kelompok berpenghasilan tinggi ke kelompok berpenghasilan rendah melalui berbagai program pemerintah. Namun, penting untuk memastikan bahwa tarif pajak yang diterapkan tidak terlalu tinggi sehingga tidak menurunkan insentif untuk bekerja atau berinvestasi. Oleh karena itu, penetapan tarif pajak harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan pendapatan negara dan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi.

Contoh Soal

Bagaimana Kurva Lorenz dan Koefisien Gini digunakan untuk menilai tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu negara? Jelaskan secara singkat!

Pembahasan:

Kurva Lorenz adalah alat visual yang menunjukkan sejauh mana distribusi pendapatan dalam suatu negara menyimpang. Semakin jauh kurva dari garis diagonal 45° (garis kesempurnaan distribusi), semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan. Adapun Koefisien Gini merupakan indeks numerik yang dihitung berdasarkan luas area antara Kurva Lorenz dan garis distribusi sempurna.

Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1, di mana 0 berarti distribusi pendapatan sangat merata. 1 berarti ketimpangan sangat tinggi (seluruh pendapatan hanya dimiliki oleh satu individu atau kelompok kecil). Koefisien Gini antara 0,3 - 0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan sedang, sementara di atas 0,5 mencerminkan ketimpangan yang signifikan.

Kegiatan Kelompok

Menganalisis Distribusi Pendapatan Nasional

Tujuan: Mengkaji kondisi dan solusi ketimpangan pendapatan nasional.

Langkah Kegiatan:

1. Bentuk kelompok 2–3 orang.
2. Kumpulkan informasi tentang distribusi pendapatan di Indonesia.
3. Bahas apakah pendapatan nasional sudah merata atau belum, serta faktornya.
4. Rancang solusi yang efektif untuk pemerataan pendapatan.
5. Sajikan hasil diskusi dalam bentuk PowerPoint dan presentasikan.

Rangkuman

- ▷ Pendapatan Nasional merupakan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu periode tertentu, yang menjadi indikator utama pertumbuhan ekonomi suatu negara.
- ▷ Tiga metode utama dalam menghitung pendapatan nasional adalah:
 - Pendekatan Produksi; menghitung total nilai tambah dari semua sektor produksi dalam ekonomi.
 - Pendekatan Pengeluaran; menjumlahkan seluruh pengeluaran dalam perekonomian (konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan eksport neto).
 - Pendekatan Pendapatan; menghitung total pendapatan yang diperoleh faktor produksi, seperti upah tenaga kerja, laba usaha, bunga modal, dan sewa.
- ▷ Pendapatan per Kapita diperoleh dengan membagi Pendapatan Nasional dengan jumlah penduduk. Indikator ini sering digunakan untuk mengukur standar hidup suatu negara, tetapi tidak selalu mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sebenarnya.
- ▷ Distribusi Pendapatan Nasional menunjukkan bagaimana pendapatan suatu negara terbagi di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Distribusi yang merata menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi, sedangkan ketimpangan dapat menimbulkan berbagai masalah sosial.
- ▷ Kurva Lorenz dan Koefisien Gini adalah dua alat utama dalam mengukur ketimpangan ekonomi. Semakin melengkung Kurva Lorenz dari garis kesempurnaan distribusi, semakin tinggi ketimpangan ekonomi. Koefisien Gini bernilai antara 0 (pemerataan sempurna) hingga 1 (ketimpangan ekstrem).
- ▷ Kesenjangan ekonomi terjadi akibat berbagai faktor, termasuk kondisi demografi, pendidikan, akses terhadap kesehatan, infrastruktur yang tidak merata, serta terbatasnya kesempatan kerja dan kepemilikan aset oleh masyarakat miskin.
- ▷ Pajak progresif menjadi salah satu kebijakan penting dalam distribusi pendapatan, di mana kelompok berpenghasilan tinggi membayar pajak lebih besar untuk membantu redistribusi kesejahteraan melalui program sosial dan pembangunan.
- ▷ Bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi instrumen pemerintah untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi ketimpangan ekonomi dalam jangka pendek.
- ▷ Pemerintah juga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi melalui kebijakan peningkatan aset masyarakat miskin, seperti reformasi agraria yang bertujuan untuk mendistribusikan tanah kepada petani kecil agar mereka memiliki sumber penghidupan yang berkelanjutan.
- ▷ Ketimpangan ekonomi yang terlalu tinggi dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial, karena dapat meningkatkan tingkat kriminalitas, menghambat mobilitas sosial, dan menyebabkan ketidakstabilan politik.
- ▷ Pemerataan distribusi pendapatan bukan berarti semua orang mendapatkan jumlah yang sama, tetapi memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan peluang kerja agar dapat meningkatkan taraf hidup mereka secara mandiri.

Latihan Soal

1. Berikut ini yang merupakan metode perhitungan Pendapatan Nasional berdasarkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara adalah...
 - A. Pendekatan produksi
 - B. Pendekatan pendapatan
 - C. Pendekatan pengeluaran
 - D. Pendekatan konsumsi
 - E. Pendekatan distribusi
2. Jika suatu negara memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) yang tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa...
 - A. Semua penduduk negara tersebut hidup sejahtera
 - B. Negara tersebut memiliki tingkat kemakmuran yang merata
 - C. Perekonomian negara tersebut menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah besar
 - D. Negara tersebut memiliki tingkat koefisien Gini yang rendah
 - E. Seluruh pendapatan nasional dibagi rata kepada masyarakat
3. Sebuah negara mengalami peningkatan pendapatan nasional setiap tahunnya, tetapi tingkat pengangguran tetap tinggi dan koefisien Gini juga meningkat. Dari kondisi ini, dapat disimpulkan bahwa...
 - A. Pertumbuhan ekonomi negara tersebut bersifat inklusif
 - B. Pertumbuhan ekonomi negara tersebut hanya dinikmati oleh kelompok tertentu
 - C. Pemerintah berhasil menekan tingkat ketimpangan sosial
 - D. Distribusi pendapatan nasional semakin merata
 - E. Semua lapisan masyarakat merasakan manfaat pertumbuhan ekonomi
4. Dalam pendekatan pendapatan, pendapatan nasional dihitung berdasarkan...
 - A. Jumlah seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi
 - B. Jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh faktor produksi dalam perekonomian
 - C. Total nilai tambah dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun
 - D. Selisih antara ekspor dan impor suatu negara
 - E. Penerimaan negara dari pajak dan belanja negara
5. Berikut ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu negara, kecuali...
 - A. Koefisien Gini
 - B. Kurva Lorenz
 - C. Rasio Kuznets
 - D. Indeks Harga Konsumen
 - E. Rasio pendapatan kuintil
6. Jika Kurva Lorenz suatu negara semakin menjauhi garis diagonal 45 derajat, maka dapat disimpulkan bahwa...
 - A. Distribusi pendapatan semakin merata
 - B. Pemerintah berhasil menekan ketimpangan ekonomi
 - C. Tingkat pengangguran menurun
 - D. Ketimpangan distribusi pendapatan semakin besar
 - E. Pajak progresif berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat

7. Kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan melalui penarikan pajak lebih besar dari kelompok kaya dan dialokasikan dalam bentuk program bantuan bagi kelompok miskin disebut...
 - A. Pajak regresif
 - B. Pajak proporsional
 - C. Pajak progresif
 - D. Pajak konsumsi
 - E. Pajak tetap
8. Salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dengan cara memberikan bantuan langsung berupa uang tunai adalah...
 - A. Subsidi bahan bakar minyak (BBM)
 - B. Bantuan Langsung Tunai (BLT)
 - C. Pembangunan infrastruktur publik
 - D. Pemberlakuan pajak karbon
 - E. Penerapan tarif pajak tetap

**Akses latihan soal
lainnya di sini yuk!**



Referensi

- Dornbusch, R., Fischer, S., & Startz, R. (2018). Macroeconomics (13th ed.). McGraw-Hill Education.
- Gini, C. (1912). Variabilità e mutabilità. Bologna: C. Cuppini.
- Mankiw, N. G. (2021). Principles of Economics (9th ed.). Cengage Learning.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2020). Economics (20th ed.). McGraw-Hill Education.
- Stiglitz, J. E. (2012). The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future. W. W. Norton & Company.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2013). Economic Development (12th ed.). Pearson Education.
- Yusuf, A. (2001). Kitab Al-Kharaj: Pemikiran Abu Yusuf tentang Ekonomi Islam dan Distribusi Kekayaan. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Bank Dunia. (2022). World Bank Country and Lending Groups. Retrieved from <https://data.worldbank.org>
- BPS. (2023). Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha Indonesia 2022-2023. Badan Pusat Statistik. Retrieved from <https://www.bps.go.id>
- Oxfam. (2017). Menuju Indonesia yang Lebih Setara: Laporan Ketimpangan Indonesia. Retrieved from <https://www.oxfam.org>
- UNDP. (2022). Human Development Report 2022: Uncertain Times, Unsettled Lives. United Nations Development Programme. Retrieved from <https://hdr.undp.org>
- Julo. (2022). Hal yang Perlu Diperhatikan tentang Kesenjangan Pendapatan. Retrieved from <https://www.julo.co.id>
- Kompas. (2023). Mengapa Kesenjangan Ekonomi Membahayakan?. Retrieved from <https://www.kompas.id>
- Kompasiana. (2023). Kesenjangan Ekonomi: Analisis Faktor Penyebab dan Solusi. Retrieved from <https://www.kompasiana.com>
- Kumparan. (2023). Faktor Penyebab Kesenjangan Ekonomi dan Solusinya. Retrieved from <https://kumparan.com>
- Pratama Institute. (2022). Pajak Progresif dan Kesenjangan Sosial. Retrieved from <https://pratamainstitute.com>
- Repo UNIDA Gontor. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Konsep Keadilan dan Distribusi Kekayaan menurut Abu Yusuf. Retrieved from <https://repo.unida.gontor.ac.id>



BAB 3: KETENAGAKERJAAN

Karakter Pelajar Pancasila

Mandiri: Siap menghadapi dunia kerja.

Bergotong royong: Peduli terhadap masalah ketenagakerjaan.

Bernalar kritis: Memahami isu pengangguran dan upah.

Kata Kunci: Tenaga Kerja, Ketenagakerjaan, Pengangguran, Permintaan, Penawaran, Angkatan Kerja, Upah.

Tujuan Pembelajaran: Mengurai Konsep Ketenagakerjaan

1. Memahami Konsep Ketenagakerjaan

- ▷ Menjelaskan pengertian ketenagakerjaan.
- ▷ Membedakan tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja.
- ▷ Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketenagakerjaan.

2. Mengidentifikasi Jenis Tenaga Kerja

- ▷ Mengelompokkan tenaga kerja berdasarkan keterampilan
- ▷ Membedakan tenaga kerja formal dan informal.
- ▷ Mengidentifikasi tenaga kerja berdasarkan sektor ekonomi.

3. Menganalisis Masalah Ketenagakerjaan

- ▷ Menjelaskan berbagai masalah ketenagakerjaan.
- ▷ Mengidentifikasi penyebab dan dampak masalah ketenagakerjaan.

4. Menganalisis Sistem Upah

- ▷ Menjelaskan berbagai sistem pengupahan (harian, pekanan, borongan, kontrak).
- ▷ Menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem upah.

5. Mengidentifikasi Jenis Upah

- ▷ Menjelaskan berbagai jenis upah yang berlaku dalam sistem ketenagakerjaan.
- ▷ Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan jenis upah di dunia kerja.

6. Mendeskripsikan Konsep dan Mengidentifikasi Jenis Pengangguran

- ▷ Mengurai dan memahami konsep pengangguran.
- ▷ Mengidentifikasi karakteristik jenis-jenis pengangguran.
- ▷ Menganalisis strategi pemerintah dalam mengatasi pengangguran.



F I T R I



1. Ketenagakerjaan

Esensi Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan ketenagakerjaan sebagai segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Definisi ini mencakup tiga fase utama dalam hubungan kerja: pra-kerja (*pre-employment*), saat bekerja (*during-employment*), dan pasca-kerja (*post-employment*).

Pada tahap pra-kerja, individu mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja melalui pendidikan dan pelatihan. Sedangkan pemerintah dan lembaga pendidikan berperan menyediakan program yang meningkatkan keterampilan dan kompetensi calon tenaga kerja. Pada tahap ini, yang harus dilakukan adalah memastikan setiap individu siap menghadapi tuntutan pasar kerja yang dinamis.

Adapun selama masa kerja, hubungan antara pekerja dan pemberi kerja diatur oleh perjanjian kerja yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak. Aspek penting dalam fase ini meliputi kondisi kerja, upah, jaminan sosial, dan keselamatan kerja. Undang-Undang Ketenagakerjaan berfungsi sebagai landasan hukum untuk memastikan hubungan kerja yang adil dan kondusif.

Setelah masa kerja berakhir, baik karena pensiun, pemutusan hubungan kerja, atau alasan lain, pekerja memasuki fase pasca-kerja. Pada tahap ini, jaminan sosial seperti dana pensiun dan tunjangan hari tua menjadi penting untuk menjamin kesejahteraan pekerja setelah tidak lagi aktif bekerja.

Sementara itu, kesempatan kerja atau lapangan kerja berkaitan erat dengan jumlah penduduk suatu negara. Peningkatan jumlah penduduk usia kerja menuntut tersedianya lapangan kerja yang memadai. Penduduk usia kerja biasanya didefinisikan sebagai individu berusia 15 tahun ke atas. Namun, batasan usia ini dapat berbeda di beberapa negara. Misalnya, di Indonesia, penduduk usia kerja adalah mereka yang berusia 15 tahun ke atas, sedangkan di negara lain batasannya mungkin berbeda.

Penduduk usia kerja terbagi menjadi dua kelompok utama yaitu, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja mencakup individu yang bekerja atau aktif mencari pekerjaan. Sementara itu, bukan angkatan kerja terdiri dari mereka yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan, seperti pelajar, ibu rumah tangga, atau pensiunan.

Diantara mereka yang termasuk bukan angkatan kerja, terdapat satu unsur kategori yang kita kenal dengan istilah pengangguran. Dimana, pengangguran terjadi ketika jumlah angkatan kerja yang mencari pekerjaan melebihi kesempatan kerja yang tersedia. Hal ini menunjukkan rendahnya daya serap terhadap populasi yang aktif secara ekonomi. Pengangguran dapat berdampak negatif pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

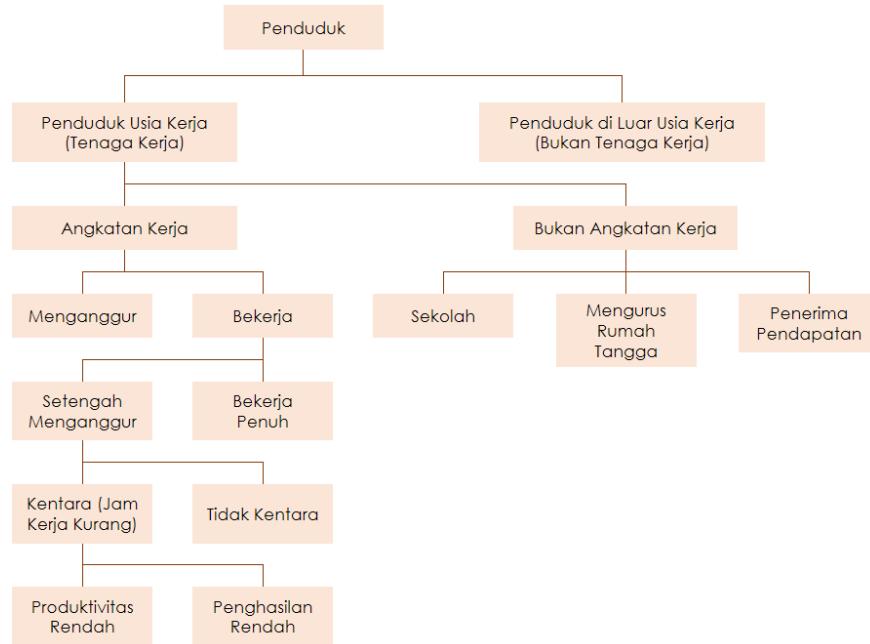
Secara umum, tenaga kerja dapat diklasifikasikan berdasarkan status pekerjaan dan tingkat pengangguran. Pertama, kelompok setengah menganggur dan bekerja penuh. Setengah menganggur merujuk pada individu yang bekerja kurang dari jam kerja normal dan ingin menambah jam kerja. Sedangkan bekerja penuh adalah mereka yang bekerja sesuai atau melebihi jam kerja standar.



Kerumunan warga saat berangkat ke tempat kerja masing-masing - shutterstock.com.2399291851

Selanjutnya, kelompok pengangguran kentara dan tidak kentara. Pengangguran kentara adalah individu yang tidak memiliki pekerjaan dan aktif mencari kerja. Sementara itu, pengangguran tidak kentara mencakup mereka yang bekerja di bawah kapasitas atau tidak sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Lalu ada juga kelompok penduduk berproduktivitas dan berpenghasilan rendah: Kelompok ini terdiri dari individu yang bekerja tetapi dengan produktivitas dan pendapatan yang rendah, seringkali berada di sektor informal.

Untuk mendeskripsikan secara menyeluruh klasifikasi penduduk terkait ketenagakerjaan, berikut ini disajikan ilustrasi komposisi penduduk dan tenaga kerja:



Bagan Komposisi Penduduk dan Tenaga Kerja - Dolah Penerbit

Kesempatan kerja merupakan hal yang diperlukan para angkatan kerja yang sedang membutuhkan pekerjaan, dimana kesempatan kerja menggambarkan adanya ketersediaan lapangan pekerjaan. Di Indonesia, kesempatan kerja dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak". Semakin jelas bahwa pemerintah bertanggung jawab atas penciptaan lapangan kerja.

Jika dicermati secara jumlah penduduk, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat setelah Tiongkok, India dan Amerika. Di sisi lain, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2021, angkatan kerja di Indonesia mencapai 139,81 juta orang, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 69,96%. Dari jumlah tersebut, 131,06 juta orang bekerja, sementara 8,75 juta orang menganggur, menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,26%.

Sebagai perbandingan, Jepang memiliki TPAK yang relatif stabil. Data menunjukkan bahwa pada Januari 2025, TPAK Jepang mencapai 63,20%. Meskipun TPAK Jepang sedikit lebih rendah dibandingkan Indonesia, perlu diperhatikan bahwa struktur demografi dan kondisi pasar kerja di kedua negara berbeda. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin besar jumlah penduduk, semakin besar pula jumlah angkatan kerjanya.

Peningkatan jumlah penduduk usia kerja biasanya diikuti oleh peningkatan angkatan kerja. Namun, jika pertumbuhan kesempatan kerja tidak sebanding, hal ini dapat menyebabkan peningkatan pengangguran. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja yang sejalan dengan pertumbuhan angkatan kerja guna menjaga stabilitas ekonomi dan sosial.

Sementara itu, jumlah lapangan kerja yang tersedia sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional. Pendapatan nasional yang tinggi memungkinkan investasi lebih besar, yang pada gilirannya menciptakan lebih banyak kesempatan kerja. Sebaliknya, pendapatan nasional yang rendah dapat membatasi kemampuan negara untuk menciptakan lapangan kerja, sehingga meningkatkan tingkat pengangguran.

Klasifikasi Tenaga Kerja

Dalam dunia ketenagakerjaan, tenaga kerja dapat dikategorikan berdasarkan berbagai aspek, seperti sifat pekerjaannya dan tingkat keahliannya. Klasifikasi ini membantu dalam memahami peran dan kontribusi tenaga kerja dalam sektor ekonomi.

a. Klasifikasi Berdasarkan Sifat Pekerjaannya

▷ **Tenaga Kerja Rohaniah (Nonfisik)**

Tenaga kerja rohaniah adalah individu yang mengandalkan kemampuan intelektual, kreativitas, dan kecerdasan dalam menjalankan pekerjaannya. Pekerjaan yang termasuk dalam kategori ini tidak memerlukan tenaga fisik yang besar, tetapi lebih menekankan pada kecakapan berpikir dan analisis. Contoh profesi yang termasuk dalam kategori ini adalah dosen, penulis, psikolog, akuntan, dan arsitek. Profesi-profesi ini membutuhkan tingkat pemahaman mendalam serta pengolahan informasi yang kompleks.

▷ **Tenaga Kerja Jasmaniah (Fisik)**

Tenaga kerja jasmaniah mengandalkan kekuatan fisik sebagai faktor utama dalam melaksanakan pekerjaannya. Pekerjaan ini biasanya melibatkan aktivitas yang membutuhkan tenaga, stamina, dan keterampilan manual. Beberapa profesi yang tergolong dalam kategori ini antara lain buruh pabrik, petani, pekerja konstruksi, dan tukang las. Mereka berkontribusi secara langsung dalam proses produksi barang dan jasa yang memerlukan kerja fisik.



Pekerja pabrik termasuk contoh tenaga kerja jasmaniah - shutterstock.com.556507657

b. Klasifikasi Berdasarkan Keahliannya

▷ **Tenaga Kerja Terdidik**

Tenaga kerja terdidik adalah individu yang memiliki tingkat pendidikan tinggi dan mengandalkan ilmu pengetahuan serta teori dalam pekerjaannya. Profesi dalam kategori ini umumnya memerlukan gelar akademik dan keterampilan analitis yang mendalam. Contoh tenaga kerja terdidik meliputi dokter, insinyur, ahli hukum, dan ilmuwan. Mereka berperan dalam pengembangan teknologi, pelayanan kesehatan, dan penelitian yang berkontribusi terhadap kemajuan masyarakat.

▷ **Tenaga Kerja Terlatih**

Tenaga kerja terlatih adalah individu yang memperoleh keahliannya melalui pelatihan atau pengalaman kerja, meskipun tidak memiliki latar belakang pendidikan formal yang tinggi. Mereka menguasai keterampilan teknis atau operasional tertentu yang diperoleh dari pengalaman langsung atau pelatihan khusus. Contoh profesi dalam kategori ini termasuk teknisi mesin, montir, operator alat berat, dan koki. Keahlian mereka sangat diperlukan dalam industri dan sektor jasa.

▷ **Tenaga Kerja Tidak Terdidik dan Tidak Terlatih**

Tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih adalah mereka yang tidak memiliki pendidikan formal yang tinggi maupun keterampilan khusus yang diperoleh melalui pelatihan. Mereka biasanya bekerja di sektor informal yang tidak memerlukan keahlian khusus. Kuli panggul, adalah pedagang kaki lima adalah contoh profesi pada kategori ini. Meskipun tanpa pendidikan atau pelatihan formal, kontribusi mereka tetap penting dalam perekonomian.

Dengan memahami klasifikasi tenaga kerja ini, kita dapat mengapresiasi peran masing-masing kelompok dalam pembangunan ekonomi serta melihat bagaimana setiap jenis tenaga kerja memiliki kontribusi unik dalam sistem ketenagakerjaan.

Tantangan dalam Ketenagakerjaan

a. Tingginya Jumlah Angkatan Kerja

Pada Februari 2024, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) mencatat jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 149,38 juta orang, meningkat 2,76 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik 0,50 persen poin menjadi 69,42%. Dari total angkatan kerja tersebut, 142,18 juta orang bekerja, sementara 7,20 juta orang menganggur. Kenaikan jumlah angkatan kerja yang signifikan harus diiringi dengan program strategis yang efektif.

b. Tingginya Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2024 tercatat sebesar 4,82%, turun 0,63 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun terjadi penurunan, angka ini masih menunjukkan bahwa sekitar 7,20 juta orang dari angkatan kerja belum mendapatkan pekerjaan. Harus dilakukan langkah strategis dari para pemangku kebijakan yang bertanggung jawab atas tingginya angka pengangguran.

c. Rendahnya Tingkat Pendidikan dan Keterampilan

Berikut adalah tabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia berdasarkan Tingkat Pendidikan untuk tiga tahun terakhir, merujuk pada data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS):

Tabel Persentase Jumlah Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan (2021-2023)

Tingkat Pendidikan	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
Tidak/Belum pernah sekolah	1,47	1,28	1,12
Tidak/Belum tamat SD	2,67	2,45	2,32
SD	3,61	3,45	3,12
SMP	5,8	5,95	5,76
SMA	8,55	8,57	8,35
SMK	11,13	10,38	9,42
Diploma I/II/III	6,61	6,19	5,86
Universitas	5,98	5,87	5,68

Sumber: Bps.go.id

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka cenderung lebih tinggi pada lulusan SMK dibandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya. Meskipun terjadi penurunan TPT pada



Kompetensi dan keterampilan khusus yang sesuai dengan bidang kerja, secara efektif menguntungkan perusahaan -

lulusan SMK dari 11,13% pada 2021 menjadi 9,42% pada 2023, angka ini masih merupakan yang tertinggi dibandingkan lulusan tingkat pendidikan lainnya. Sebaliknya, lulusan dengan tingkat pendidikan rendah, seperti tidak/belum pernah sekolah atau tidak/belum tamat SD, memiliki TPT yang lebih rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh keterlibatan mereka dalam sektor informal.

Adapun angka pengangguran di kalangan sarjana masih cukup signifikan, yaitu 5,68% pada 2023. Hal ini mungkin disebabkan oleh ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kebutuhan industri atau terbatasnya lapangan pekerjaan yang sesuai.

d. Ketidakmerataan Penyebaran Angkatan Kerja

Distribusi angkatan kerja yang tidak merata antara wilayah perkotaan dan pedesaan menimbulkan ketimpangan ekonomi. Misalnya, Provinsi Banten pada Agustus 2024 memiliki angkatan kerja sebanyak 6,21 juta orang, dengan 5,80 juta bekerja dan 414,75 ribu menganggur. Sedangkan di provinsi Gorontalo hanya berjumlah 652 ribu orang. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa beberapa daerah memiliki surplus tenaga kerja, sementara daerah lain kekurangan.

e. Perlindungan Kesejahteraan Tenaga Kerja yang Belum Optimal

Standar upah minimum yang belum merata dan jaminan sosial yang terbatas menunjukkan perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Pada Agustus 2024, rata-rata upah buruh sebesar 3,27 juta rupiah per bulan. Namun, masih terdapat pekerja yang menerima upah di bawah standar minimum, terutama di sektor informal.

Strategi Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja

Peningkatan kualitas tenaga kerja menjadi kunci dalam menghadapi persaingan global. Dunia usaha cenderung mencari tenaga kerja yang siap pakai, memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan individu sangat penting dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja.

a. Peran Pemerintah

Pemerintah memiliki peran strategis dalam menyediakan pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Melalui program pendidikan vokasi dan pelatihan kerja, pemerintah dapat menjembatani kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki tenaga kerja dan kebutuhan industri. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah ketenagakerjaan, antara lain dengan cara-cara berikut:

- ▷ **Menyediakan pelatihan dan pendidikan vokasi**, yakni meningkatkan tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja melalui program pelatihan dan pendidikan vokasi.
- ▷ **Mendorong investasi**, yaitu menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk membuka dan menyediakan lapangan kerja baru bagi angkatan kerja yang terus meningkat.
- ▷ **Mengembangkan infrastruktur**, yakni meningkatkan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

- ▷ **Menyusun kebijakan upah yang adil**, yaitu menetapkan upah minimum yang sesuai dengan kebutuhan hidup layak.
- ▷ **Memperluas program jaminan sosial** untuk memastikan seluruh pekerja mendapatkan perlindungan sosial yang memadai.
- ▷ **Mendorong kewirausahaan**, yakni memberikan insentif bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

b. Peran Sektor Swasta (Perusahaan)

Perusahaan dapat berkontribusi dengan menyediakan program pelatihan internal, magang, dan pengembangan karier bagi karyawan. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya mendapatkan tenaga kerja yang kompeten tetapi juga meningkatkan loyalitas karyawan. Selain itu, kolaborasi dengan institusi pendidikan dalam merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri dapat memastikan ketersediaan tenaga kerja yang siap pakai.

c. Peran Individu

Individu memiliki tanggung jawab utama dalam meningkatkan kualitas diri agar lebih kompetitif di dunia kerja. Terdapat dua langkah utama yang dapat dilakukan oleh setiap individu untuk meningkatkan daya saing mereka:

▷ **Membekali Diri dengan Pengetahuan dan Keterampilan**

Pendidikan formal dan non-formal sangat penting dalam membangun kompetensi tenaga kerja. Mengikuti pelatihan, seminar, atau kursus yang relevan dengan bidang pekerjaan dapat meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Belajar keterampilan tambahan seperti penguasaan teknologi digital, kemampuan komunikasi, dan manajemen waktu juga akan memberikan keunggulan di pasar kerja yang semakin kompetitif. Tokoh sukses seperti Jack Ma, sangat menekankan pentingnya belajar dari pengalaman serta mengembangkan keterampilan komunikasi dan kepemimpinan agar lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja.

▷ **Menanamkan Jiwa Wirausaha**

Selain mencari pekerjaan di sektor formal, individu juga dapat berperan sebagai pencipta lapangan kerja melalui wirausaha. Berwirausaha memberikan fleksibilitas dan kesempatan untuk berkembang sesuai dengan minat dan kreativitas masing-masing individu. Elon Musk (bilyuner asal Amerika) sangat menekankan pentingnya inovasi dan ketekunan dalam membangun bisnis. Mengembangkan pola pikir kreatif serta keberanian mengambil risiko adalah kunci sukses dalam dunia usaha. Dengan mengembangkan keterampilan dan mentalitas yang tepat, individu dapat lebih siap menghadapi persaingan di dunia kerja dan bahkan berkontribusi dalam menciptakan peluang kerja baru bagi orang lain.

Fakta Unik Seputar Ekonomi

Tenaga Kerja Informal Mendominasi

Sebanyak 58,91% tenaga kerja di Indonesia masih bekerja di sektor informal per Agustus 2023, yang mencakup pedagang kaki lima, buruh tani, dan pekerja lepas, menunjukkan masih kuatnya peran sektor ini dalam perekonomian.



Tenaga kerja informal -
shutterstock.com.1322526146

Contoh Soal

Jelaskan bagaimana hubungan antara jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja dalam perekonomian suatu negara! Bagaimana jika daya serap tenaga kerja rendah?

Pembahasan:

Dalam suatu negara, jumlah penduduk usia kerja menentukan potensi tenaga kerja yang tersedia. Namun, tidak semua penduduk usia kerja masuk dalam kategori angkatan kerja karena ada yang memilih untuk tidak bekerja, seperti pelajar atau ibu rumah tangga. Kesempatan kerja bergantung pada daya serap pasar tenaga kerja. Jika daya serap rendah, maka jumlah pengangguran akan meningkat, yang berakibat pada turunnya daya beli masyarakat, melemahnya pertumbuhan ekonomi, dan meningkatnya ketimpangan sosial. Oleh karena itu, pemerintah harus menciptakan kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja baru dan meningkatkan kualitas tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri.

Kegiatan Kelompok

Menganalisis Permasalahan Ketenagakerjaan di Indonesia

Tujuan: Memahami penyebab dan solusi permasalahan ketenagakerjaan.

Langkah Kegiatan:

1. Bentuk 5 kelompok diskusi, tiap kelompok membahas salah satu isu:
 - Jumlah angkatan kerja tinggi.
 - Tingkat pengangguran tinggi.
 - Pendidikan dan keterampilan rendah.
 - Penyebaran tenaga kerja tidak merata.
 - Perlindungan kesejahteraan belum maksimal.
2. Cari informasi penyebab dan data pendukung dari sumber terpercaya.
3. Rumuskan solusi yang dapat dilakukan oleh individu, perusahaan, atau pemerintah.



2. Sistem Pengupahan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan menetapkan kebijakan pengupahan sebagai upaya untuk mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, termasuk penetapan upah berdasarkan satuan waktu dan/atau satuan hasil, struktur dan skala upah, upah minimum, dan perlindungan upah. Kebijakan terkait sistem pengupahan ini meliputi:

- a. Upah minimum: penetapan upah minimum sebagai jaring pengaman bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
- b. Struktur dan skala upah: struktur dan skala upah disusun dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.
- c. Upah kerja lembur: upah kerja lembur bagi yang bekerja melebihi jam kerja yang ditetapkan.
- d. Upah tidak masuk kerja: ketentuan upah bagi pekerja yang tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu.
- e. Bentuk dan cara pembayaran upah: bentuk dan cara pembayaran upah, termasuk ketentuan mengenai upah dalam bentuk uang dan/atau barang.
- f. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah seperti pengaturan tunjangan.
- g. Sanksi administratif.

Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja

Permintaan dan penawaran tenaga kerja merupakan konsep fundamental dalam ekonomi tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja berasal dari pengusaha yang membutuhkan tenaga kerja untuk menjalankan operasional perusahaan, sedangkan penawaran tenaga kerja berasal dari individu yang menawarkan jasa kerjanya. Keseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja akan menentukan tingkat upah dan tingkat kesempatan kerja di pasar.

Misalnya, di negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, permintaan tenaga kerja cenderung meningkat, yang dapat menyebabkan kenaikan upah jika penawaran tenaga kerja tidak sebanding. Sebaliknya, jika penawaran tenaga kerja melebihi permintaan, seperti yang terjadi pada masa resesi, tingkat pengangguran dapat meningkat dan tekanan terhadap penurunan upah mungkin terjadi.



Semakin banyak lapangan kerja yang tersedia, semakin tinggi upah kerja yang ditawarkan - talenta.com.

Kategori Upah

Upah dapat diklasifikasikan berdasarkan dua pendekatan utama, yaitu berdasarkan satuan waktu dan berdasarkan satuan hasil.

a. Berdasarkan Satuan Waktu

Upah dihitung dari waktu kerja yang dilakukan. Penghitungan upah kerja dilakukan dengan pendekatan jam, harian, atau bulanan.

- ▷ **Upah per Jam:** Upah yang dihitung berdasarkan jumlah jam kerja yang diselesaikan oleh pekerja. Rumus perhitungannya adalah:

$$\text{Upah per jam} = \frac{\text{Upah Sebulan}}{126}$$

*Angka 126 berasal dari asumsi jam kerja rata-rata per bulan untuk pekerja paruh waktu.

- ▷ **Upah Harian:** Upah yang diberikan berdasarkan jumlah hari kerja dalam periode tertentu. Perhitungannya berbeda tergantung pada sistem kerja yang diterapkan:

- Untuk sistem kerja 6 hari per minggu, nominal upah sebulan dibagi 25, rumus dideskripsikan sebagai berikut:

$$\text{Upah per hari} = \frac{\text{Upah Sebulan}}{25}$$

- Untuk sistem kerja 6 hari per minggu, nominal upah sebulan dibagi 21, rumus dideskripsikan sebagai berikut:

$$\text{Upah per hari} = \frac{\text{Upah Sebulan}}{21}$$

Perbedaan ini disebabkan oleh jumlah hari kerja efektif dalam sebulan yang berbeda antara kedua sistem tersebut.

- ▷ **Upah Bulanan:** Upah yang dibayarkan secara tetap setiap bulan, tanpa memandang jumlah hari kerja atau jam kerja dalam bulan tersebut. Biasanya diterapkan untuk karyawan tetap dengan jam kerja yang sudah ditentukan.

b. Berdasarkan Satuan Hasil

Upah yang ditentukan berdasarkan jumlah atau kualitas hasil kerja yang dicapai oleh pekerja. Sistem ini sering digunakan dalam industri manufaktur atau sektor pertanian, di mana output dapat diukur dengan jelas. Misalnya, pekerja yang dibayar berdasarkan jumlah unit produk yang dihasilkan atau jumlah lahan yang berhasil dipanen.

Salah satu bentuk umum dari upah berdasarkan satuan hasil adalah sistem upah borongan, di mana pekerja atau kelompok pekerja diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan imbalan upah yang telah disepakati

Fakta Unik Seputar Ekonomi

UMP Jakarta yang Fantastis!

DKI Jakarta memiliki Upah Minimum Provinsi (UMP) tertinggi di Indonesia, yakni Rp5.067.381 per bulan pada 2024, hampir dua kali lipat dari beberapa provinsi lain seperti Jawa Tengah yang hanya sekitar Rp2,04 juta. Hal ini terjadi karena pembangunan yang belum merata.



Kawasan berkantor elit 'SCBD' Jakarta - shutterstock.com. 2480579309

sebelumnya. Contohnya, dalam proyek konstruksi, kontraktor dapat memberikan upah borongan kepada tukang untuk menyelesaikan pemasangan keramik di sebuah gedung dengan jumlah upah yang ditentukan berdasarkan luas area yang harus dikerjakan. Sistem ini mendorong efisiensi dan produktivitas, karena pekerja memiliki insentif untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan baik.

Kesepakatan antara Pemberi Kerja dan Pekerja

Kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja merupakan landasan utama dalam hubungan industrial yang harmonis. Melalui perjanjian kerja, kedua belah pihak menyepakati hak dan kewajiban masing-masing, termasuk besaran upah, jam kerja, dan kondisi kerja lainnya. Perjanjian ini dapat berbentuk perjanjian kerja individu atau perjanjian kerja bersama yang dinegosiasikan antara serikat pekerja dan manajemen perusahaan.

Pentingnya kesepakatan ini tidak hanya untuk menjamin kesejahteraan pekerja tetapi juga untuk memastikan produktivitas dan kelangsungan operasional perusahaan. Dengan adanya kesepakatan yang jelas dan adil, potensi konflik dapat diminimalisir, dan hubungan kerja dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

Dewan Pengupahan

Dewan Pengupahan adalah lembaga non-struktural bersifat pihak ketiga yang berperan dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pengupahan. Pembentukan Dewan Pengupahan diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004. Secara kelembagaan, Dewan Pengupahan memiliki sistem berjenjang, yaitu Depenas (nasional), Depeprov (provinsi), dan Depekab/Depeko (kab/kota).

a. Dewan Pengupahan Nasional (Depenas)

Depenas adalah Dewan Pengupahan yang beroperasi di tingkat nasional. Tugas utamanya adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat mengenai kebijakan pengupahan yang mencakup penetapan upah minimum, struktur dan skala upah, serta sistem pengupahan lainnya yang berlaku secara nasional.

b. Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov)

Depeprov beroperasi di tingkat provinsi dengan dua tugas utama. Pertama, memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) melalui kajian dan analisis terhadap kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup layak di wilayahnya untuk menentukan besaran UMP yang sesuai. Dan yang kedua, membantu dalam penyusunan pedoman struktur dan skala upah yang adil dan sesuai dengan kondisi ekonomi di provinsi tersebut.

c. Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota (Depekab/Depeko)

Sama halnya dengan Depeprov, Depekab/Depeko memiliki dua tugas utama, hanya saja skala operasionalnya di tingkat kabupaten atau kota. Depekab/Depeko bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Walikota tentang upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan berbasis pada survei dan analisis, sehingga merekomendasikan besaran UMK yang sesuai dengan kondisi wilayahnya.

Selanjutnya, Depekab/Depeko juga bertugas untuk membantu Bupati/Walikota dalam penyusunan pedoman struktur dan skala upah adil, sesuai dengan kondisi di kabupaten atau kota tersebut.

Upah Minimum

Sebelum tahun 2000, konsep pengupahan di Indonesia mengalami beberapa perubahan. Pada tahun 1969, diperkenalkan konsep Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) sebagai dasar penetapan upah minimum. Kebijakan upah minimum pertama kali muncul pada awal 1970-an setelah dibentuknya Dewan Penelitian Pengupahan Nasional berdasarkan Keppres No. 85 Tahun 1969.

Pada tahun 1996, KFM diganti menjadi Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 81 Tahun 1995. Komponen KHM terdiri atas makanan dan minuman, perumahan dan fasilitas, sandang, serta aneka kebutuhan lainnya. KHM menjadi rujukan upah minimum berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1997 tentang Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku dua tahun.

Seiring perkembangan, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999 tentang upah minimum. Upah minimum merupakan pokok termasuk tunjangan tetap, terdiri atas UMR Tingkat 1, UMR Tingkat II, Upah Minimum Sektoral Regional (UMSR) Tingkat I, dan UMSR tingkat II.

Saat ini, pengaturan upah minimum di Indonesia mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Upah minimum ditetapkan sebagai jaring pengaman bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Penetapan upah minimum mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi.



Lapisan masyarakat dari kalangan buruh dan pekerja menyampaikan aspirasi terkait ketenagakerjaan dan upah. Dalam teorinya, salah satu tahapan dalam proses penetapan upah minimum adalah dengan mengalaisis kebutuhan hidup layak (KHL). Di sisi lain, pemerintah juga harus mempertimbangkan kemampuan pelaku usaha dalam merealisasikan upah kerja dalam satu tingkatan tertentu - shutterstock.com. 1385076263

a. Upah Minimum Provinsi (UMP)

UMP adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi. UMP ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi. UMP ditetapkan setiap tahun dan diumumkan paling lambat 21 November untuk mulai berlaku pada 1 Januari tahun berikutnya.

Dalam prosesnya, penetapan UMP mempertimbangkan beberapa faktor, seperti kebutuhan hidup layak (KHL) serta produktivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Kebutuhan hidup layak (KHL) merupakan standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pekerja untuk hidup layak secara fisik dalam satu bulan. Sedangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi diukur dengan merujuk data pertumbuhan ekonomi dan produktivitas di provinsi tersebut.

b. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah upah minimum yang diberlakukan secara khusus di wilayah kabupaten atau kota tertentu, yang mempertimbangkan kondisi ekonomi, kebutuhan hidup layak (KHL), serta produktivitas tenaga kerja di wilayah tersebut. UMK ditetapkan oleh gubernur berdasarkan rekomendasi dari bupati atau walikota dan masukan dari Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota (Depekap/Depeko).

Penetapan UMK dilakukan setelah UMP dan umumnya memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan UMP di provinsi yang sama. Dalam prosesnya, penetapan UMK diawali dengan melakukan survei kebutuhan hidup layak (KHL). Tim survei yang terdiri dari perwakilan pemerintah daerah, serikat pekerja, dan pengusaha melakukan survei harga barang dan jasa yang termasuk dalam komponen KHL.

Setelah survei dilakukan, Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota membahas hasilnya dan memberikan rekomendasi kepada bupati atau walikota mengenai besaran UMK yang layak ditetapkan. Selanjutnya, hasil pembahasan tersebut menjadi rekomendasi yang diajukan oleh Bupati atau Walikota kepada Gubernur agar disetujui sebagai UMK yang ditetapkan.

Gubernur kemudian meninjau rekomendasi tersebut sebelum mengeluarkan keputusan resmi mengenai UMK. Setelah peninjauan selesai, Gubernur menetapkan UMK berdasarkan rekomendasi yang telah diterima dan mengumumkannya sebelum tanggal 30 November agar dapat diberlakukan mulai 1 Januari tahun berikutnya.

Setiap tahun, UMK dapat mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi. Oleh karena itu, Pemerintah menggunakan skema tertentu untuk menetapkan kenaikan atau perubahan UMK berdasarkan beberapa faktor. Pertama, daya beli masyarakat. Upah minimum harus mempertimbangkan daya beli pekerja di suatu daerah untuk memastikan kesejahteraan mereka.

Kedua, upah median. Perhitungan kenaikan UMK mempertimbangkan upah median pekerja di wilayah tersebut agar selaras dengan standar penghasilan rata-rata. Lalu, faktor yang ketiga ialah penyerapan tenaga kerja. UMK yang terlalu tinggi bisa menghambat penyerapan tenaga kerja oleh perusahaan, sehingga keseimbangan antara kebutuhan pekerja dan kemampuan pengusaha perlu diperhatikan.

Pada akhirnya, perlu dimengerti bahwa upah minimum Kabupaten/Kota memiliki peran penting dalam memastikan kesejahteraan pekerja di tingkat lokal dengan menyesuaikan besaran upah sesuai dengan kondisi ekonomi di masing-masing daerah. Keputusan UMK yang tepat dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Contoh Soal

Sebuah perusahaan menerapkan sistem upah harian dengan ketentuan kerja 6 hari dalam seminggu. Jika seorang pekerja menerima gaji Rp4.500.000 per bulan, hitunglah besaran upah harian yang diterima pekerja tersebut dan jelaskan bagaimana sistem pengupahan ini mempengaruhi kesejahteraan pekerja!

Pembahasan:

Upah harian dihitung dengan:

$$\text{Upah per hari} = \frac{4.500.000}{25} = 180.000$$

Pekerja menerima upah harian sebesar Rp180.000 per hari. Sistem pengupahan harian ini memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk menyesuaikan jumlah tenaga kerja dengan kebutuhan operasionalnya. Namun, bagi pekerja, sistem ini bisa menjadi kurang stabil dibandingkan upah bulanan karena penghasilan mereka tergantung pada jumlah hari kerja aktual. Jika pekerja tidak masuk kerja karena sakit atau alasan lain, maka penghasilan mereka akan berkurang. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan tenaga kerja harus memastikan adanya keseimbangan antara fleksibilitas perusahaan dan kesejahteraan pekerja.



3. Pengangguran

Tingkat Pengangguran

Pengangguran merupakan kondisi di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan namun sedang aktif mencari pekerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur persentase jumlah penganggur terhadap total angkatan kerja. TPT menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kondisi pasar tenaga kerja dan kesehatan ekonomi suatu negara.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Agustus 2024, jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 152,11 juta orang, dengan 144,64 juta orang di antaranya bekerja dan 7,47 juta orang menganggur. Hal ini menunjukkan bahwa TPT Indonesia pada periode tersebut adalah 4,91%, turun sebesar 0,41 persen poin dibandingkan Agustus 2023 yang sebesar 5,32%.

Penurunan TPT ini menunjukkan perbaikan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Namun, tantangan masih ada, terutama dalam menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah. Upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pengembangan sektor-sektor ekonomi yang padat karya, menjadi kunci dalam menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jenis-Jenis Pengangguran dan Penyebabnya

Pengangguran dapat dikategorikan berdasarkan faktor penyebabnya dan durasi waktu kerja. Berikut adalah penjelasan mengenai jenis-jenis pengangguran beserta penyebabnya:

a. Jenis Pengangguran Berdasarkan Faktor Penyebab Terjadinya

▷ Pengangguran Konjungtur/Siklis (Cyclical Unemployment)

Pengangguran siklis terjadi akibat fluktuasi dalam siklus ekonomi, seperti resesi atau depresi, yang menyebabkan penurunan permintaan barang dan jasa. Akibatnya, perusahaan mengurangi produksi dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dua faktor utama yang dapat meningkatkan tingkat pengangguran siklis adalah:

- Peningkatan jumlah orang yang kehilangan pekerjaan. Saat ekonomi menurun, banyak perusahaan mengalami penurunan pendapatan sehingga terpaksa mengurangi jumlah karyawan.
- Lamanya waktu untuk mendapatkan pekerjaan baru. Dalam kondisi ekonomi yang lesu, lowongan pekerjaan menjadi terbatas, sehingga pencari kerja membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan pekerjaan baru.

▷ Pengangguran Struktural

Pengangguran struktural terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja akibat perubahan struktur ekonomi. Misalnya, peralihan dari sektor agraris ke sektor industri atau teknologi yang menyebabkan tenaga kerja dengan keterampilan lama tidak lagi dibutuhkan.

Contoh lain adalah perkembangan teknologi yang menggantikan peran manusia dalam proses produksi, sehingga pekerja yang tidak



Adanya gejolak dalam perekonomian akan berpengaruh pada banyaknya pemutusan kontrak kerja - talenta.com.

memiliki keterampilan teknologi menjadi penganggur. Pengangguran jenis ini memerlukan pelatihan ulang atau peningkatan keterampilan agar tenaga kerja dapat beradaptasi dengan kebutuhan pasar.

▷ **Pengangguran Friksional**

Pengangguran friksional terjadi saat individu berada dalam proses transisi antara pekerjaan atau saat baru memasuki angkatan kerja. Misalnya, lulusan baru yang mencari pekerjaan pertama atau pekerja yang meninggalkan pekerjaan lama untuk mencari peluang yang lebih baik.

Jenis pengangguran ini biasanya bersifat sementara dan dianggap normal dalam dinamika pasar tenaga kerja. Faktor-faktor seperti waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan yang sesuai, informasi yang tidak sempurna tentang lowongan pekerjaan, dan preferensi individu mempengaruhi lamanya periode pengangguran friksional.

▷ **Pengangguran Musiman**

Pengangguran musiman terjadi akibat fluktuasi permintaan tenaga kerja yang berkaitan dengan musim atau periode tertentu. Contohnya adalah pekerja di sektor pertanian yang menganggur di luar musim tanam atau panen, atau pekerja pariwisata yang mengalami penurunan pekerjaan saat musim sepi wisatawan.

b. Jenis Pengangguran Berdasarkan Lama Waktu Kerja

▷ **Pengangguran Terbuka (Open Unemployment)**

Pengangguran terbuka adalah situasi di mana individu yang termasuk dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat dihitung dengan rumus:

$$TPT = \left(\frac{\text{Jumlah Penganggur}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \right) \times 100\%$$

Misalnya, jika jumlah penganggur adalah 7 juta orang dan jumlah angkatan kerja adalah 100 juta orang, maka $TPT = \left(\frac{7 \text{ juta}}{100 \text{ juta}} \right) \times 100\% = 7\%$.

▷ **Setengah Menganggur (Underemployment)**

Setengah menganggur merujuk pada individu yang bekerja kurang dari jam kerja penuh yang diinginkan atau bekerja di bawah kapasitas keterampilan mereka. Tingkat setengah pengangguran dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Tingkat Setengah Menganggur} = \left(\frac{\text{Jumlah Setengah Penganggur}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \right) \times 100\%$$

Misalnya, jika terdapat 5 juta setengah penganggur dari 100 juta angkatan kerja, maka tingkat setengah pengangguran $= \left(\frac{5 \text{ juta}}{100 \text{ juta}} \right) \times 100\% = 5\%$.

▷ **Pengangguran Terselubung (Disguised Unemployment)**

Pengangguran terselubung terjadi ketika individu bekerja dalam kapasitas yang tidak optimal atau pekerjaan mereka tidak menambah produktivitas secara signifikan. Misalnya, dalam sebuah usaha keluarga pertanian, terlalu banyak anggota keluarga yang bekerja pada lahan yang sama sehingga tambahan tenaga kerja tidak meningkatkan output secara proporsional.

Sama halnya seorang lulusan universitas yang bekerja di posisi yang tidak memerlukan keterampilan atau pendidikan tinggi yang dimilikinya, sehingga kompetensinya tidak terpakai secara maksimal. Pengangguran jenis ini sulit dideteksi karena secara mereka teknis bekerja, namun kontribusi produktifnya minim.

Memahami berbagai jenis pengangguran dan penyebabnya penting untuk merumuskan kebijakan yang efektif dalam mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

Dampak Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Pengangguran memiliki dampak luas terhadap pembangunan suatu negara, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun psikologis. Tingginya tingkat pengangguran tidak hanya mempengaruhi individu yang kehilangan pekerjaan tetapi juga memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Berkurangnya jumlah tenaga kerja yang produktif akan menghambat peningkatan output nasional, sementara beban negara dalam memberikan bantuan sosial dan subsidi meningkat.

Dampak pengangguran ini dapat dikaji melalui beberapa aspek berikut:

a. Penurunan Pendapatan Nasional dan Pendapatan per Kapita

Pengangguran yang tinggi menyebabkan produktivitas ekonomi suatu negara menurun karena banyak individu yang seharusnya bekerja justru tidak berkontribusi dalam proses produksi barang dan jasa. Hal ini berakibat pada turunnya Produk Domestik Bruto (PDB), yang merupakan indikator utama dalam mengukur pertumbuhan ekonomi nasional. Ketika tenaga kerja tidak terserap secara optimal, maka kapasitas produksi nasional menjadi lebih rendah dari potensi sebenarnya.

Selain itu, penurunan PDB akibat meningkatnya jumlah pengangguran juga berdampak pada pendapatan per kapita, yaitu jumlah rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk suatu negara. Jika jumlah tenaga kerja yang menganggur bertambah, maka jumlah pendapatan yang diperoleh masyarakat secara agregat akan menurun, yang pada akhirnya berkontribusi pada penurunan daya beli masyarakat. Hal ini memicu efek domino terhadap sektor bisnis, karena permintaan terhadap barang dan jasa juga mengalami penurunan.

b. Berkurangnya Penerimaan Negara

Peningkatan jumlah pengangguran juga berdampak langsung pada pendapatan negara, khususnya dalam bentuk pajak. Ketika lebih banyak orang kehilangan pekerjaan, jumlah individu yang membayar pajak penghasilan menjadi lebih sedikit. Selain itu, konsumsi masyarakat yang menurun akibat pendapatan yang lebih rendah juga menyebabkan penurunan penerimaan pajak dari sektor konsumsi, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dampak ini semakin terasa jika pengangguran terjadi dalam skala besar dan berkepanjangan, karena pemerintah harus mencari sumber pendapatan lain atau menambah utang untuk menutupi defisit anggaran.

c. Meningkatnya Beban Psikologis pada Individu dan Masyarakat

Pengangguran tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi tetapi juga menimbulkan tekanan psikologis bagi individu yang terdampak. Kehilangan pekerjaan dapat menyebabkan stres, depresi, dan menurunnya kepercayaan diri seseorang, terutama jika kondisi pengangguran berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Ketidakpastian ekonomi yang dialami oleh individu juga dapat memicu konflik dalam keluarga. Dalam skala yang lebih luas, masyarakat dengan tingkat



Menjadi penganggur dalam waktu yang lama dapat berpengaruh secara psikis disebabkan status sosial yang masih belum jelas - shutterstock.com.2537914373

pengangguran tinggi cenderung memiliki tingkat kriminalitas yang lebih tinggi, akibat dorongan ekonomi dan frustasi sosial.

d. Meningkatnya Beban Sosial bagi Pemerintah dan Masyarakat

Tingginya angka pengangguran juga meningkatkan beban sosial yang harus ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat. Pemerintah perlu mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk program bantuan sosial, seperti subsidi pangan, bantuan tunai, dan program pelatihan kerja bagi pengangguran. Sementara itu, dalam komunitas yang tingkat penganggurannya tinggi, solidaritas sosial dan gotong-royong sering kali menjadi penopang bagi individu yang kehilangan pekerjaan.

Jika pengangguran tidak ditangani dengan baik, dampaknya dapat menjadi beban yang semakin berat bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan meningkatkan kualitas tenaga kerja agar lebih kompetitif di pasar kerja.

Strategi dalam Mengatasi Pengangguran

Untuk mengurangi dampak negatif dari pengangguran, diperlukan kebijakan dan strategi yang tepat sesuai dengan jenis pengangguran yang terjadi. Setiap jenis pengangguran memiliki penyebab yang berbeda, sehingga pendekatan solusinya pun harus disesuaikan. Berikut adalah beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai bentuk pengangguran:

a. Strategi Menanggulangi Pengangguran Siklis

Pengangguran siklis terjadi akibat fluktuasi dalam siklus ekonomi, di mana tingkat pengangguran meningkat selama resesi dan berkurang saat ekonomi tumbuh. Salah satu cara untuk mengatasi pengangguran siklis adalah dengan menerapkan kebijakan fiskal ekspansif, yaitu meningkatkan belanja pemerintah dan menurunkan pajak untuk mendorong konsumsi serta investasi. Ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran, misalnya dengan membangun infrastruktur atau memberikan insentif bagi industri tertentu, permintaan tenaga kerja akan meningkat sehingga menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.

Selain kebijakan fiskal, kebijakan moneter ekspansif juga dapat diterapkan untuk menekan pengangguran siklis. Dengan menurunkan suku bunga, bank sentral dapat mendorong investasi dan konsumsi masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan produksi serta penyerapan tenaga kerja. Kombinasi antara kebijakan fiskal dan moneter yang tepat akan membantu mempercepat pemulihan ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran akibat siklus bisnis.

b. Strategi Menanggulangi Pengangguran Struktural

Pengangguran struktural terjadi ketika perubahan dalam struktur ekonomi menyebabkan ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja. Salah satu solusi utama untuk mengatasi pengangguran jenis ini adalah melalui program pelatihan dan peningkatan keterampilan (*upskilling* dan *reskilling*). Pemerintah, perusahaan, dan institusi pendidikan dapat bekerja sama dalam menyediakan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan industri. Misalnya, jika suatu daerah mengalami peralihan dari sektor manufaktur ke sektor teknologi, maka pekerja yang sebelumnya bekerja di pabrik perlu



Pengrajin gitar. Mendirikan usaha kecil menengah menjadi salah satu langkah strategis dalam mengurangi jumlah pengangguran
-shutterstock.com.1496327291

mendapatkan pelatihan dalam bidang teknologi informasi agar dapat beradaptasi dengan permintaan pasar.

Selain itu, kebijakan mobilitas tenaga kerja juga diperlukan untuk mengurangi jumlah pengangguran struktural. Jika lapangan kerja di suatu daerah sudah tidak sesuai dengan keterampilan tenaga kerja setempat, pemerintah dapat memberikan insentif bagi pekerja yang bersedia berpindah ke daerah lain dengan peluang kerja yang lebih baik. Pembangunan infrastruktur yang merata dan penguatan koneksi antarwilayah juga akan membantu mengurangi pengangguran struktural dengan memperluas akses tenaga kerja ke berbagai sektor industri.

c. Strategi Menanggulangi Pengangguran Friksional

Pengangguran friksional bersifat sementara dan terjadi saat seseorang sedang dalam proses mencari pekerjaan yang lebih sesuai dengan keahliannya. Salah satu cara mengatasi pengangguran ini adalah dengan meningkatkan akses informasi tentang lowongan kerja. Pemerintah dapat mengembangkan sistem informasi pasar tenaga kerja yang lebih efisien, seperti portal pencarian kerja berbasis digital atau bursa kerja yang mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Semakin cepat seseorang menemukan pekerjaan yang sesuai, semakin rendah tingkat pengangguran friksional dalam suatu negara.

Selain itu, fleksibilitas tenaga kerja juga perlu ditingkatkan dengan memperkenalkan program magang, kerja lepas (*freelance*), dan kontrak kerja jangka pendek sebagai jembatan bagi individu yang sedang mencari pekerjaan tetap. Dengan cara ini, pencari kerja tetap dapat memperoleh pengalaman dan penghasilan selama proses transisi ke pekerjaan yang lebih sesuai dengan keterampilan dan minat mereka.

d. Strategi Menanggulangi Pengangguran Musiman

Pengangguran musiman terjadi ketika permintaan tenaga kerja berfluktuasi berdasarkan musim atau periode tertentu. Salah satu cara mengatasi pengangguran jenis ini adalah dengan diversifikasi pekerjaan, yaitu mendorong pekerja untuk memiliki keterampilan tambahan yang dapat digunakan selama masa sepi pekerjaan utama mereka. Misalnya, petani yang hanya bekerja saat musim tanam dapat diberikan pelatihan dalam bidang lain, seperti kerajinan tangan atau usaha kecil, sehingga mereka tetap produktif di luar musim panen. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan sektor swasta dalam menciptakan program kerja sementara (*seasonal employment*) yang dapat membantu mengurangi dampak pengangguran musiman.

Dengan menerapkan strategi yang tepat untuk masing-masing jenis pengangguran, stabilitas ekonomi dan kesejahteraan tenaga kerja dapat lebih terjaga. Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat perlu berkolaborasi agar penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan dapat terwujud.

Contoh Soal

Sebuah negara mengalami peningkatan jumlah lulusan perguruan tinggi yang menganggur setiap tahunnya. Bagaimana fenomena ini dapat dikategorikan dalam jenis pengangguran? Analisislah penyebab dan solusi untuk mengatasi permasalahan ini!

Pembahasan:

Fenomena ini dapat dikategorikan sebagai pengangguran struktural dan pengangguran friksional. Pengangguran struktural terjadi karena ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan dengan kebutuhan pasar kerja, sedangkan pengangguran friksional terjadi karena lulusan membutuhkan waktu untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai.

Penyebab utama dari meningkatnya jumlah lulusan menganggur adalah kurangnya keselarasan antara sistem pendidikan dan kebutuhan industri, minimnya kesempatan kerja, serta persaingan yang ketat dalam pasar tenaga kerja.

Solusi untuk mengatasi permasalahan ini antara lain:

- 1) Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi. Program pelatihan berbasis industri dapat memperkecil kesenjangan antara keterampilan lulusan dan kebutuhan dunia kerja.
- 2) Meningkatkan wirausaha dan ekonomi kreatif. Pemerintah dan sektor swasta perlu memberikan dukungan kepada lulusan untuk menciptakan lapangan kerja melalui wirausaha.
- 3) Optimalisasi bursa kerja dan teknologi digital. Platform pencarian kerja yang lebih efektif dapat mempercepat proses pencocokan antara pencari kerja dan perusahaan.

Fakta Unik Seputar Ekonomi

Customer Service dengan Chatbot di E-Commerce

Banyak platform e-commerce di Indonesia, seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee, sudah mulai menggunakan chatbot berbasis AI untuk melayani pertanyaan pelanggan. Sebagai contoh, Tokopedia menggunakan chatbot bernama "Tokopedia Assistant" untuk membantu menjawab pertanyaan pelanggan secara otomatis, mengurangi beban tim customer service manusia. Hal ini juga terbukti mengurangi waktu tunggu respon dan meningkatkan efisiensi operasional.

Kira-kira di sektor pekerjaan mana lagi, manusia akan digantikan oleh AI?



Chatbot -
shutterstock.com.
2288372371

Rangkuman

- ▷ Ketenagakerjaan merupakan aspek penting dalam perekonomian suatu negara, karena jumlah tenaga kerja yang tersedia dan terserap dalam dunia kerja akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
- ▷ Struktur tenaga kerja di Indonesia masih didominasi oleh sektor informal, yang menunjukkan perlunya peningkatan kebijakan perlindungan sosial dan regulasi ketenagakerjaan yang lebih inklusif.
- ▷ Sistem upah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang mencakup penetapan upah minimum berdasarkan provinsi dan kabupaten/kota, serta mempertimbangkan kebutuhan hidup layak dan produktivitas tenaga kerja.
- ▷ Terdapat berbagai jenis pengupahan, seperti upah berdasarkan satuan waktu (harian, bulanan) dan satuan hasil (borongan atau komisi), yang diterapkan sesuai dengan karakteristik pekerjaan dan industri masing-masing.
- ▷ Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditetapkan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan, dengan mempertimbangkan faktor daya beli, pertumbuhan ekonomi, serta tingkat inflasi.
- ▷ Pengangguran tetap menjadi tantangan dalam pembangunan ekonomi Indonesia, dengan tingkat pengangguran terbuka yang masih fluktuatif dan didominasi oleh lulusan SMK serta perguruan tinggi.
- ▷ Jenis pengangguran yang terjadi dapat diklasifikasikan berdasarkan penyebabnya, seperti pengangguran siklis, struktural, friksional, dan musiman, serta berdasarkan lama waktu kerja, seperti pengangguran terbuka, setengah menganggur, dan pengangguran terselubung.
- ▷ Dampak pengangguran terhadap perekonomian meliputi penurunan pendapatan nasional, berkurangnya penerimaan negara dari pajak, meningkatnya beban sosial pemerintah, serta efek psikologis pada individu yang menganggur.
- ▷ Berbagai strategi dapat diterapkan untuk mengatasi pengangguran, seperti kebijakan fiskal dan moneter untuk pengangguran siklis, pelatihan keterampilan bagi pengangguran struktural, penyediaan informasi kerja bagi pengangguran friksional, serta diversifikasi pekerjaan bagi pengangguran musiman.
- ▷ Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan sistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan, dengan mengedepankan kebijakan upah yang adil serta menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi seluruh angkatan kerja..

Latihan Soal

1. Salah satu faktor yang menyebabkan jumlah angkatan kerja meningkat setiap tahun di Indonesia adalah...
 - A. Meningkatnya usia harapan hidup
 - B. Penurunan tingkat pendidikan
 - C. Berkurangnya jumlah penduduk produktif
 - D. Rendahnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja
 - E. Menurunnya tingkat urbanisasi
2. Berikut ini yang termasuk dalam kategori tenaga kerja formal adalah...
 - A. Petani subsisten
 - B. Tukang ojek online
 - C. Karyawan bank
 - D. Pedagang asongan
 - E. Pekerja rumahan
3. Dewan Pengupahan memiliki peran utama dalam...
 - A. Menentukan kebijakan ekspor dan impor tenaga kerja
 - B. Memberikan rekomendasi terkait upah minimum kepada pemerintah
 - C. Mengatur rekrutmen tenaga kerja asing
 - D. Menghitung jumlah penduduk usia kerja
 - E. Menyediakan dana pensiun bagi pekerja
4. Jika seorang pekerja mendapatkan gaji berdasarkan jumlah barang yang dihasilkan, maka sistem pengupahan yang diterapkan adalah...
 - A. Upah bulanan
 - B. Upah harian
 - C. Upah borongan
 - D. Upah insentif
 - E. Upah tetap
5. Dalam sistem pengupahan di Indonesia, UMP ditetapkan oleh...
 - A. Bupati/Walikota
 - B. Menteri Ketenagakerjaan
 - C. Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota
 - D. Gubernur
 - E. Presiden
6. Perbedaan utama antara Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terletak pada...
 - A. Besaran tunjangan yang diterima pekerja
 - B. Tingkat pendidikan yang disyaratkan untuk mendapatkan upah
 - C. Wilayah cakupan dalam penerapannya
 - D. Jenis sektor industri yang menerima upah tersebut
 - E. Kebijakan perusahaan dalam menentukan upah

7. Jenis pengangguran yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri disebut...
 - A. Pengangguran friksional
 - B. Pengangguran konjungtural
 - C. Pengangguran musiman
 - D. Pengangguran terselubung
 - E. Pengangguran struktural
8. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat dihitung dengan rumus...
 - A. (Jumlah angkatan kerja / jumlah penganggur) × 100%
 - B. (Jumlah penduduk usia kerja / jumlah angkatan kerja) × 100%
 - C. (Jumlah penganggur / jumlah angkatan kerja) × 100%
 - D. (Jumlah tenaga kerja penuh / jumlah setengah penganggur) × 100%
 - E. (Jumlah pekerja informal / jumlah pekerja formal) × 100%

**Akses latihan soal
lainnya di sini yuk!**



Referensi

- Badan Pusat Statistik. (2024). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,91 persen dan rata-rata upah buruh sebesar 3,04 juta rupiah per bulan. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2024/11/05/2373/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-91-persen-.html>
- Badan Pusat Statistik. (2023). Keadaan ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2023. <https://www.bps.go.id/publication/2023/11/05/keadaan-ketenagakerjaan-indonesia.html>
- Badan Pusat Statistik. (2023). Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2023. <https://www.bps.go.id>
- Blanchard, O., & Johnson, D. R. (2017). Macroeconomics (7th ed.). Pearson Education.
- Boeri, T., & van Ours, J. (2021). The economics of imperfect labor markets (3rd ed.). Princeton University Press.
- BPJS Ketenagakerjaan. (2022). Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai perlindungan bagi pekerja. <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id>
- International Labour Organization (ILO). (2022). World employment and social outlook 2022: Trends and challenges. Geneva: ILO Publications.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161909/pp-no-36-tahun-2021>
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2024). Data upah minimum provinsi (UMP) 2024. <https://kemnaker.go.id>
- Keputusan Presiden Republik Indonesia. (2004). Keputusan Presiden No. 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/56008/keppres-no-107-tahun-2004>
- Lipsey, R. G., & Chrystal, K. A. (2020). Economics (14th ed.). Oxford University Press.
- Mankiw, N. G. (2021). Principles of economics (9th ed.). Cengage Learning.
- Soeprihanto, J. (2017). Manajemen sumber daya manusia: Konsep dan aplikasi dalam dunia kerja. Gramedia Pustaka Utama.
- Sukirno, S. (2016). Mikroekonomi: Teori pengantar (Edisi ke-3). Rajawali Pers.
- Suryana, Y. (2020). Ekonomi sumber daya manusia dalam perspektif pembangunan. Salemba Empat.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2019). Economic development (13th ed.). Pearson Education.



Consumer

Price

Index

BAB 4: PERMINTAAN DAN PENAWARAN UANG, INDEKS HARGA, DAN INFLASI

Karakter Pelajar Pancasila

Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlaq mulia: Jujur dalam ekonomi.

Bergotong royong: Peduli terhadap dampak inflasi.

Bernalar kritis: Memahami konsep ekonomi moneter.



Kata Kunci: Permintaan Uang, Penawaran Uang, Indeks Harga, Inflasi, Perubahan Harga, Kurva Permintaan, Kurva Penawaran.

Tujuan Pembelajaran: Mengurai Konsep Permintaan Uang, Penawaran Uang, Indeks Harga, dan Inflasi

1. Menguraikan Berbagai Teori Mengenai Permintaan Uang

- ▷ Memahami dan menjelaskan konsep dasar permintaan uang.
- ▷ Menjelaskan teori-teori klasik tentang permintaan uang.

2. Menganalisis Teori yang Menjelaskan Penawaran Uang

- ▷ Memahami dan menjelaskan konsep dasar penawaran uang.
- ▷ Menjelaskan teori-teori klasik tentang penawaran uang.

3. Mengidentifikasi dan Menguraikan Konsep Indeks Harga

- ▷ Memahami dan menjelaskan bagaimana perubahan harga terjadi.
- ▷ Menjelaskan tujuan utama dalam perhitungan indeks harga.

- ▷ Mengklasifikasikan berbagai jenis indeks harga yang ada.
- ▷ Melakukan perhitungan indeks harga secara sistematis.

4. Memahami dan Menguraikan Konsep Inflasi

- ▷ Memahami dan menjelaskan definisi inflasi.
- ▷ Mengkaji berbagai faktor yang menyebabkan inflasi.
- ▷ Melakukan perhitungan inflasi berdasarkan data yang tersedia.
- ▷ Mengidentifikasi serta mengelompokkan berbagai jenis inflasi.
- ▷ Menganalisis dampak inflasi terhadap perekonomian.
- ▷ Mengevaluasi serta menganalisis berbagai strategi dalam menangani inflasi.



F I T R I



1. Teori Permintaan dan Penawaran Uang

Teori Permintaan Uang

a. Konsep Dasar Permintaan Uang

Permintaan uang merujuk pada keinginan individu maupun perusahaan untuk menyimpan sebagian kekayaannya dalam bentuk uang tunai atau aset likuid lainnya. Permintaan uang muncul karena adanya kebutuhan untuk melakukan transaksi, berjaga-jaga, dan melakukan investasi. Faktor-faktor seperti tingkat pendapatan, suku bunga, serta ekspektasi inflasi turut mempengaruhi jumlah uang yang diminta dalam suatu perekonomian.

b. Teori Permintaan Uang

Para ekonom mengembangkan berbagai teori untuk menjelaskan permintaan uang dalam suatu perekonomian. Beberapa teori tersebut berasal dari pendekatan klasik hingga teori yang lebih modern, seperti preferensi likuiditas Keynes. Setiap teori menawarkan perspektif yang berbeda mengenai bagaimana individu dan perusahaan menentukan jumlah uang yang ingin mereka pegang.

▷ Teori Permintaan Uang Klasik

Teori klasik tentang permintaan uang menekankan bahwa uang berfungsi sebagai alat tukar yang netral terhadap perekonomian. Pemikiran klasik menyatakan bahwa jumlah uang yang dibutuhkan dalam suatu perekonomian berkaitan erat dengan volume transaksi yang dilakukan masyarakat. **David Ricardo**, salah satu pelopor teori kuantitas uang menyatakan bahwa nilai uang dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar dalam suatu sistem ekonomi.

Teori ini kemudian dikembangkan dengan formula matematis sebagai berikut:



Transaksi dengan uang kertas menciptakan permintaan terhadap uang - pinhome.id

$$MV = PT$$

Di mana:

M = jumlah uang beredar

V = kecepatan peredaran uang

P = tingkat harga

T = volume transaksi

Teori kuantitas kemudian disempurnakan oleh **Irving Fisher** yang menambahkan perspektif bahwa kecepatan peredaran uang cenderung stabil dalam jangka pendek, sehingga jumlah uang beredar berpengaruh langsung terhadap tingkat harga. Dengan demikian, jika jumlah uang meningkat tanpa adanya peningkatan jumlah barang dan jasa, maka inflasi akan terjadi.

Berikut ini dideskripsikan formula matematisnya:

$$MV = PQ$$

Di mana **Q** melambangkan jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu ekonomi.

Selanjutnya, **Alfred Marshall** mengemukakan teori persediaan kas (*cash balance theory*), yang berfokus pada alasan individu menyimpan uang dalam kehidupan sehari-hari. Marshall berpendapat bahwa uang bukan hanya disimpan untuk tujuan investasi atau spekulasi, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari. Dalam hal ini, individu menyimpan uang agar dapat dengan mudah melakukan pembelian barang dan jasa.

Marshall juga menyatakan bahwa permintaan uang untuk transaksi ini cenderung stabil seiring dengan pendapatan. Artinya, ketika pendapatan meningkat, individu akan meningkatkan jumlah uang yang mereka simpan untuk kebutuhan transaksi sehari-hari, tetapi hubungan antara permintaan uang dan pendapatan ini biasanya lebih linier, tidak terlalu dipengaruhi oleh fluktuasi jangka pendek.

Teori ini dirumuskan secara matematis sebagai berikut:

$$M_d = k P Y$$

Di mana:

$$\begin{array}{ll} M_d = \text{permintaan uang} & k = \text{proporsi pendapatan yang disimpan dalam bentuk uang} \\ P = \text{tingkat harga} & Y = \text{pendapatan nasional} \end{array}$$

▷ Teori Preferensi Likuiditas

Teori ini dikemukakan oleh **John Maynard Keynes** dan menyatakan bahwa permintaan uang tidak hanya untuk transaksi, tetapi juga karena motif berjaga-jaga dan spekulasi. Keynes membagi permintaan uang menjadi tiga motif utama.

- **Motif transaksi (*transaction motive*)** yang berkaitan dengan kebutuhan individu maupun bisnis untuk melakukan pembayaran atas barang dan jasa. Semakin besar pendapatan seseorang, semakin besar pula jumlah uang yang diperlukan untuk transaksi. Secara matematis, motif transaksi dapat dirumuskan sebagai:

$$M_t = k Y$$

Di mana M_t adalah permintaan uang untuk transaksi, k adalah proporsi pendapatan yang disimpan dalam bentuk uang tunai, dan Y adalah pendapatan nasional.

- **Motif berjaga-jaga (*precautionary motive*)** berkaitan dengan keinginan individu untuk menyimpan uang guna mengantisipasi ketidakpastian ekonomi, seperti keadaan darurat atau peluang bisnis yang tiba-tiba muncul. Misalnya, seorang pengusaha mungkin menyimpan dana tambahan untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan baku. Secara matematis, permintaan uang untuk motif berjaga-jaga dapat dituliskan sebagai:

$$M_p = k' Y$$

Di mana M_p adalah permintaan uang untuk berjaga-jaga, dan k' adalah koefisien yang mencerminkan persentase pendapatan yang dialokasikan untuk tabungan berjaga-jaga.

- **Motif spekulasi (*speculative motive*)** muncul karena individu ingin memperoleh keuntungan dari perubahan suku bunga dan harga aset. Misalnya, seorang investor bisa menyimpan uang tunai untuk membeli saham saat harga rendah dan menjualnya ketika harga naik. Fungsi matematisnya adalah:

$$M_s = f(r)$$

Di mana M_s adalah permintaan uang untuk spekulasi, dan r adalah tingkat suku bunga.

Jika suku bunga rendah, individu lebih cenderung menahan uang dalam bentuk tunai karena mereka tidak tertarik menyimpan uang dalam aset berbunga rendah. Sebaliknya, jika suku bunga tinggi, orang akan lebih memilih untuk menginvestasikan uangnya. Secara lengkap, persamaan preferensi likuiditas Keynes adalah:

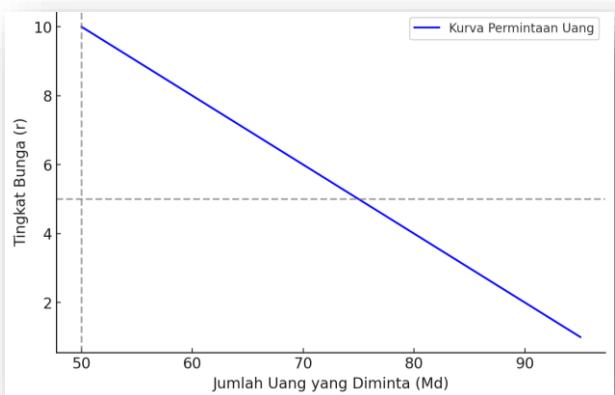
$$M_d = M_t + M_p + M_s$$

c. Kurva Permintaan Uang

Kurva permintaan uang menggambarkan hubungan antara tingkat suku bunga dan jumlah uang yang diminta dalam suatu perekonomian. Permintaan uang cenderung menurun ketika suku bunga naik karena individu lebih tertarik untuk menyimpan uangnya dalam bentuk aset finansial berbunga. Persamaan matematis untuk jumlah uang yang diminta dalam bentuk aset adalah:

$$M_d = L(Y, r)$$

Di mana L adalah fungsi permintaan uang yang bergantung pada pendapatan (Y) dan tingkat bunga (r). Berikut ini dideskripsikan kurva permintaan uang.



Kurva Permintaan Uang - Diolah Penerbit

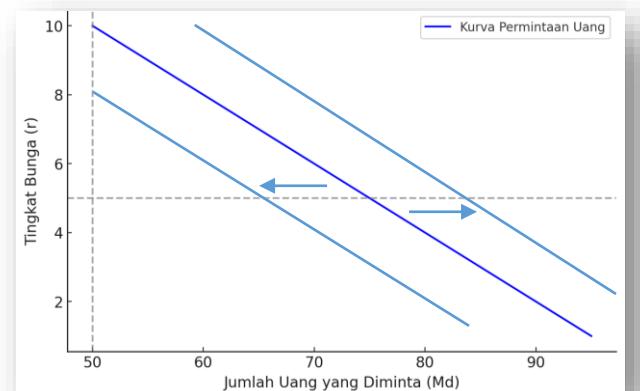
Kurva di atas menunjukkan hubungan antara tingkat bunga (r) dan jumlah uang yang diminta (M_d). Seperti yang dapat diamati, semakin tinggi tingkat bunga, semakin rendah jumlah uang yang diminta, karena masyarakat lebih cenderung mengalihkan dana mereka ke aset berbunga tinggi. Sebaliknya, ketika tingkat bunga rendah, permintaan uang meningkat karena insentif untuk menyimpan uang dalam bentuk tunai lebih besar.

d. Pergeseran Kurva Permintaan Uang

Kurva permintaan uang dapat bergeser ke kiri atau ke kanan tergantung pada faktor selain tingkat suku bunga. Faktor pertama yang menyebabkan pergeseran adalah nilai kekayaan masyarakat. Jika kekayaan masyarakat meningkat, mereka lebih cenderung menyimpan uang dalam bentuk aset, sehingga permintaan uang menurun dan kurva permintaan uang bergeser ke kiri. Sebaliknya, jika terjadi ketidakpastian ekonomi, masyarakat lebih memilih menyimpan uang dalam bentuk tunai, sehingga kurva bergeser ke kanan.

Faktor kedua adalah perubahan pendapatan nasional. Jika pendapatan nasional meningkat, maka kebutuhan transaksi juga meningkat, yang menyebabkan permintaan uang bertambah dan kurva

permintaan uang bergeser ke kanan. Sebaliknya, saat terjadi resesi, pendapatan menurun dan permintaan uang pun berkurang, sehingga kurva bergeser ke kiri.



Kurva Permintaan Uang - Diolah Penerbit

Ketika kurva bergeser ke kiri, jumlah uang yang diminta berkurang karena masyarakat lebih memilih aset finansial. Sebaliknya, jika kurva bergeser ke kanan, masyarakat lebih memilih menyimpan uang dalam bentuk tunai.

Dalam praktiknya, motif berjaga-jaga sering menjadi alasan utama seseorang menyimpan uang, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Hal ini menyebabkan permintaan uang lebih elastis terhadap perubahan faktor eksternal seperti ketidakpastian ekonomi dan fluktuasi harga barang.

Teori Penawaran Uang

a. Konsep Dasar Penawaran Uang

Penawaran uang merujuk pada jumlah uang yang tersedia dalam perekonomian dan dapat digunakan oleh masyarakat untuk transaksi serta investasi. Menurut Solikin dan Suseno dalam bukunya yang berjudul "Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian", penawaran uang dikendalikan oleh otoritas moneter, seperti bank sentral, melalui kebijakan moneter. Bank sentral mengatur jumlah uang yang beredar untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

▷ **Uang Beredar dalam Arti Sempit (M1)**

Uang beredar dalam arti sempit mencakup instrumen yang memiliki likuiditas tinggi, yaitu uang kartal (kertas dan logam) serta uang giral (saldo rekening di bank yang dapat digunakan untuk pembayaran langsung). M1 sering dijadikan ukuran dasar dalam mengukur jumlah uang yang beredar di masyarakat karena mencerminkan alat pembayaran yang paling cepat digunakan dalam transaksi ekonomi.

▷ **Uang Beredar dalam Arti Luas (M2, M3, dan L)**

Uang beredar dalam arti luas mencakup M1 serta berbagai bentuk simpanan lain yang lebih sulit dicairkan dibandingkan uang giral dan kartal. Dalam buku Prinsip-Prinsip Ekonomi karya Case dan Fair, dijelaskan bahwa jumlah uang yang beredar lebih luas daripada M2. Oleh karena itu, terdapat beberapa kategori tambahan:

- **M2:** Mencakup M1 ditambah dengan tabungan dan deposito berjangka dalam jangka pendek.

- **M3:** Mencakup M2 serta berbagai bentuk aset keuangan lainnya, seperti deposito berjangka yang lebih panjang dan surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan.
- **L (Likuiditas Total):** Merupakan ukuran penawaran uang yang paling luas, mencakup M3 ditambah aset keuangan lain yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi uang tunai.

Berikut adalah persamaan matematis dari masing-masing komponen penawaran uang:

$$M1 = \text{uang kartal} + \text{uang giral}$$

$$M2 = M1 + \text{deposito berjangka} + \text{tabungan}$$

$$M3 = M2 + \text{sertifikat deposito} + \text{instrumen pasar uang}$$

$$L = M3 + \text{aset finansial likuid lainnya}$$

Berikut adalah diagram untuk menggambarkan bagaimana komponen penawaran uang tersusun berdasarkan tingkat likuiditasnya.

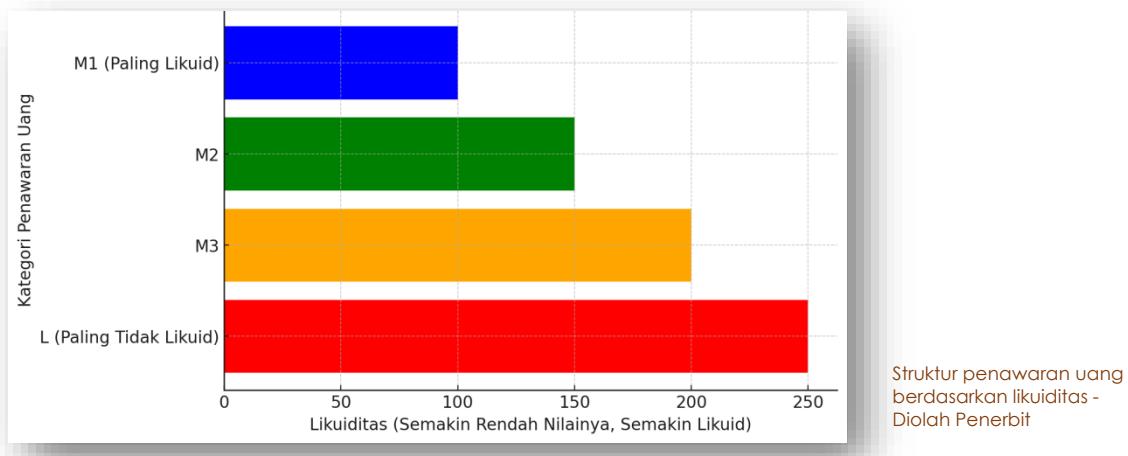
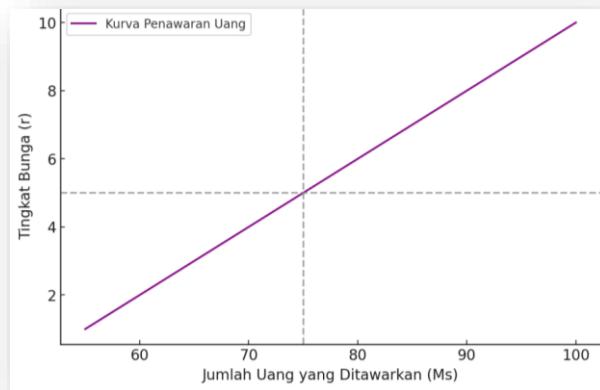


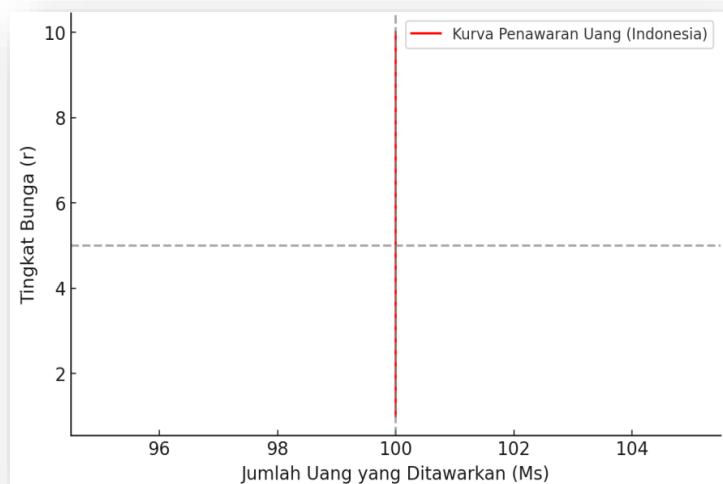
Diagram di atas menunjukkan tingkat likuiditas dari masing-masing komponen penawaran uang. Klasifikasi M1 merupakan aset yang paling likuid karena terdiri dari uang kartal dan uang giral yang dapat langsung digunakan untuk transaksi. Berikutnya, M2 yang mencakup M1 serta tabungan dan deposito berjangka yang sedikit kurang likuid. Lalu dilanjut dengan M3 yang memiliki likuiditas lebih rendah karena mencakup instrumen keuangan seperti sertifikat deposito. Dan terakhir ialah L yang paling tidak likuid karena mencakup berbagai aset finansial yang membutuhkan waktu lebih lama untuk dikonversi menjadi uang tunai.

b. Kurva Penawaran Uang

Kurva penawaran uang menggambarkan hubungan antara jumlah uang yang beredar dengan tingkat suku bunga. Dalam teori ekonomi, penawaran uang memiliki slope positif, artinya semakin tinggi tingkat bunga, semakin besar jumlah uang yang beredar.

Kurva di samping menunjukkan kurva penawaran uang dengan slope positif. Seiring dengan meningkatnya tingkat bunga, jumlah uang yang beredar juga meningkat karena bank cenderung menyalurkan lebih banyak kredit dan meningkatkan likuiditas pasar.





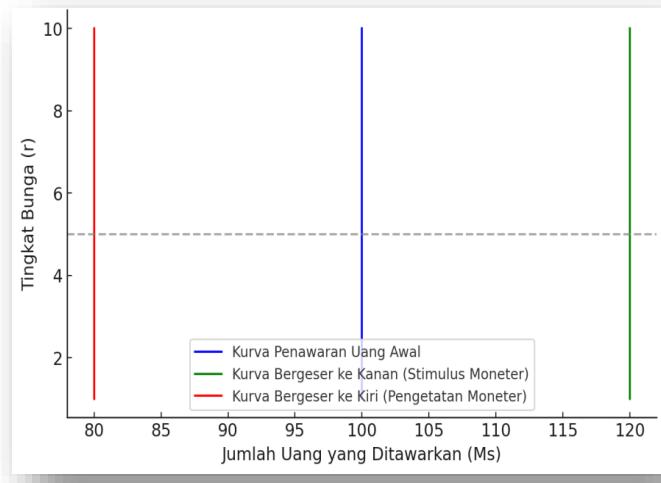
Kurva Penawaran Uang Tegak Lurus di Indonesia - Diolah

beredar tidak ditentukan oleh tingkat bunga, melainkan oleh kebijakan moneter yang dikendalikan oleh bank sentral. Dengan kata lain, otoritas moneter menentukan jumlah uang beredar secara langsung berdasarkan tujuan ekonomi, seperti pengendalian inflasi dan stabilitas ekonomi.

c. Pergeseran Kurva Penawaran Uang

Penawaran uang dapat mengalami pergeseran akibat intervensi pemerintah dalam bentuk kebijakan moneter. Salah satu faktor yang mempengaruhi pergeseran ini adalah tingkat bunga. Sebagai contoh, ketika inflasi meningkat, pemerintah dapat memutuskan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan menaikkan suku bunga atau menarik likuiditas dari pasar melalui kebijakan moneter ketat. Hal ini menyebabkan kurva penawaran uang bergeser ke kiri, yang berarti jumlah uang yang tersedia dalam perekonomian berkurang.

Sebaliknya, jika pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi, bank sentral dapat meningkatkan jumlah uang yang beredar dengan menurunkan suku bunga atau membeli surat berharga dari pasar. Kebijakan ini menyebabkan kurva penawaran uang bergeser ke kanan, yang berarti lebih banyak uang tersedia di perekonomian. Berikut ini ialah ilustrasi untuk mendeskripsikan pergeseran kurva penawaran uang.



Kurva Pergeseran Penawaran Uang - Diolah Penerbit

Namun, dalam praktiknya di Indonesia, kurva penawaran uang bersifat vertikal atau tegak lurus, karena jumlah uang yang beredar tidak ditentukan oleh tingkat bunga, melainkan oleh kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral. Berikut ini adalah ilustrasi kurva penawaran uang yang tegak lurus sesuai kondisi di Indonesia.

Kurva di samping menunjukkan kurva penawaran uang yang tegak lurus seperti yang berlaku di Indonesia. Hal ini terjadi karena jumlah uang yang

bergeser tidak ditentukan oleh tingkat bunga, melainkan oleh kebijakan moneter, dimana kurva biru (awal) menunjukkan jumlah uang yang beredar sebelum adanya kebijakan moneter.

Kurva hijau (bergeser ke kanan) terjadi ketika pemerintah meningkatkan jumlah uang beredar, misalnya dengan menurunkan suku bunga atau membeli surat berharga di pasar terbuka. Adapun kurva merah (bergeser ke kiri) terjadi ketika pemerintah mengurangi jumlah uang beredar.

Sebagai ilustrasi, ketika inflasi meningkat, pemerintah akan mengurangi jumlah uang beredar untuk menekan lonjakan harga, sehingga kurva bergeser ke kiri. Sebaliknya, ketika terjadi perlambatan ekonomi, pemerintah dapat meningkatkan likuiditas guna mendorong konsumsi dan investasi, sehingga kurva bergeser ke kanan.

Faktor Penentu dalam Dinamika Permintaan dan Penawaran Uang

a. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Uang

Selain tiga motif utama yang diungkapkan oleh Keynes, terdapat beberapa faktor lain yang juga mempengaruhi permintaan uang dalam perekonomian. Faktor-faktor ini mencakup berbagai kondisi ekonomi yang mempengaruhi keinginan individu maupun perusahaan untuk menyimpan atau menggunakan uang dalam bentuk tunai.

▷ **Pengeluaran Konsumen**

Pengeluaran konsumen adalah salah satu faktor yang memengaruhi permintaan uang. Ketika konsumen meningkatkan pengeluaran untuk konsumsi, mereka cenderung membutuhkan lebih banyak uang untuk transaksi sehari-hari. Peningkatan pengeluaran ini biasanya terjadi dalam kondisi perekonomian yang berkembang atau saat tingkat pendapatan masyarakat meningkat. Sebaliknya, ketika pengeluaran konsumen menurun karena ketidakpastian ekonomi atau penurunan pendapatan, permintaan uang akan berkurang.



Peningkatan konsumsi berdampak pada peningkatan kebutuhan uang - shutterstock.com.626081396

▷ **Biaya Transaksi Saham dan Obligasi**

Biaya transaksi saham dan obligasi juga memengaruhi permintaan uang. Semakin tinggi biaya untuk membeli dan menjual saham atau obligasi, semakin besar kemungkinan individu atau perusahaan akan menahan lebih banyak uang tunai untuk menghindari biaya transaksi yang tinggi. Dalam kondisi pasar yang volatil, investor lebih cenderung menyimpan uang dalam bentuk tunai untuk mengantisipasi perubahan harga yang cepat, yang akan mengurangi permintaan uang untuk tujuan investasi.

▷ **Perubahan Harga Secara Umum**

Perubahan harga secara umum (inflasi) mempengaruhi permintaan uang dalam perekonomian. Ketika harga barang dan jasa meningkat, konsumen dan perusahaan akan membutuhkan lebih banyak uang untuk membeli barang dan jasa yang sama, yang mengarah pada peningkatan permintaan uang. Sebaliknya, jika harga-harga turun, maka permintaan uang cenderung berkurang karena daya beli masyarakat meningkat. Perubahan harga ini juga mencerminkan tingkat inflasi yang terjadi di suatu negara.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penawaran Uang

Penawaran uang dalam perekonomian dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan kebijakan moneter dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Pemerintah dan bank sentral memainkan peran utama dalam mengatur jumlah uang yang beredar melalui instrumen kebijakan moneter.

▷ **Tingkat Bunga**

Tingkat bunga memiliki pengaruh besar terhadap penawaran uang. Ketika tingkat bunga rendah, bank cenderung memberikan lebih banyak pinjaman karena biaya pinjaman lebih murah. Hal ini akan meningkatkan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Sebaliknya, ketika tingkat bunga tinggi, bank cenderung mengurangi pemberian pinjaman karena biaya pinjaman yang lebih mahal, yang mengarah pada penurunan jumlah uang yang beredar.

▷ **Tingkat Inflasi**

Tingkat inflasi juga mempengaruhi penawaran uang. Ketika inflasi tinggi, bank sentral cenderung melakukan pengetatan kebijakan moneter dengan mengurangi jumlah uang yang beredar untuk menanggulangi lonjakan harga. Sebaliknya, jika inflasi rendah, bank sentral bisa memutuskan untuk memperbanyak jumlah uang yang beredar guna mendorong perekonomian.

▷ **Tingkat Produksi dan Pendapatan Nasional**

Tingkat produksi dan pendapatan nasional mempengaruhi jumlah uang yang dibutuhkan dalam perekonomian. Ketika produksi dan pendapatan nasional meningkat, permintaan terhadap barang dan jasa juga meningkat, yang pada gilirannya meningkatkan kebutuhan akan uang untuk transaksi. Oleh karena itu, jumlah uang yang beredar dalam perekonomian akan meningkat seiring dengan pertumbuhan produksi dan pendapatan.

▷ **Kondisi Kesehatan Dunia Perbankan**

Kondisi kesehatan dunia perbankan, yang dipengaruhi oleh kebijakan bank sentral, berperan penting dalam menentukan penawaran uang. *Reserve requirement* atau kewajiban cadangan minimum yang harus dimiliki oleh bank juga mempengaruhi kemampuan bank untuk meminjamkan uang. Jika bank sentral menurunkan kewajiban cadangan, bank dapat meminjamkan lebih banyak uang, yang menyebabkan peningkatan jumlah uang yang beredar. Sebaliknya, jika kewajiban cadangan dinaikkan, bank akan memiliki lebih sedikit uang untuk dipinjamkan, yang mengurangi jumlah uang yang beredar.

▷ **Nilai Tukar Rupiah**

Nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing juga mempengaruhi penawaran uang dalam perekonomian. Ketika nilai tukar rupiah melemah, impor barang menjadi lebih mahal, dan hal ini dapat menyebabkan bank sentral untuk menyesuaikan jumlah uang yang beredar guna menjaga stabilitas ekonomi. Sebaliknya, ketika nilai tukar rupiah menguat, bank sentral mungkin mengurangi jumlah uang beredar untuk menghindari inflasi. Fluktuasi nilai tukar ini memengaruhi kebijakan moneter yang diterapkan untuk mengatur jumlah uang yang beredar.

Contoh Soal

Pada tahun 2023, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menambah jumlah uang beredar dalam perekonomian sebesar 10% untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, pada saat yang sama, inflasi meningkat sebesar 5%. Jelaskan bagaimana keputusan pemerintah ini dapat memengaruhi permintaan dan penawaran uang di Indonesia. Selain itu, sebutkan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi permintaan dan penawaran uang!

Pembahasan:

Keputusan pemerintah untuk menambah jumlah uang beredar sebesar 10% akan menyebabkan penawaran uang meningkat. Dalam teori penawaran uang, hal ini berarti jumlah uang yang beredar dalam perekonomian menjadi lebih banyak, yang dapat memperlebar likuiditas dan mempermudah akses kredit. Namun, keputusan ini perlu dikaji dalam konteks inflasi yang meningkat sebesar 5%.

Kenaikan inflasi akan meningkatkan permintaan uang karena harga barang dan jasa lebih tinggi, sehingga masyarakat membutuhkan lebih banyak uang untuk transaksi. Dengan kata lain, meskipun ada peningkatan penawaran uang, jika inflasi tinggi, permintaan uang juga akan meningkat untuk menjaga daya beli. Selain itu, faktor-faktor lain yang memengaruhi permintaan dan penawaran uang meliputi 3 aspek, yaitu tingkat bunga, pendapatan nasional, dan kondisi perekonomian global.

- 1) Tingkat bunga:** Suku bunga yang tinggi akan cenderung mengurangi jumlah uang yang beredar, karena orang lebih tertarik untuk menabung atau berinvestasi dibandingkan menyimpan uang dalam bentuk tunai.
- 2) Pendapatan nasional:** Jika pendapatan masyarakat meningkat, permintaan uang untuk transaksi juga akan bertambah, sehingga penawaran uang perlu disesuaikan untuk mendukung transaksi ekonomi yang lebih tinggi.
- 3) Kondisi perekonomian global:** Ketidakpastian global atau krisis ekonomi dapat menyebabkan masyarakat menambah cadangan uang tunai untuk berjaga-jaga, yang memengaruhi permintaan uang.

Fakta Unik Seputar Ekonomi

E-Money dan Pengaruhnya terhadap Permintaan Uang

Dengan semakin berkembangnya teknologi, uang elektronik (seperti dompet digital atau e-wallet dan cryptocurrency) mulai mengubah pola permintaan uang. Masyarakat kini tidak hanya mengandalkan uang tunai untuk transaksi, tetapi juga menggunakan melalui platform digital. Hal ini mempengaruhi pengukuran permintaan uang tradisional, karena transaksi dapat terjadi tanpa melibatkan uang fisik, yang berdampak pada kebijakan moneter.



Bitcoin, Cryptocurrency. - shutterstock.com.2020229726



2. Indeks Harga

Pengertian dan Jenis-Jenis Indeks Harga

a. Perubahan Harga

Perubahan harga merujuk pada fluktuasi harga barang dan jasa dalam perekonomian dari waktu ke waktu. Perubahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, seperti permintaan, penawaran, dan biaya produksi. Dalam konteks ini, perubahan harga dapat menjadi indikator penting dalam menganalisis kondisi ekonomi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

▷ **Permintaan (Demand) yang Fluktuatif**

Permintaan yang fluktuatif atau berubah terjadi ketika ada perubahan dalam jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Jika permintaan meningkat, harga cenderung naik karena konsumen bersedia membayar lebih untuk mendapatkan barang atau jasa tersebut. Sebaliknya, jika permintaan menurun, harga akan cenderung turun pula. Faktor yang mempengaruhi perubahan permintaan termasuk perubahan pendapatan, preferensi konsumen, atau adanya substitusi barang yang lebih murah.

▷ **Penawaran (Supply) yang Fluktuatif**

Penawaran yang fluktuatif atau berubah terjadi ketika ada perubahan dalam jumlah barang atau jasa yang tersedia untuk dijual di pasar pada tingkat harga tertentu. Jika penawaran meningkat, harga akan cenderung turun karena lebih banyak barang tersedia, yang memungkinkan konsumen untuk memilih dengan harga lebih rendah. Sebaliknya, jika penawaran menurun, harga akan cenderung naik. Perubahan penawaran seringkali dipengaruhi oleh kondisi cuaca, teknologi, atau biaya produksi.

▷ **Perubahan Biaya Produksi**

Perubahan biaya produksi dapat mempengaruhi harga barang dan jasa yang ditawarkan di pasar. Jika biaya produksi naik, seperti harga bahan baku atau upah pekerja meningkat, produsen mungkin akan menaikkan harga jual barang dan jasa untuk mempertahankan margin keuntungan. Sebaliknya, jika biaya produksi turun, harga barang dan jasa bisa menurun. Perubahan biaya produksi ini sangat berkaitan dengan perubahan harga di pasar.

b. Definisi Indeks Harga

Indeks harga adalah suatu indikator statistik yang digunakan untuk mengukur perubahan harga barang dan jasa tertentu dalam suatu periode waktu tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Indeks harga memberikan gambaran tentang tingkat inflasi atau deflasi dalam perekonomian. Secara sederhana, indeks harga mengukur bagaimana harga berubah dari waktu ke waktu, dengan menggunakan satu periode sebagai acuan (basis periode).

c. Jenis-Jenis Indeks Harga

▷ **Indeks Harga Produsen (IHP)**

Indeks harga produsen (IHP) mengukur perubahan harga yang diterima oleh produsen untuk barang dan jasa yang mereka produksi. IHP lebih fokus pada harga yang diterima produsen di tingkat grosir atau jual besar, bukan harga yang dibayar konsumen langsung. Indeks ini sering digunakan untuk memantau inflasi yang terjadi di sektor produksi dan dapat menjadi indikator awal untuk perubahan harga yang lebih lanjut di pasar konsumen.

▷ **Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)**

Indeks harga perdagangan besar (IHPB) mengukur perubahan harga barang yang diperdagangkan di pasar grosir. IHPB mencerminkan fluktuasi harga barang sebelum mencapai konsumen akhir. Indeks ini penting karena dapat menunjukkan bagaimana perubahan harga barang yang dijual secara besar-besaran akan memengaruhi harga barang yang akhirnya dijual kepada konsumen. IHPB sering digunakan untuk menganalisis tren harga komoditas dan barang-barang penting dalam perekonomian.

▷ **Indeks Harga Konsumen (IHK)**



Kettlebell dan alat olahraga masuk dalam salah satu kelompok penghitungan IHK - shutterstock.com.2489296853

Indeks harga konsumen (IHK) adalah salah satu indeks harga yang paling sering digunakan untuk mengukur inflasi, karena mencerminkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. IHK mengukur seberapa banyak harga barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen berubah dari waktu ke waktu. Dalam perhitungannya, terdapat 11 kelompok barang dan jasa yang digunakan untuk menghitung IHK.

Mulai dari 1) kelompok makanan dan minuman, 2) pakaian dan alas kaki, 3) perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar, 4) kesehatan, 5) pendidikan, 6)

rekreasi, hiburan, dan olahraga, 7) transportasi, 8) komunikasi, 9) barang dan jasa lainnya, 10) keuangan, serta 11) barang dan jasa yang terkait dengan rumah tangga.

Setiap kelompok ini mencakup barang dan jasa yang memiliki bobot tertentu berdasarkan pengeluaran rumah tangga, dan perubahan harga di setiap kelompok akan dihitung untuk menghasilkan angka IHK yang mencerminkan perubahan harga umum.

▷ **Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) dan Indeks Harga yang Diterima Petani (It)**

Indeks harga yang dibayar petani (Ib) mengukur perubahan harga barang dan jasa yang dibeli oleh petani untuk keperluan produksi, seperti pupuk, alat pertanian, dan bahan bakar. Sebaliknya, indeks harga yang diterima petani (It) mengukur perubahan harga yang diterima petani atas hasil pertanian yang mereka jual. Kedua indeks ini digunakan untuk menganalisis kesejahteraan petani dan menganalisis seberapa besar perubahan harga input dan output pertanian mempengaruhi pendapatan petani.

Tujuan Perhitungan Indeks Harga

Indeks harga berfungsi sebagai indikator yang mengukur kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Indeks harga mencerminkan perubahan harga barang dan jasa dalam perekonomian, yang dapat memberikan gambaran tentang kestabilan ekonomi. Jika indeks harga menunjukkan tren kenaikan yang konsisten, ini bisa menjadi tanda inflasi. Sebaliknya, jika indeks harga menurun, ini bisa menandakan deflasi atau penurunan dalam kegiatan ekonomi.

Indeks harga juga digunakan untuk memberi gambaran mengenai tren harga dalam jangka waktu tertentu. Dengan menghitung perbandingan harga barang dan jasa pada periode tertentu dengan periode sebelumnya, indeks harga dapat menunjukkan apakah harga secara umum sedang naik, turun, atau stabil.

Di sisi lain, indeks harga sangat penting dalam penetapan gaji dan perubahan upah. Biasanya, gaji akan disesuaikan berdasarkan tingkat inflasi yang diukur oleh indeks harga konsumen (IHK). Sementara itu, perusahaan-perusahaan menggunakan indeks harga sebagai pedoman untuk memutuskan harga jual produk dan strategi pemasaran mereka.

Indeks harga juga memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi petani. Sebagai contoh, dengan perhitungan indeks harga, kita bisa mengetahui apakah petani mendapatkan keuntungan yang lebih besar atau malah mengalami kerugian. Tidak hanya petani, para pedagang dan pengecer juga menggunakan indeks harga sebagai dasar untuk menentukan kebijakan harga jual produk mereka.

Metode Perhitungan Indeks Harga

a. Metode Indeks Harga Agregatif Tidak Tertimbang

Metode indeks harga agregatif tidak tertimbang adalah salah satu cara untuk menghitung perubahan harga di pasar tanpa mempertimbangkan berat atau kontribusi masing-masing komoditas terhadap total pengeluaran. Rumus yang digunakan untuk metode ini adalah:

$$I = \frac{\sum P_t}{\sum P_0} \times 100$$

Di mana:

I = Indeks harga

P₀ = Harga pada periode 0 (periode dasar)

P_t = Harga pada periode t (periode yang dibandingkan) **Σ** = Jumlah

Mari kita ambil contoh perhitungan indeks harga untuk beberapa bahan pokok (beras, minyak, gula, garam, mie instan, telur) pada tahun 2022-2023 dalam satuan rupiah:

Perhitungan Indeks Harga Rata-Rata Beberapa Bahan Pokok Tahun 2022 dan 2023

Komoditas	Satuan	Harga 2022 (Rp)	Harga 2023 (Rp)	Perubahan Harga (Rp)
Beras	Kg	10.000	11.000	1.000
Minyak	Kg	15.000	16.500	1.500
Gula	Kg	12.000	12.500	500
Garam	Kg	5.000	5.500	500
Mie Instan	Bungkus	3.000	3.300	300
Telur	Kg	20.000	22.000	2.000
Jumlah		63.000	70.800	5.800

Dengan menggunakan rumus di atas, kita dapat menghitung indeks harga agregatif sebagai berikut:

$$\text{Indeks Harga 2022} = \frac{63.000}{63.000} \times 100 = 100.00$$

$$\text{Indeks Harga 2023} = \frac{70.800}{63.000} \times 100 = 112.38$$

Pada perhitungan indeks harga 2022 menunjukkan tidak ada perubahan agregat harga, karena dibandingkan dengan tahun dasar yang sama (tahun 2022). Namun, saat perhitungan indeks harga 2023 dengan tahun dasar harga 2022, maka terjadi peningkatan indeks harga sebesar 12.38 persen,

yang menunjukkan bahwa rata-rata harga pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan rata-rata harga pada tahun 2022.

Perlu dicatat, metode ini memiliki beberapa kelemahan, salah satunya adalah tidak mempertimbangkan perbedaan kontribusi masing-masing barang terhadap pengeluaran konsumen. Sebagai contoh, jika harga beras meningkat secara signifikan tetapi jumlah konsumsinya kecil, metode ini akan memberikan bobot yang sama untuk semua komoditas, yang dapat mengurangi akurasi perhitungan indeks harga.

b. Metode Indeks Harga Agregatif Tertimbang

▷ Metode Perhitungan Indeks Harga Laspeyres

Metode Laspeyres menghitung indeks harga dengan menggunakan jumlah barang dan jasa yang dibeli pada periode dasar sebagai pembobotnya. Rumus Laspeyres adalah:

$$I_L = \frac{\sum P_t \times Q_0}{\sum P_0 \times Q_0} \times 100$$



Louis Etienne
Laspeyres
(1834-1913) -
wikimedia.com.

Di mana:

I_L = Indeks Laspeyres
periode t

P_t = Harga pada

P_0 = Harga pada periode 0

Q_0 = Jumlah barang yang dibeli periode 0

Ilustrasi Perhitungan Indeks Laspeyres:

Misalnya, kita ingin menghitung indeks harga Laspeyres untuk lima jenis buah pada tahun 2022-2023. Berikut adalah data harga dan jumlah yang terjual pada tahun 2022:

Tabel Harga Beberapa Buah Tahun 2022 dan 2023

Buah	Harga 2022 (Rp)	Harga 2023 (Rp)	Jumlah Terjual 2022 (Kg)	Jumlah Terjual 2023 (Kg)
Apel	20.000	22.000	10	12
Pisang	15.000	16.500	8	9
Mangga	18.000	19.500	6	7
Jeruk	12.000	13.500	5	6
Pear	25.000	27.500	4	5

Perhitungan indeks harga dengan memasukkan data harga dan jumlah yang terjual tahun 2022.

$$\text{Indeks Laspeyres} = \frac{(22.000*10) + (16.500*8) + (19.500*6) + (13.500*5) + (27.500*4)}{(20.000*10) + (15.000*8) + (18.000*6) + (12.000*5) + (25.000*4)} \times 100 = 109.95$$

Hasilnya menunjukkan bahwa terjadi peningkatan indeks harga dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 9,95 persen.

▷ **Metode Perhitungan Indeks Harga Paasche**

Metode Paasche menggunakan jumlah barang yang dibeli pada periode t sebagai pembobot.

Rumus Paasche adalah:

$$I_p = \frac{\sum P_t \times Q_t}{\sum P_0 \times Q_t} \times 100$$



Di mana:

I_p = Indeks Paasche

P_t = Harga pada periode t

P_0 = Harga pada periode 0

Q_t = Jumlah barang yang dibeli pada periode t

Hermann Paasche (1851-1925) - wikimedia.com.

Berikut adalah ilustrasi perhitungan indeks harga Paasche menggunakan data yang sama dengan yang digunakan pada indeks harga Laspeyres, tetapi dengan pembobot yang berbeda, yaitu jumlah barang yang dibeli pada periode t (tahun 2023).

$$\text{Indeks Paasche} = \frac{(22.000*12) + (16.500*9) + (19.500*7) + (13.500*6) + (27.500*5)}{(20.000*12) + (15.000*9) + (18.000*7) + (12.000*6) + (25.000*5)} \times 100 = 109.96$$

Hasil perhitungan indeks harga Paasche adalah 109,96. Artinya, berdasarkan metode Paasche, harga barang yang dihitung dengan menggunakan jumlah barang yang dibeli pada tahun 2023 mengalami kenaikan sekitar 9,96 persen dibandingkan dengan tahun 2022.

Contoh Soal

Pada tahun 2023, harga beberapa barang pokok mengalami perubahan sebagai berikut:

Komoditas	Harga 2022 (Rp)	Harga 2023 (Rp)	Jumlah Terjual 2022 (Kg)	Jumlah Terjual 2023 (Kg)
Beras	10.000	11.000	15	18
Minyak	12.000	13.500	10	13
Gula	9.000	9.500	20	23
Telur	18.000	20.000	8	11

Hitunglah Indeks Harga Laspeyres untuk barang-barang di atas menggunakan harga dan jumlah terjual pada tahun 2022 sebagai pembobot. Berikan penjelasan singkat mengenai hasil yang didapat!

Pembahasan:

Untuk menghitung indeks harga Laspeyres kita menggunakan rumus: $I_L = \frac{\sum P_t \times Q_0}{\sum P_0 \times Q_0} \times 100$

$$\begin{aligned}\text{Indeks Laspeyres} &= \frac{(11.000*15) + (13.500*10) + (9.500*20) + (20.000*8)}{(10.000*15) + (12.000*10) + (9.000*20) + (18.000*8)} \times 100 \\ &= \frac{165.000 + 135.000 + 190.000 + 160.000}{150.000 + 120.000 + 180.000 + 144.000} \times 100 \\ &= \frac{650.000}{594.000} \times 100 \\ &= 109.43\end{aligned}$$

Maka, harga barang-barang telah mengalami kenaikan sekitar **9,43 persen** pada tahun 2023.

Fakta Unik Seputar Ekonomi

Indeks Harga dan Krisis Minyak Dunia (1973)

Pada tahun 1973, terjadi krisis minyak dunia yang disebabkan oleh embargo minyak oleh negara-negara penghasil minyak anggota OPEC (Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak). Krisis ini menyebabkan lonjakan harga minyak secara dramatis, yang pada gilirannya memicu inflasi global. Indeks harga konsumen di banyak negara, termasuk Amerika Serikat, melonjak akibat kenaikan harga energi, terutama bahan bakar dan pemanasan. Ini memberikan gambaran jelas tentang bagaimana indeks harga dapat mencerminkan dampak krisis eksternal terhadap harga barang dan jasa dalam perekonomian, dan bagaimana perubahan harga energi dapat berimbas luas ke sektor lain dalam



Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) - shutterstock.com.2450437139



3. Inflasi

Definisi Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu perekonomian selama periode tertentu. Hal ini mengindikasikan penurunan daya beli mata uang, yang membuat konsumen harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli barang dan jasa yang sama. Inflasi dapat diukur menggunakan berbagai indeks harga, seperti indeks harga konsumen (IHK), yang mengukur perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga.

Inflasi dapat berdampak negatif terhadap perekonomian, seperti menurunnya nilai uang yang disimpan dalam bentuk tabungan, meningkatnya biaya hidup, serta potensi ketidakpastian ekonomi. Namun, inflasi juga dapat memiliki dampak positif jika berada pada tingkat yang terkendali, karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencegah deflasi. Dalam banyak kasus, bank sentral menggunakan kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi agar tidak merusak perekonomian.

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Inflasi

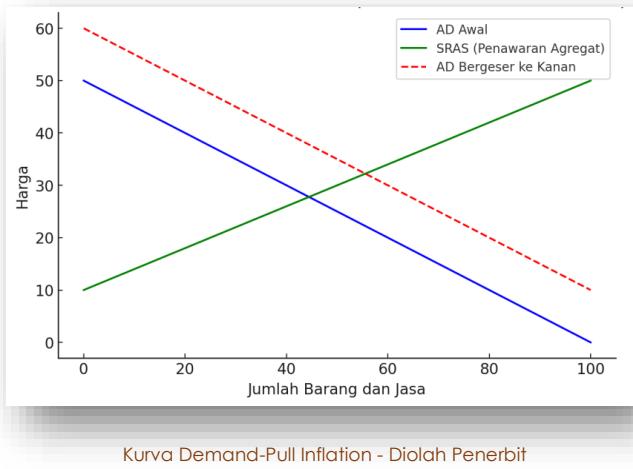
a. Inflasi Tarikan Permintaan (*Demand-Pull Inflation*)

Inflasi tarikan permintaan terjadi ketika aggregate demand atau total permintaan barang dan jasa dalam perekonomian meningkat lebih cepat dibandingkan dengan kapasitas produksi yang ada. Hal ini biasanya terjadi dalam perekonomian yang sedang berkembang pesat, di mana konsumsi masyarakat, pengeluaran pemerintah, atau investasi meningkat secara signifikan. Ketika permintaan barang dan jasa melebihi pasokan yang tersedia, produsen akan menaikkan harga untuk menyeimbangkan antara permintaan dan penawaran.

Di samping merupakan ilustrasi kurva untuk *Demand-Pull Inflation* (Inflasi Tarikan Permintaan). Terdapat

kurva biru (AD Awal) yang menunjukkan kurva permintaan agregat (AD) sebelum terjadi peningkatan permintaan. Lalu, kurva merah (AD Bergeser ke Kanan) menggambarkan pergeseran kurva permintaan agregat ke kanan, ketika permintaan meningkat, harga barang dan jasa juga cenderung naik, yang menyebabkan inflasi. Adapun kurva hijau (SRAS) adalah kurva penawaran agregat (SRAS) yang tetap konstan.

Grafik ini menggambarkan bagaimana peningkatan permintaan yang tidak diimbangi dengan peningkatan produksi akan menyebabkan harga naik.



Kurva permintaan (AD) bergeser ke kanan, menunjukkan peningkatan permintaan. Karena kapasitas produksi tidak dapat meningkat dengan cepat, harga barang dan jasa pun naik, menciptakan inflasi. Kurva ini mengilustrasikan bagaimana peningkatan permintaan menyebabkan harga barang dan jasa meningkat dalam perekonomian.

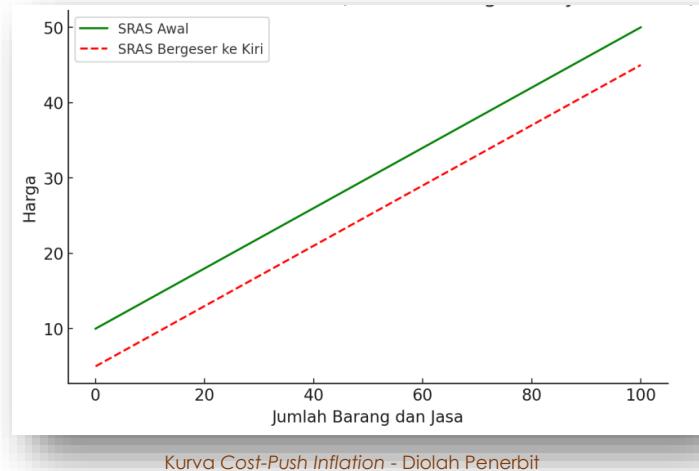
b. Inflasi Dorongan Biaya Produksi (*Cost-Push Inflation*)

Inflasi dorongan biaya produksi terjadi ketika biaya produksi barang dan jasa meningkat, sehingga produsen menaikkan harga jual untuk mempertahankan margin keuntungan mereka. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan inflasi jenis ini termasuk peningkatan harga bahan baku, upah tenaga

kerja, dan biaya energi. Ketika biaya produksi naik, perusahaan cenderung memindahkan biaya tersebut ke konsumen melalui harga yang lebih tinggi.

Terlihat pada grafik di samping, terdapat kurva hijau (SRAS awal) yang menunjukkan kurva penawaran agregat (SRAS) sebelum terjadi peningkatan biaya produksi.

Selanjutnya, digambarkan dengan kurva merah (SRAS Bergeser ke Kiri) bahwa terjadi pergeseran penawaran agregat ke kiri, yang terjadi ketika biaya produksi, seperti harga bahan baku atau upah, meningkat. Ketika biaya produksi naik, penawaran barang dan jasa berkurang, menyebabkan harga naik dan menghasilkan inflasi.



Adanya pergeseran kurva penawaran agregat (SRAS) ke kiri, juga menandakan bahwa biaya produksi lebih tinggi dari sebelumnya, sehingga mengurangi jumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar. Dengan penurunan pasokan ini, harga barang dan jasa akan naik, maka terjadilah inflasi. Hal ini juga mendeskripsikan bagaimana faktor biaya dapat memicu inflasi.

c. Inflasi karena Jumlah Uang yang Beredar Bertambah

Inflasi juga dapat disebabkan oleh peningkatan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Ketika bank sentral mencetak uang lebih banyak, jumlah uang yang tersedia untuk transaksi meningkat, yang pada gilirannya meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa. Jika jumlah barang dan jasa yang tersedia tidak meningkat sebanding dengan jumlah uang yang beredar, harga-harga cenderung naik. Fenomena ini sering disebut sebagai inflasi moneter dan dapat terjadi ketika bank sentral melakukan pelonggaran kebijakan moneter atau pembelian surat berharga dalam jumlah besar untuk mendorong perekonomian.

Macam-Macam Inflasi

a. Klasifikasi Inflasi Berdasarkan Level Kedaruratannya

▷ Inflasi Ringan

Inflasi ringan merujuk pada tingkat inflasi yang berada di bawah 10 persen per tahun. Inflasi jenis ini sering kali dianggap sebagai kondisi normal dalam perekonomian dan biasanya tidak terlalu meresahkan masyarakat. Kenaikan harga yang terjadi pada tingkat inflasi ringan tidak menyebabkan penurunan daya beli yang signifikan, sehingga konsumen masih bisa menyesuaikan anggaran mereka dengan mudah. Inflasi ringan seringkali dihadapi oleh negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi stabil dan dapat dikendalikan oleh kebijakan moneter.



Emas menjadi solusi untuk mengamankan nilai aset saat terjadi inflasi - shutterstock.com/2430795049

▷ **Inflasi Sedang**

Inflasi sedang terjadi ketika tingkat inflasi berada antara 10 hingga 30 persen per tahun. Pada tingkat inflasi ini, harga barang dan jasa mulai naik signifikan, dan dapat mulai mempengaruhi daya beli masyarakat. Inflasi sedang sering kali mencerminkan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran dalam perekonomian, dan bisa menandakan adanya ketegangan dalam sektor ekonomi tertentu. Meskipun belum terlalu merugikan, inflasi jenis ini memerlukan perhatian lebih dari otoritas moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi.

▷ **Inflasi Berat**

Inflasi berat terjadi ketika tingkat inflasi berada antara 30 hingga 100 persen per tahun. Dalam kondisi inflasi berat, kenaikan harga barang dan jasa cukup terasa dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat mengurangi daya beli secara signifikan. Inflasi berat dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, menurunkan kepercayaan konsumen terhadap mata uang, serta memperburuk kesiangan sosial-ekonomi. Kondisi ini sering terjadi pada negara-negara yang mengalami krisis ekonomi atau gangguan besar dalam perekonomian mereka.

▷ **Inflasi Sangat Berat (*Hyperinflation*)**

Inflasi sangat berat atau *hyperinflation* adalah kondisi inflasi yang terjadi dengan tingkat lebih dari 100 persen per tahun. Dalam keadaan ini, harga barang dan jasa naik dengan sangat cepat dan tidak terkendali, sehingga masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang nasional. *Hyperinflation* seringkali disebabkan oleh kebijakan moneter yang tidak terkendali, seperti pencetakan uang yang berlebihan oleh bank sentral.

b. Klasifikasi Inflasi Berdasarkan Sumbernya

▷ **Inflasi yang Faktor Penyebabnya dari Luar Negeri**

Inflasi yang bersumber dari luar negeri terjadi ketika harga barang dan jasa yang diimpor ke negara mengalami kenaikan, yang kemudian diteruskan ke pasar domestik. Contohnya, Indonesia yang banyak mengimpor barang modal dan bahan baku untuk industri. Jika harga barang-barang ini meningkat di pasar global, maka biaya produksi domestik akan naik, yang menyebabkan harga barang dan jasa di Indonesia juga naik, menciptakan inflasi. Kondisi ini sering disebut inflasi impor, di mana faktor eksternal, seperti lonjakan harga minyak atau bahan baku lainnya, mempengaruhi harga barang domestik.

▷ **Inflasi yang Faktor Penyebabnya dari Dalam Negeri**

Inflasi yang bersumber dari dalam negeri terjadi ketika faktor-faktor domestik, seperti kekurangan pasokan barang atau perubahan dalam biaya produksi, menyebabkan harga naik. Sebagai contoh, inflasi dapat terjadi akibat gagal panen yang menyebabkan penurunan pasokan bahan pangan, sementara permintaan tetap tinggi. Dalam kasus ini, kekurangan pasokan pangan membuat harga barang-barang tersebut naik, yang mendorong inflasi domestik. Faktor-faktor seperti upah yang meningkat atau kebijakan fiskal yang ekspansif juga dapat berkontribusi terhadap inflasi dalam negeri.

c. Klasifikasi Inflasi Berdasarkan Faktor Penyebabnya

▷ **Kenaikan Permintaan sebagai Faktor Penyebab Inflasi**

Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan permintaan terjadi ketika total permintaan terhadap barang dan jasa dalam perekonomian melebihi kapasitas produksi. Ketika permintaan agregat (total permintaan) meningkat, sementara pasokan barang dan jasa tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut, harga akan naik. Inflasi jenis ini sering terjadi dalam perekonomian yang berkembang pesat atau selama periode ekspansi ekonomi, di mana konsumen dan perusahaan meningkatkan pengeluaran mereka, sehingga memicu kenaikan harga.

▷ **Kenaikan Biaya Produksi sebagai Faktor Penyebab Inflasi**

Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi terjadi ketika biaya untuk memproduksi barang dan jasa meningkat, yang kemudian diteruskan kepada konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi. Peningkatan biaya produksi ini bisa disebabkan oleh naiknya harga bahan baku, upah pekerja, atau energi. Ketika produsen menghadapi biaya yang lebih tinggi, mereka biasanya akan menaikkan harga jual produk untuk menutupi biaya tambahan tersebut, yang pada akhirnya menyebabkan inflasi di tingkat konsumen.

Menghitung Inflasi

Menghitung inflasi adalah proses untuk mengukur perubahan rata-rata harga barang dan jasa dari waktu ke waktu dalam perekonomian. Inflasi biasanya dihitung dengan menggunakan indeks harga konsumen (IHK), yang membandingkan harga rata-rata barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga pada dua periode waktu yang berbeda. Dengan menghitung perubahan harga secara periodik, kita dapat mengetahui tingkat inflasi yang terjadi dalam perekonomian, yang sangat penting untuk kebijakan ekonomi dan pengendalian daya beli masyarakat. Secara umum, inflasi dihitung dengan rumus:

$$\text{Inflasi} = \frac{\text{IHK tahun ini} - \text{IHK tahun lalu}}{\text{IHK tahun lalu}} \times 100$$



Tumpukan uang di Zimbabwe saat terjadi hyperinflasi - kompasiana.com.

Perhitungan inflasi ini memberikan gambaran mengenai seberapa besar harga barang dan jasa naik dalam periode tertentu, serta dampaknya terhadap pengeluaran konsumen. Sebagai contoh, mari kita bandingkan rata-rata harga eceran nasional beberapa jenis barang pada tahun 2022 dan 2023 berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dalam statistik Indonesia 2022.

Tabel Rata-Rata Harga Beberapa Komoditas Tahun 2022 dan 2023

Komoditas	Satuan	Harga 2022 (Rp)	Harga 2023 (Rp)
Beras	Kg	10.000	11.500
Minyak goreng	Kg	15.000	17.000
Gula pasir	Kg	12.000	13.500
Telur ayam	Kg	20.000	22.000
Cabai merah	Kg	40.000	45.000

Sekarang kita akan menghitung tingkat inflasi dengan menggunakan rumus di atas. Pertama, kita hitung rata-rata harga barang untuk tahun 2022 dan 2023. Berdasarkan perhitungan, rata-rata harga barang

pada tahun 2022 adalah Rp19.400 dan pada tahun 2023 adalah Rp21.800. Dengan menggunakan rumus inflasi, kita dapat menghitung tingkat inflasi sebagai berikut:

$$\text{Inflasi} = \frac{21.800 - 19.400}{19.400} \times 100 = 12,37\%$$

Hasilnya dapat diinterpretasikan bahwa tingkat inflasi antara tahun 2022 dan 2023 adalah sekitar 12,37%, yang menunjukkan bahwa harga rata-rata barang yang dikonsumsi oleh masyarakat mengalami kenaikan sebesar 12,37% dalam satu tahun.

Dampak dan Gejala Inflasi

a. Inflasi Mempengaruhi Pendapatan

Inflasi dapat memengaruhi pendapatan masyarakat secara signifikan. Ketika harga barang dan jasa naik, daya beli uang menurun, yang berarti pendapatan riil (pendapatan yang disesuaikan dengan inflasi) akan berkurang. Meskipun pendapatan nominal (angka yang tertera di gaji) tetap sama, jika inflasi tinggi, masyarakat akan merasa bahwa mereka memiliki lebih sedikit uang untuk membeli barang dan jasa yang mereka butuhkan. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup dan menambah beban bagi keluarga yang penghasilannya tetap atau tidak naik seiring dengan inflasi.

b. Inflasi Mempengaruhi Daya Saing Eksport

Inflasi yang tinggi dapat memengaruhi daya saing eksport suatu negara. Ketika inflasi domestik naik, harga barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri juga cenderung meningkat. Hal ini dapat membuat barang-barang dari negara tersebut menjadi lebih mahal di pasar internasional, sehingga mengurangi daya saing eksport. Negara mitra dagang mungkin beralih ke negara lain dengan harga yang lebih kompetitif, yang pada akhirnya dapat mengurangi volume eksport dan menurunkan pendapatan negara dari sektor perdagangan internasional.

c. Inflasi Mempengaruhi Minat Masyarakat untuk Menabung

Inflasi dapat mengurangi minat orang untuk menabung. Ketika inflasi tinggi, nilai uang yang disimpan dalam bentuk tabungan akan menurun dari waktu ke waktu, karena uang tersebut kehilangan daya belinya. Misalnya, jika tingkat inflasi mencapai 10%, maka tabungan yang disimpan tidak akan memiliki daya beli yang sama dengan sebelumnya. Untuk mengilustrasikannya, jika seseorang menabung Rp 100.000 di bank, dan tingkat inflasi 10%, maka uang tersebut pada tahun depan hanya akan memiliki daya beli setara dengan Rp 90.000. Oleh karena itu, masyarakat cenderung lebih memilih untuk mengeluarkan uang mereka untuk konsumsi saat ini atau mencari investasi yang dapat memberikan pengembalian lebih tinggi daripada tingkat inflasi.

d. Pengaruh Inflasi terhadap Harga Pokok Produksi

Inflasi dapat mempengaruhi kualitas harga pokok barang yang digunakan dalam produksi. Ketika harga bahan baku dan energi meningkat akibat inflasi, biaya produksi barang dan jasa juga akan meningkat. Peningkatan biaya produksi ini akan menciptakan tekanan bagi perusahaan untuk menaikkan harga jual produk mereka, yang pada gilirannya mempengaruhi harga pokok barang (HPP). Perusahaan mungkin akan menurunkan kualitas produk atau mencari alternatif bahan baku yang lebih murah untuk mengimbangi kenaikan biaya produksi, yang dapat berdampak pada kualitas produk akhir.

Strategi untuk Mengendalikan Inflasi

a. Strategi Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter melibatkan langkah-langkah yang diambil oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian serta suku bunga, dengan tujuan untuk mencapai

stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Salah satu cara pengendalian inflasi melalui kebijakan moneter adalah dengan mengontrol jumlah uang yang beredar menggunakan beberapa instrumen, seperti penetapan persediaan kas, kebijakan diskonto, dan operasi pasar terbuka. Kebijakan ini penting untuk memastikan perekonomian tetap tumbuh stabil tanpa mengalami lonjakan harga yang berlebihan.

▷ **Kebijakan Penetapan Cadangan Kas**

Kebijakan ini berfokus pada pengaturan jumlah cadangan yang harus disimpan oleh bank-bank komersial di bank sentral. Melalui kebijakan ini, bank sentral dapat mempengaruhi kemampuan bank untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat. Dengan meningkatkan persediaan kas yang harus disimpan, jumlah uang yang beredar di perekonomian akan berkurang, sehingga inflasi dapat ditekan.

▷ **Kebijakan Diskonto**

Kebijakan diskonto adalah penetapan suku bunga yang dikenakan bank sentral pada pinjaman yang diberikan kepada bank-bank komersial. Kenaikan suku bunga diskonto akan membuat biaya pinjaman bagi bank lebih mahal, yang menyebabkan bank mengurangi jumlah pinjaman yang diberikan kepada masyarakat. Akibatnya, jumlah uang yang beredar dalam perekonomian akan berkurang, yang dapat mengurangi inflasi. Sebaliknya, penurunan suku bunga diskonto akan mendorong bank untuk memberikan pinjaman, meningkatkan jumlah uang yang beredar.

▷ **Kebijakan Operasi Pasar Terbuka**

Operasi pasar terbuka adalah kebijakan di mana bank sentral membeli atau menjual surat berharga di pasar. Jika bank sentral membeli surat berharga, uang yang beredar dalam perekonomian akan bertambah, sementara jika menjualnya, uang yang beredar akan berkurang. Kebijakan ini digunakan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan dapat mempengaruhi tingkat inflasi di pasar.

b. Strategi Kebijakan Fiskal

▷ **Mengurangi Pengeluaran dan Efisiensi Belanja Pemerintah**

Salah satu cara untuk mengendalikan inflasi adalah dengan mengurangi pengeluaran pemerintah. Pengeluaran yang berlebihan dapat meningkatkan permintaan agregat, yang berpotensi mendorong inflasi. Dengan memotong anggaran belanja untuk proyek-proyek atau pengeluaran sosial, permintaan dalam perekonomian dapat dikurangi, yang membantu menekan inflasi. Kebijakan ini sering kali diterapkan dalam situasi di mana inflasi dipicu oleh belanja pemerintah yang terlalu besar.

▷ **Meningkatkan Tarif Pajak**

Kebijakan fiskal lain untuk mengendalikan inflasi adalah dengan meningkatkan tarif pajak. Ketika pajak dinaikkan, daya beli masyarakat akan berkurang karena mereka memiliki lebih sedikit uang untuk dibelanjakan. Hal ini akan menurunkan permintaan terhadap barang dan jasa, yang pada gilirannya dapat menurunkan tekanan inflasi. Selain itu, peningkatan pajak juga membantu menyeimbangkan anggaran negara.



Menaikkan pajak rumah tangga dapat mengurangi konsumsi, sehingga harga dapat turun -shutterstock.com.2068616528

c. Kebijakan Lain di Luar Kebijakan Moneter dan Fiskal

▷ **Meningkatkan Produksi dan Menambah Jumlah Barang di Pasar**

Untuk mengendalikan inflasi, salah satu langkah yang dapat diambil adalah meningkatkan produksi barang dan jasa. Ketika pasokan barang dan jasa meningkat, harga cenderung stabil karena pasokan dapat memenuhi permintaan. Pemerintah dapat memberikan insentif kepada produsen untuk meningkatkan produksi atau berinvestasi dalam sektor-sektor yang meningkatkan kapasitas produksi, sehingga dapat mengurangi tekanan inflasi yang disebabkan oleh kekurangan pasokan.

▷ **Menetapkan Harga Maksimum untuk Beberapa Jenis Barang**

Kebijakan ini melibatkan penetapan batasan harga untuk beberapa barang yang mengalami lonjakan harga yang signifikan. Menetapkan harga maksimum bertujuan untuk menjaga agar barang-barang tersebut tetap terjangkau oleh masyarakat, terutama bagi barang pokok. Namun, kebijakan ini perlu diimbangi dengan pengawasan yang ketat untuk menghindari kelangkaan barang, karena produsen mungkin enggan menjual barang dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Contoh Soal

Inflasi yang terjadi dalam perekonomian dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Jelaskan bagaimana inflasi tarikan permintaan dan inflasi dorongan biaya produksi dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara. Berikan contoh sederhana untuk masing-masing jenis inflasi!

Pembahasan:

Inflasi Tarikan Permintaan (Demand-Pull Inflation) terjadi ketika total permintaan terhadap barang dan jasa dalam perekonomian melebihi kapasitas produksi yang ada. Hal ini dapat terjadi ketika ada peningkatan pengeluaran konsumen, investasi pemerintah, atau belanja sektor swasta yang sangat besar. Sebagai contoh, jika dalam suatu negara terdapat peningkatan signifikan dalam konsumsi masyarakat karena kenaikan pendapatan atau kebijakan fiskal yang ekspansif, permintaan akan barang dan jasa akan meningkat. Jika pasokan barang tidak dapat mengikuti peningkatan permintaan, maka harga akan naik, menciptakan inflasi.

Inflasi Dorongan Biaya Produksi (Cost-Push Inflation) terjadi ketika biaya produksi barang dan jasa meningkat, yang menyebabkan produsen menaikkan harga jual produk untuk mempertahankan margin keuntungan. Ini bisa disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku, energi, atau upah tenaga kerja. Sebagai contoh, jika harga minyak dunia meningkat tajam, maka biaya transportasi dan produksi barang akan naik, dan produsen akan mengalihkan biaya tambahan ini kepada konsumen dengan menaikkan harga barang, yang pada gilirannya memicu inflasi.

Kedua jenis inflasi ini memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian. Inflasi tarikan permintaan sering terjadi dalam perekonomian yang sedang berkembang pesat, sedangkan inflasi dorongan biaya produksi lebih sering terjadi pada saat ketegangan pasokan atau krisis energi.

Rangkuman

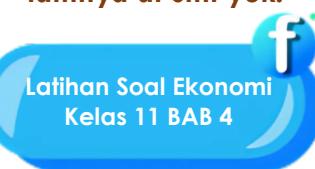
- ▷ Teori Permintaan Uang menjelaskan bahwa masyarakat akan memegang uang tunai untuk berbagai tujuan, termasuk transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi.
- ▷ Teori Penawaran Uang berkaitan dengan kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar melalui instrumen seperti kebijakan cadangan kas, suku bunga, dan operasi pasar terbuka.
- ▷ Indeks Harga adalah alat statistik yang digunakan untuk mengukur perubahan harga barang dan jasa dari waktu ke waktu, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebagai yang paling umum digunakan.
- ▷ Inflasi Tarikan Permintaan (*Demand-Pull Inflation*) terjadi ketika total permintaan dalam perekonomian melebihi kapasitas produksi yang ada, menyebabkan harga naik.
- ▷ Inflasi Dorongan Biaya Produksi (*Cost-Push Inflation*) terjadi ketika biaya produksi barang dan jasa meningkat, menyebabkan produsen menaikkan harga untuk mempertahankan margin keuntungan.
- ▷ Hyperinflation adalah tingkat inflasi yang ekstrem, lebih dari 100% per tahun, dan sering disebabkan oleh pencetakan uang berlebihan oleh bank sentral, mengakibatkan kehilangan total kepercayaan terhadap mata uang.
- ▷ Indeks Harga Produsen (IHP) mengukur perubahan harga yang diterima produsen, sedangkan Indeks Harga Konsumen (IHK) mengukur harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga.
- ▷ Inflasi dapat mempengaruhi pendapatan masyarakat dengan mengurangi daya beli uang, sehingga meskipun pendapatan nominal tetap, daya beli berkurang.
- ▷ Inflasi dapat berdampak pada ekspor suatu negara karena kenaikan harga domestik membuat produk dari negara tersebut menjadi lebih mahal di pasar internasional, mengurangi daya saing ekspor.
- ▷ Inflasi yang tinggi dapat mengurangi minat masyarakat untuk menabung, karena uang yang disimpan akan kehilangan daya beli seiring waktu, mendorong masyarakat untuk lebih banyak mengonsumsi atau mencari investasi lain.
- ▷ Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal adalah dua alat utama yang digunakan oleh pemerintah dan bank sentral untuk mengendalikan inflasi dan memastikan stabilitas ekonomi.
- ▷ Kebijakan diskonto dan operasi pasar terbuka digunakan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian, mempengaruhi inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
- ▷ Kebijakan pengendalian inflasi juga mencakup langkah-langkah produksi dan pengaturan harga, seperti meningkatkan pasokan barang dan menetapkan harga maksimum pada barang-barang tertentu untuk menjaga stabilitas harga di pasar.

Latihan Soal

1. Permintaan uang dalam perekonomian dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang menjelaskan peningkatan permintaan uang adalah...
 - A. Kenaikan suku bunga
 - B. Penurunan pendapatan nasional
 - C. Peningkatan harga barang dan jasa
 - D. Penurunan tingkat inflasi
 - E. Penurunan jumlah uang beredar
2. Apa yang dimaksud dengan kebijakan operasi pasar terbuka dalam penawaran uang?
 - A. Bank sentral mengatur jumlah cadangan yang harus disimpan oleh bank komersial
 - B. Bank sentral membeli atau menjual surat berharga untuk mengendalikan jumlah uang beredar
 - C. Bank sentral menaikkan atau menurunkan suku bunga
 - D. Bank sentral mengeluarkan obligasi pemerintah
 - E. Bank komersial menaikkan suku bunga untuk mengurangi pinjaman
3. Indeks harga yang digunakan untuk mengukur perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga adalah...
 - A. Indeks Harga Produsen (IHP)
 - B. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)
 - C. Indeks Harga Konsumen (IHK)
 - D. Indeks Harga Pembelian Petani (Ib)
 - E. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)
4. Inflasi yang disebabkan oleh peningkatan biaya produksi, seperti kenaikan harga bahan baku atau energi, disebut sebagai...
 - A. Inflasi Tarikan Permintaan
 - B. Inflasi Moneter
 - C. Inflasi Dorongan Biaya Produksi
 - D. Inflasi yang Bersumber dari Luar Negeri
 - E. Inflasi yang Bersumber dari Dalam Negeri
5. Jika suatu negara mengalami inflasi dengan tingkat kenaikan harga 15% per tahun, maka inflasi tersebut termasuk dalam kategori...
 - A. Inflasi Ringan
 - B. Inflasi Sedang
 - C. Inflasi Berat
 - D. Inflasi Sangat Berat
 - E. Hyperinflation
6. Dalam teori preferensi likuiditas Keynes, salah satu motif untuk memegang uang adalah...
 - A. Motif investasi
 - B. Motif transaksi
 - C. Motif penghematan
 - D. Motif spekulasi
 - E. Motif pengelolaan risiko

7. Inflasi yang disebabkan oleh peningkatan harga barang yang diimpor, seperti minyak atau bahan baku, disebut sebagai...
 - A. Inflasi Tarikan Permintaan
 - B. Inflasi Dorongan Biaya Produksi
 - C. Inflasi yang Bersumber dari Luar Negeri
 - D. Inflasi yang Bersumber dari Dalam Negeri
 - E. Inflasi Moneter
8. Jika bank sentral mengurangi jumlah uang beredar dengan cara menjual surat berharga di pasar terbuka, maka hal ini akan...
 - A. Meningkatkan jumlah uang beredar dan mendorong inflasi
 - B. Menurunkan jumlah uang beredar dan mengurangi inflasi
 - C. Meningkatkan permintaan agregat
 - D. Mengurangi suku bunga
 - E. Meningkatkan cadangan kas bank

Akses latihan soal
lainnya di sini yuk!



Referensi

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). Statistik Indonesia 2022. <https://www.bps.go.id/publication>
- Fisher, I. (1911). The Purchasing Power of Money: Its Determination and Relation to Credit, Interest, and Crises. Macmillan.
- Investopedia. (2020). Inflation. <https://www.investopedia.com/terms/i/inflation.asp>
- Keynes, J. M. (1936). The General Theory of Employment, Interest, and Money. Harcourt Brace & Company.
- Mankiw, N. G. (2017). Principles of Economics (7th ed.). <https://www.cengage.com>
- Mishkin, F. S. (2015). The Economics of Money, Banking, and Financial Markets (10th ed.). Pearson.
- Ricardo, D. (1817). On the Principles of Political Economy and Taxation. John Murray.
- Solikin, I., & Suseno, A. (2022). Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian. Pustaka Pelajar.
- The Balance. (2021). Understanding the Causes of Inflation. <https://www.thebalance.com/causes-of-inflation-3305789>
- World Bank. (2021). Inflation, consumer prices (annual %). <https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG>



BAB 5: KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER

Karakter Pelajar Pancasila

Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhhlak mulia: Bijak dalam kebijakan ekonomi.

Bernalar kritis: Memahami dampak kebijakan ekonomi.

Kreatif: Mampu mengevaluasi kebijakan pemerintah.

Tujuan Pembelajaran: Mengurai Konsep Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter

1. Menjelaskan Pemahaman Mengenai Konsep Kebijakan Ekonomi Makro

- ▷ Menguraikan dan memahami konsep dasar kebijakan ekonomi makro
- ▷ Menjelaskan prinsip-prinsip dasar dalam kebijakan ekonomi makro

2. Menguraikan Pemahaman Mengenai Konsep Kebijakan Ekonomi Mikro

- ▷ Menguraikan dan memahami konsep dasar kebijakan ekonomi mikro
- ▷ Menjelaskan prinsip-prinsip dasar dalam kebijakan ekonomi mikro

3. Menjelaskan Pemahaman Mengenai Kebijakan Moneter

- ▷ Menguraikan Tujuan dari Kebijakan Moneter
- ▷ Mengidentifikasi Berbagai Jenis Kebijakan Moneter

Kata Kunci: Ekonomi Mikro, Ekonomi Makro, Kebijakan Moneter, Kebijakan Fiskal, APBN, APBD

- ▷ Menganalisis Instrumen yang Digunakan dalam Kebijakan Moneter

4. Menjelaskan Pemahaman Mengenai Kebijakan Fiskal

- ▷ Menguraikan Tujuan dari Kebijakan Fiskal
- ▷ Mengidentifikasi Berbagai Jenis Kebijakan Fiskal
- ▷ Menganalisis Instrumen yang Digunakan dalam Kebijakan Fiskal

5. Menganalisis Penerapan Kebijakan Ekonomi

- ▷ Menganalisis dan Menguraikan Perbedaan Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal
- ▷ Menganalisis Dampak Penerapan Kebijakan Ekonomi yang Diterapkan oleh Pemerintah
- ▷ Mengidentifikasi Manfaat dari Kebijakan Ekonomi
- ▷ Mengevaluasi Penerapan Kebijakan Ekonomi yang Berlaku Saat ini



F I T R I



1. Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro

Dalam dunia ekonomi, terdapat dua cabang utama yang memiliki fokus dan cakupan yang berbeda, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro berfokus pada analisis perilaku individu atau unit ekonomi, seperti konsumen, rumah tangga, dan perusahaan, serta bagaimana keputusan mereka mempengaruhi penawaran dan permintaan di pasar. Sementara itu, ekonomi makro mengkaji perekonomian secara keseluruhan, termasuk isu-isu besar seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan kebijakan ekonomi pemerintah. Kedua cabang ini saling terkait, namun memiliki pendekatan yang berbeda dalam memahami fenomena ekonomi yang ada.

Ekonomi Mikro

a. Fokus dan Tujuan Ekonomi Mikro

Ekonomi mikro berfokus pada analisis keputusan yang diambil oleh individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam menghadapi masalah kelangkaan. Dalam pemikirannya, tokoh ekonomi klasik seperti Adam Smith dan David Ricardo memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman ekonomi mikro. Adam Smith dengan teorinya tentang "tangan tak terlihat" menyatakan bahwa dalam pasar bebas, individu yang mengejar kepentingan pribadi mereka akan secara tidak langsung menghasilkan keuntungan bagi masyarakat.

David Ricardo lebih lanjut mengembangkan teori keunggulan komparatif, yang menekankan bahwa negara atau individu sebaiknya memfokuskan diri pada produksi barang yang mereka kuasai secara relatif, dan melakukan perdagangan untuk memperoleh barang yang lebih efisien diproduksi oleh pihak lain. Arah ekonomi mikro berkembang untuk menilai bagaimana pasar berfungsi dalam menentukan harga, distribusi sumber daya, serta bagaimana produsen dan konsumen membuat keputusan yang rasional untuk memaksimalkan kepuasan mereka.

b. Kebijakan dalam Ekonomi Mikro

Kebijakan ekonomi mikro mengarah pada penerapan langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi oleh individu, perusahaan, dan pasar. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pasar dan kesejahteraan sosial, serta memperbaiki distribusi barang dan jasa. Beberapa kebijakan yang diterapkan antara lain adalah:

▷ **Mengambil Keputusan yang Tepat dalam Menghadapi Kelangkaan**

Salah satu tantangan utama dalam ekonomi mikro adalah kelangkaan sumber daya. Kebijakan ekonomi mikro berusaha menentukan pilihan yang paling efisien dan optimal untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Hal ini sering melibatkan penetapan prioritas dalam distribusi sumber daya untuk menghindari pemborosan dan memaksimalkan keuntungan sosial.

▷ **Kolaborasi Antara Pelaku Pasar dan Industri**

Untuk menciptakan pasar yang efisien, penting adanya kolaborasi antar pelaku pasar, baik itu antara produsen, konsumen, maupun pelaku industri lainnya. Kebijakan ekonomi mikro yang mendorong sinergi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan keseimbangan dalam produksi dan konsumsi. Dengan bersinergi, diharapkan tercipta pasar yang lebih stabil dan berkelanjutan.

▷ **Kesepakatan antara Produsen dan Konsumen**



Interaksi konsumen dan produsen yang terjalin di pasar merupakan salah satu kajian dalam ekonomi mikro -
Shutterstock.com.1182118666

Dalam pasar, produsen dan konsumen seringkali melakukan kesepakatan atau transaksi yang saling menguntungkan. Kebijakan ekonomi mikro mendorong tercapainya kesepakatan yang adil antara kedua belah pihak, dengan memfasilitasi transparansi dan pengaturan harga yang sesuai dengan permintaan dan penawaran.

Contohnya adalah dalam pasar barang kebutuhan sehari-hari, di mana produsen berusaha memenuhi kebutuhan konsumen dengan harga yang wajar, dan konsumen memilih produk yang menawarkan nilai terbaik.

▷ **Pemanfaatan Teknik Analisis dalam Ekonomi Mikro**

Analisis ekonomi mikro adalah alat penting dalam merumuskan kebijakan yang efektif. Dengan menggunakan model matematis dan alat analisis seperti teori permintaan dan penawaran, serta elastisitas harga, kebijakan ekonomi mikro dapat membantu dalam menentukan arah yang tepat untuk alokasi sumber daya. Ini memungkinkan pembuat kebijakan untuk memprediksi dampak dari keputusan mereka terhadap pasar dan perekonomian secara keseluruhan.

▷ **Menganalisis Biaya Peluang dalam Pengambilan Keputusan**

Biaya peluang adalah konsep kunci dalam ekonomi mikro yang menyatakan bahwa setiap pilihan yang diambil akan mengorbankan alternatif lain. Kebijakan ekonomi mikro yang baik harus mempertimbangkan biaya peluang dari setiap keputusan, baik itu dalam hal konsumsi, produksi, maupun investasi. Misalnya, pemerintah harus menilai apa yang dikorbankan saat memilih untuk mengalokasikan anggaran ke sektor tertentu daripada sektor lainnya.

Selain itu, pemerintah juga berperan dalam mengatur ekonomi mikro, seperti dalam penetapan harga barang dan perlindungan konsumen. Misalnya, melalui kebijakan subsidi untuk barang-barang penting atau regulasi harga untuk mencegah praktik monopoli yang merugikan konsumen.

c. Prinsip-Prinsip Dasar dalam Ekonomi Mikro

Dalam analisis ekonomi mikro, terdapat beberapa asumsi dasar yang sering digunakan untuk menyederhanakan model dan memberikan pemahaman yang lebih jelas. Asumsi ini melibatkan idealisasi tentang perilaku konsumen dan produsen serta kondisi pasar.

▷ **Berupaya Memaksimalkan Hasil atau Kepuasan**

Salah satu asumsi utama dalam ekonomi mikro adalah bahwa baik konsumen maupun produsen bertindak untuk memaksimalkan hasil atau kepuasan yang mereka dapatkan. Konsumen berusaha memaksimalkan kepuasan dengan pengeluaran yang terbatas, sementara produsen berusaha memaksimalkan laba dengan mengoptimalkan biaya produksi.

▷ **Kegiatan Ekonomi Berdasarkan Prinsip Kelangkaan**

Kelangkaan adalah salah satu asumsi fundamental dalam ekonomi mikro. Asumsi ini menganggap bahwa sumber daya selalu terbatas, sementara kebutuhan manusia tidak terbatas. Karena itu, semua keputusan ekonomi, baik itu konsumsi maupun produksi, didasarkan pada pengalokasian sumber daya yang terbatas secara efisien.

▷ **Perilaku Rasional Konsumen dan Produsen**

Dalam ekonomi mikro, diasumsikan bahwa konsumen dan produsen bertindak secara rasional, yang berarti mereka membuat keputusan berdasarkan informasi yang tersedia untuk memaksimalkan keuntungan atau kepuasan. Konsumen memilih barang atau jasa dengan mempertimbangkan harga dan manfaatnya, sementara produsen membuat keputusan berdasarkan biaya dan potensi keuntungan.



Proses memilih barang yang dilakukan konsumen merupakan bentuk perilaku rasional - Shutterstock.com.2572360751

Ekonomi Makro

a. Pemahaman dan Definisi Ekonomi Makro

Ekonomi makro mempelajari ekonomi secara keseluruhan, dengan fokus pada indikator agregat seperti inflasi, pengangguran, pendapatan nasional, dan kebijakan pemerintah. Berbeda dengan ekonomi mikro yang lebih menekankan pada keputusan individu dan pasar, ekonomi makro lebih tertuju pada fenomena dan kebijakan yang mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan.

Teori Keynesian, yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes dalam bukunya *The General Theory of Employment, Interest, and Money* (1936), mengemukakan bahwa pasar bebas tidak selalu dapat menghasilkan tingkat produksi dan lapangan kerja yang optimal, sehingga diperlukan intervensi pemerintah untuk menstabilkan perekonomian. Keynes berpendapat bahwa pemerintah harus bertindak aktif, terutama dengan kebijakan fiskal dan moneter, untuk mengatasi krisis ekonomi dan memperbaiki ketidakseimbangan pasar. Ekonomi makro juga mempelajari siklus ekonomi yang mencakup ekspansi, resesi, dan pemulihan yang mempengaruhi semua sektor perekonomian.

Tabel Perbedaan Ekonomi Mikro dan Makro

Aspek	Ekonomi Mikro	Ekonomi Makro
Harga	Ditentukan oleh penawaran dan permintaan individual di pasar.	Ditentukan oleh faktor agregat seperti inflasi dan kebijakan pemerintah.
Unit Analisis	Individu, rumah tangga, dan perusahaan.	Perekonomian nasional atau global.
Tujuan Analisis	Mengoptimalkan keputusan produksi dan konsumsi.	Mengelola kestabilan ekonomi dan pertumbuhan nasional.

b. Indikator-Indikator Ekonomi Makro yang Digunakan untuk Menilai Perkembangan Ekonomi

Indikator-indikator ekonomi makro digunakan untuk menilai kemajuan kegiatan ekonomi suatu negara. Beberapa indikator utama yang sering digunakan antara lain adalah neraca perdagangan, pendapatan nasional, tingkat pengangguran, dan inflasi. Data-data ini memberikan gambaran tentang kesehatan ekonomi, daya saing negara di pasar global, serta kesejahteraan masyarakat.

Misalnya, pendapatan per kapita dapat menunjukkan seberapa sejahtera masyarakat suatu negara, sementara angka pengangguran memberi tahu tingkat ketenagakerjaan yang tersedia.

▷ **Neraca Perdagangan dan Neraca Pembayaran**

Neraca perdagangan mencatat perbedaan antara ekspor dan impor suatu negara, sedangkan neraca pembayaran mencakup seluruh transaksi finansial yang melibatkan negara tersebut dengan negara lain. Neraca perdagangan yang positif menunjukkan bahwa negara tersebut mengekspor lebih banyak barang dan jasa daripada yang diimpor, yang dapat meningkatkan cadangan devisa dan menstabilkan ekonomi.

▷ **Pendapatan Nasional, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pendapatan Per Kapita**

Pendapatan nasional adalah total pendapatan yang diperoleh oleh seluruh penduduk dan sektor dalam suatu negara dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan peningkatan kapasitas produksi negara dari waktu ke waktu, sementara pendapatan per kapita memberikan gambaran rata-rata pendapatan setiap individu, yang sering digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat.

▷ **Tingkat Penggunaan Tenaga Kerja dan Pengangguran**

Tingkat pengangguran adalah salah satu indikator utama dalam ekonomi makro yang mencerminkan tingkat pemanfaatan tenaga kerja dalam perekonomian. Semakin rendah tingkat pengangguran, semakin tinggi pula tingkat penggunaan tenaga kerja, yang berhubungan langsung dengan pertumbuhan ekonomi.

▷ **Perubahan Harga atau Inflasi**

Inflasi mengukur tingkat kenaikan harga barang dan jasa dalam perekonomian. Inflasi yang tinggi dapat merugikan konsumen dan menurunkan daya beli, sementara inflasi yang terlalu rendah dapat menunjukkan kurangnya permintaan dalam perekonomian.

▷ **Stabilitas Nilai Tukar Mata Uang Negara**

Kestabilan nilai tukar mata uang suatu negara sangat penting untuk menjaga daya saing ekspor dan stabilitas ekonomi. Kurs yang fluktuatif dapat menyebabkan ketidakpastian dalam perdagangan internasional. Sebagai contoh, depreciasi nilai tukar dapat meningkatkan harga impor dan mendorong inflasi.

c. Strategi Kebijakan dalam Ekonomi Makro

Kebijakan ekonomi makro bertujuan untuk mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan dengan cara mengatur faktor-faktor agregat seperti inflasi, pengangguran, dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menggunakan berbagai instrumen kebijakan seperti kebijakan fiskal (pengeluaran pemerintah dan pajak) dan kebijakan moneter (pengaturan jumlah uang yang beredar) untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas perekonomian, meningkatkan lapangan kerja, dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

▷ **Tujuan-Tujuan Utama Kebijakan Ekonomi Makro**

● **Menjaga Keseimbangan Neraca Pembayaran dan Nilai Tukar Mata Uang**

Salah satu tujuan utama kebijakan ekonomi makro adalah menstabilkan neraca pembayaran dan nilai tukar mata uang. Ini penting untuk mencegah krisis ekonomi yang dapat muncul akibat defisit yang besar dalam neraca perdagangan atau volatilitas mata uang yang ekstrem. Kebijakan ini melibatkan langkah-langkah seperti pengendalian eksport-impor dan intervensi dalam pasar valuta asing.

- **Mendorong Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah salah satu tujuan utama kebijakan ekonomi makro. Sebagaimana diungkapkan oleh Michael T. Tiddaro dalam bukunya *Economics: A Policy Approach* (2006), kebijakan ekonomi yang berfokus pada investasi infrastruktur, inovasi, dan teknologi dapat mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi. Inovasi dan kemajuan teknologi memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi.

- **Mencapai Tingkat Penggunaan Tenaga Kerja Penuh Tanpa Inflasi**

Kebijakan ekonomi makro juga bertujuan untuk mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja yang optimal tanpa menyebabkan inflasi. Ini berarti pemerintah berusaha menyeimbangkan permintaan tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja secara efektif untuk memastikan tingkat pengangguran yang rendah dan inflasi yang stabil.

- **Menghindari Inflasi Berlebihan**

Inflasi yang tidak terkendali dapat merusak daya beli masyarakat dan menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan makro juga bertujuan untuk mengendalikan tingkat inflasi dengan menggunakan alat-alat kebijakan seperti pengaturan jumlah uang yang beredar dan pengendalian harga barang dan jasa.

- **Menjaga Kestabilan Ekonomi**

Kebijakan ekonomi makro berupaya menjaga kestabilan dalam perekonomian dengan mengurangi fluktuasi besar dalam produksi, konsumsi, dan lapangan kerja. Stabilitas ekonomi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan jangka panjang.

▷ **Aktualisasi Kebijakan Strategis Ekonomi Makro**

- **Kebijakan Moneter**

Kebijakan moneter, yang dilakukan oleh bank sentral, bertujuan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga dalam perekonomian. Ini mempengaruhi inflasi, nilai tukar, dan tingkat investasi. Kebijakan moneter yang ketat dapat menurunkan inflasi tetapi berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi.



Stabilitas harga komoditas merupakan ciri tercapainya kestabilan ekonomi -
Shutterstock.com.2446361631

- **Kebijakan Fiskal**

Kebijakan fiskal mengacu pada keputusan pemerintah mengenai pengeluaran dan pajak. Menurut teori Keynesian, kebijakan fiskal yang ekspansif (misalnya, peningkatan pengeluaran pemerintah) dapat digunakan untuk merangsang permintaan agregat dalam kondisi resesi.

- **Kebijakan yang Menargetkan Harga Barang yang Terjangkau dan Berkualitas**

Salah satu kebijakan ekonomi makro adalah memastikan barang yang diproduksi di negara tersebut memiliki harga yang terjangkau dan berkualitas baik. Untuk mencapainya, kebijakan harus mengatur pengendalian harga, efisiensi produksi, dan transparansi pasar.

- 1) Pengendalian upah agar tidak meningkat secara berlebihan. Kebijakan ini bertujuan untuk menghindari spiral inflasi, di mana kenaikan upah diikuti oleh kenaikan harga barang dan jasa. Pengendalian ini mencakup penetapan upah minimum yang adil namun tidak memicu inflasi.
- 2) Mendorong pengusaha untuk meningkatkan efisiensi biaya. Mengurangi biaya produksi tanpa mengorbankan kualitas dapat membantu menurunkan harga barang dan meningkatkan daya saing pasar. Pemerintah dapat mendukung ini dengan menyediakan insentif bagi pengusaha yang mengadopsi teknologi atau metode produksi yang lebih efisien.

Contoh Soal

Jelaskan perbedaan utama antara ekonomi mikro dan ekonomi makro serta bagaimana keduanya saling berhubungan dalam pengelolaan perekonomian suatu negara!

Pembahasan:

Ekonomi mikro berfokus pada studi tentang perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam mengambil keputusan terkait dengan alokasi sumber daya yang terbatas. Tujuan utama ekonomi mikro adalah memahami bagaimana keputusan konsumen dan produsen mempengaruhi harga, penawaran, dan permintaan di pasar.

Di sisi lain, ekonomi makro mempelajari perekonomian secara keseluruhan dengan menilai variabel agregat seperti inflasi, pengangguran, pendapatan nasional, dan kebijakan pemerintah. Ekonomi makro berfokus pada bagaimana kebijakan fiskal dan moneter dapat mengelola perekonomian secara keseluruhan untuk mencapai tujuan seperti pertumbuhan yang stabil dan pengurangan pengangguran.

Keduanya saling berhubungan karena kebijakan ekonomi makro (seperti pengeluaran pemerintah dan suku bunga) dapat mempengaruhi keputusan ekonomi mikro (seperti konsumsi dan investasi). Sebagai contoh, kebijakan moneter yang mempengaruhi suku bunga dapat mempengaruhi keputusan konsumen untuk berbelanja atau berinvestasi, yang pada gilirannya memengaruhi perekonomian secara keseluruhan.

Fakta Unik Seputar Ekonomi

UMKM Dominasi Ekonomi Indonesia

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, berkontribusi lebih dari 60% terhadap PDB dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di sektor non-pertanian. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya keputusan dan perilaku konsumen serta produsen dalam skala kecil yang membentuk ekonomi mikro Indonesia.



Zaemerci, UMKM di bidang fashion, salah satu dari sekian banyak UMKM di Indonesia- forbis.id



2. Kebijakan Moneter

Definisi dan Pengertian Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat, serta suku bunga, dengan tujuan utama untuk mencapai stabilitas ekonomi dan harga. Menurut Warjiyo dan Solikin (2003), kebijakan moneter juga bertujuan untuk mempengaruhi tingkat inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan melalui berbagai instrumen yang tersedia, seperti operasi pasar terbuka, suku bunga, dan cadangan wajib.

Fungsi dan Peranan Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter memiliki beberapa fungsi utama yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan perekonomian. Di antaranya adalah untuk menciptakan stabilitas harga, meningkatkan kesempatan kerja, serta memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Kebijakan ini dapat digunakan untuk merespons berbagai kondisi ekonomi, seperti inflasi yang tinggi atau resesi.

a. Peran Kebijakan Moneter dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi

Salah satu peran utama kebijakan moneter adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi, yang mencakup pengendalian inflasi dan memastikan adanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga, bank sentral dapat menciptakan kondisi yang lebih stabil, baik untuk konsumen maupun produsen, sehingga menciptakan kepercayaan yang lebih besar dalam perekonomian.

b. Peran Kebijakan Moneter dalam Menjaga Kestabilan Harga

Kebijakan moneter berperan penting dalam menjaga kestabilan harga barang dan jasa. Inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat dan menyebabkan ketidakpastian ekonomi. Dengan menggunakan alat kebijakan seperti pengaturan suku bunga atau operasi pasar terbuka, bank sentral dapat menurunkan inflasi dan menjaga harga tetap terkendali, yang pada gilirannya membantu menjaga kesejahteraan masyarakat.

c. Peran Kebijakan Moneter dalam Meningkatkan Lapangan Kerja

Kebijakan moneter juga dapat berperan dalam meningkatkan kesempatan kerja. Dengan menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan mendorong investasi melalui suku bunga yang rendah, kebijakan moneter dapat merangsang pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, yang pada akhirnya membuka lebih banyak lapangan kerja untuk masyarakat. Kebijakan moneter ekspansif, seperti penurunan suku bunga, sering digunakan untuk mempercepat penciptaan lapangan kerja.

d. Peran Kebijakan Moneter dalam Memperbaiki Neraca Perdagangan dan Neraca Pembayaran

Kebijakan moneter juga berperan dalam memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran negara. Dengan mempengaruhi nilai tukar mata uang, kebijakan moneter dapat meningkatkan daya saing ekspor dan mengurangi defisit perdagangan. Misalnya, penurunan suku bunga dapat menyebabkan depresiasi mata uang yang meningkatkan ekspor barang dan jasa, sehingga mengurangi defisit neraca perdagangan.



Bank Indonesia sebagai penentu kebijakan moneter di Indonesia - shutterstock.com.2258950229

Kebijakan moneter memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi jangka panjang. Dengan menciptakan stabilitas harga dan mendorong investasi, kebijakan moneter dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi. Selain itu, kebijakan moneter yang efektif dapat menjaga kepercayaan pasar dan investor, yang sangat penting untuk menarik investasi asing dan domestik, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor strategis dalam perekonomian.

Macam-Macam Kebijakan Moneter

Secara umum, terdapat dua jenis kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kedua jenis kebijakan ini digunakan untuk mengelola jumlah uang yang beredar dan mempengaruhi perekonomian, tergantung pada kondisi yang dihadapi.

a. Kebijakan Moneter Ekspansif

Kebijakan moneter ekspansif diterapkan dengan tujuan untuk merangsang perekonomian yang melambat atau mengalami resesi. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar dan menurunkan tingkat suku bunga, sehingga mendorong konsumsi dan investasi. Beberapa langkah yang diambil dalam kebijakan moneter ekspansif antara lain:

▷ Menurunkan Tingkat Suku Bunga

Penurunan suku bunga bertujuan untuk mendorong masyarakat dan bisnis untuk meminjam uang dan berinvestasi.

▷ Membeli Surat-Surat Berharga

Melalui operasi pasar terbuka, bank sentral membeli surat-surat berharga untuk menambah jumlah uang yang beredar di pasar.

▷ Menurunkan Cadangan Kas Minimum

Dengan menurunkan cadangan kas yang harus disimpan oleh bank, bank sentral memberi bank lebih banyak kebebasan untuk meminjamkan uang.

▷ Melonggarkan Pemberian Kredit

Kebijakan ini bertujuan untuk membuat pinjaman lebih mudah diakses oleh masyarakat dan bisnis, yang dapat merangsang kegiatan ekonomi.

b. Kebijakan Moneter Kontraktif

Sebaliknya, kebijakan moneter kontraktif diterapkan untuk mengendalikan inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Kebijakan ini biasanya diambil ketika perekonomian mengalami inflasi yang tinggi dan perlu dikendalikan agar tidak merusak daya beli masyarakat. Langkah-langkah dalam kebijakan moneter kontraktif antara lain:

▷ Menaikkan Tingkat Suku Bunga (*Increase in Interest Rates*)

Dengan menaikkan suku bunga, bank sentral mengurangi insentif bagi masyarakat untuk meminjam uang, yang pada gilirannya mengurangi pengeluaran dan inflasi.

▷ Menjual Surat-surat Berharga (*Selling Securities*)

Melalui operasi pasar terbuka, bank sentral menjual surat-surat berharga untuk menyerap uang yang beredar dalam perekonomian.



Sukuk adalah salah satu jenis surat berharga yang diterbitkan negara - djkn.kemenkeu.id

▷ **Menaikkan Cadangan Kas Minimum (Increasing Reserve Requirements)**

Bank sentral meningkatkan persyaratan cadangan kas minimum yang harus disimpan oleh bank, sehingga bank memiliki lebih sedikit uang untuk dipinjamkan kepada konsumen dan bisnis.

▷ **Membatasi Pemberian Kredit (Restricting Credit)**

Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah pinjaman yang diberikan kepada masyarakat dan bisnis, yang pada gilirannya membantu mengendalikan inflasi dan mengurangi tekanan terhadap harga.

Instrumen Kebijakan Moneter

Berdasarkan UU RI Nomor 4 Tahun 2023, yang merupakan perubahan dari UU RI Nomor 23 Tahun 1999, kebijakan moneter di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral dengan tujuan untuk menjaga kestabilan nilai rupiah, yang mencakup stabilitas harga dan stabilitas sistem keuangan. Instrumen kebijakan moneter yang digunakan oleh Bank Indonesia antara lain operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, kebijakan cadangan wajib minimum, pengaturan kredit, serta kebijakan dorongan moral.

Wewenang Bank Indonesia untuk menjalankan kebijakan moneter ini mencakup beberapa hal, yang dapat dirinci sebagai berikut:

- ▷ Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai kestabilan nilai rupiah.
- ▷ Menetapkan suku bunga acuan sebagai instrumen untuk mencapai target inflasi.
- ▷ Melakukan operasi pasar terbuka untuk mengatur jumlah uang yang beredar di perekonomian.
- ▷ Mengatur cadangan wajib minimum yang harus disimpan oleh bank-bank komersial.
- ▷ Menyusun kebijakan pengaturan kredit untuk menjaga kestabilan sistem keuangan.
- ▷ Memberikan dorongan moral kepada pelaku ekonomi untuk menjaga stabilitas ekonomi.
- ▷ Melakukan pengawasan terhadap sistem pembayaran dan menjaga kestabilan keuangan nasional.

Dengan instrumen-instrumen tersebut, Bank Indonesia dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar, suku bunga, dan tingkat inflasi dalam rangka mencapai tujuan kebijakan moneter.

a. Kebijakan Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)

Operasi pasar terbuka adalah salah satu instrumen utama yang digunakan Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Melalui operasi pasar terbuka, Bank Indonesia membeli atau menjual surat berharga jangka pendek untuk mengatur likuiditas.

Ketika Bank Indonesia membeli surat berharga, uang akan masuk ke pasar, sehingga jumlah uang yang beredar akan meningkat, yang dapat merangsang perekonomian. Sebaliknya, jika Bank Indonesia menjual surat berharga, uang akan diserap dari pasar, yang mengurangi jumlah uang yang beredar dan membantu mengendalikan inflasi.

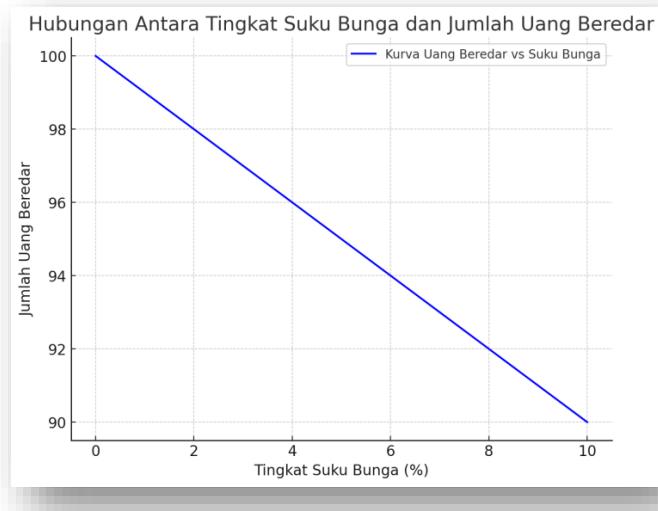
Operasi pasar terbuka adalah alat yang fleksibel dan efektif untuk mengontrol suku bunga pasar dan jumlah uang yang beredar. Dalam situasi ketika perekonomian melambat, Bank Indonesia dapat melakukan operasi pasar terbuka ekspansif untuk menambah likuiditas. Sebaliknya, ketika ekonomi terlalu panas dan inflasi tinggi, Bank Indonesia dapat melakukan operasi pasar terbuka kontraktif untuk menyerap likuiditas.

b. Kebijakan Diskonto (Discount Rate)

Kebijakan diskonto merujuk pada suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk pinjaman yang diberikan kepada bank-bank komersial. Kebijakan ini mempengaruhi tingkat suku bunga di pasar uang dan pada akhirnya dapat mempengaruhi keputusan investasi dan konsumsi. Jika Bank Indonesia

menurunkan suku bunga diskonto, bank-bank komersial akan lebih mudah untuk mendapatkan likuiditas dengan biaya yang lebih rendah, yang mendorong mereka untuk menurunkan suku bunga pinjaman kepada konsumen dan bisnis, sehingga meningkatkan konsumsi dan investasi.

Sebaliknya, jika Bank Indonesia menaikkan suku bunga diskonto, biaya pinjaman bagi bank akan meningkat, dan mereka cenderung menaikkan suku bunga kepada konsumen, yang dapat mengurangi konsumsi dan investasi. Kebijakan diskonto sering digunakan sebagai alat untuk menanggapi perubahan dalam kondisi ekonomi dan untuk menjaga inflasi agar tetap terkendali.



Kurva Hubungan Tingkat Suku Bungan dan Jumlah Uang Beredar - Dolah

Di atas adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar. Seperti yang dapat dilihat, kurva ini memiliki hubungan negatif, artinya semakin tinggi tingkat suku bunga, semakin rendah jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Hal ini karena suku bunga yang lebih tinggi akan mengurangi minat untuk meminjam uang, yang pada gilirannya mengurangi jumlah uang yang beredar.

c. Kebijakan Cadangan Wajib Minimum (Reserve Requirement)

Kebijakan cadangan wajib minimum adalah instrumen yang digunakan untuk mengatur berapa banyak cadangan yang harus disimpan oleh bank komersial di Bank Indonesia, sebagai persentase dari total simpanan yang dimiliki oleh nasabah. Kebijakan ini bertujuan untuk mengontrol jumlah uang yang dapat dipinjamkan oleh bank.

Jika Bank Indonesia menaikkan cadangan wajib minimum, bank akan memiliki lebih sedikit uang untuk dipinjamkan, yang mengurangi jumlah uang yang beredar di perekonomian dan membantu mengendalikan inflasi. Sebaliknya, jika Bank Indonesia menurunkan cadangan wajib minimum, bank akan memiliki lebih banyak uang untuk dipinjamkan, yang dapat merangsang konsumsi dan investasi.

d. Pengaturan Kredit

Pengaturan kredit adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengontrol pemberian kredit oleh bank-bank komersial. Kebijakan ini mencakup berbagai pembatasan atau insentif yang bertujuan untuk menjaga agar pemberian kredit tidak melampaui batas yang dapat menambah risiko inflasi dan ketidakstabilan sistem keuangan. Dalam mengatur kredit, Bank Indonesia menggunakan pendekatan 5C, yaitu:

- ▷ **Character (Karakter):** penilaian terhadap integritas dan reputasi peminjam.

- ▷ **Capability (Kemampuan):** Kemampuan peminjam dalam mengelola usaha dan membayar utang.
- ▷ **Collateral (Jaminan):** Barang atau aset yang dijadikan jaminan atas pinjaman yang diberikan.
- ▷ **Capital (Modal):** Modal yang dimiliki peminjam untuk mendukung kegiatan usaha.
- ▷ **Condition of Economy (Kondisi Ekonomi):** Faktor eksternal yang mempengaruhi kemampuan peminjam untuk membayar kembali pinjaman.

Dengan pendekatan ini, Bank Indonesia dapat menjaga kualitas kredit yang diberikan oleh bank dan memastikan bahwa pinjaman yang diberikan tetap aman dan tidak berisiko tinggi bagi perekonomian.

e. Kebijakan Dorongan Moral (Moral Persuasion)

Kebijakan dorongan moral adalah kebijakan yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk memberikan pengarahan atau dorongan kepada pelaku ekonomi untuk bertindak dengan cara yang mendukung kestabilan perekonomian. Meskipun kebijakan ini tidak bersifat langsung atau formal seperti kebijakan lainnya, namun dengan memberikan arahan kepada perbankan dan pelaku ekonomi lainnya, Bank Indonesia dapat mempengaruhi perilaku pasar untuk mencapai tujuan kebijakan moneter. Misalnya, Bank Indonesia dapat memberikan peringatan atau imbauan untuk menjaga kestabilan harga atau menghindari spekulasi yang berisiko tinggi.

Contoh Soal

Jelaskan bagaimana kebijakan moneter ekspansif dapat membantu mengatasi resesi dalam perekonomian!

Pembahasan:

Kebijakan moneter ekspansif bertujuan untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar dan menurunkan suku bunga. Dengan menurunkan suku bunga, pinjaman menjadi lebih murah, yang mendorong konsumen dan bisnis untuk meningkatkan pengeluaran dan investasi. Hal ini dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi tingkat pengangguran. Kebijakan ini sering diterapkan ketika perekonomian mengalami resesi atau kontraksi ekonomi.

Kegiatan Kelompok 1

Merumuskan Solusi Ekonomi dengan Kebijakan Moneter

Tujuan: Mencari solusi atas masalah ekonomi di Indonesia melalui kebijakan moneter.

Langkah Kegiatan:

1. Bentuk kelompok 3–5 orang.
2. Cari contoh masalah ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia.
3. Diskusikan kebijakan moneter yang dapat diterapkan sebagai solusi.
4. Catat hasilnya ke dalam tabel berikut.

No	Permasalahan Ekonomi	Solusi Kebijakan Moneter

Fakta Unik Seputar Ekonomi

Redenominasi Rupiah

Pada tahun 2013, Bank Indonesia (BI) sempat mengusulkan untuk melakukan redenominasi rupiah, yang berarti mengubah nilai nominal mata uang tanpa mengubah daya beli atau nilai riilnya. Misalnya, satu nilai nominal Rp10.000 akan menjadi Rp10 setelah redenominasi. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mempermudah transaksi dan administrasi keuangan dengan mengurangi jumlah angka pada uang kertas dan koin. Meskipun demikian, kebijakan ini belum dilaksanakan hingga kini. Sebagian besar masyarakat dan pelaku ekonomi merasa bahwa redenominasi dapat memberikan dampak psikologis yang besar., sehingga perlu ada persiapan yang matang dan edukasi kepada masyarakat agar prosesnya berjalan lancar.



Perlu persiapan matang dan edukasi yang masih kepada masyarakat agar gagasan ini siap direalisasikan -
shutterstock.com.2427817973

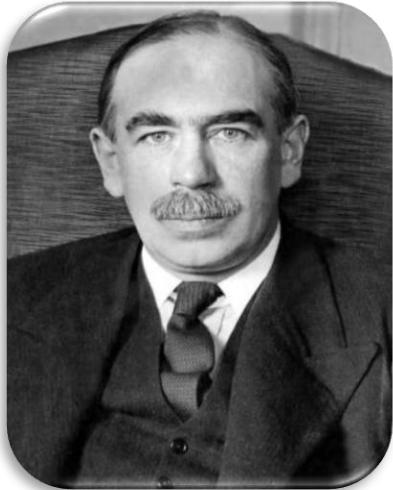


3. Kebijakan Fiskal

Definisi Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian. Berbeda dengan rumah tangga keluarga yang mengelola anggaran dengan cara menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran dalam skala kecil, pemerintah harus mengelola anggaran yang jauh lebih besar untuk memenuhi berbagai kebutuhan negara, seperti infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan sosial. Salah satu aspek yang

membedakan kebijakan fiskal negara dengan kebijakan ekonomi keluarga adalah tujuan utama dari pengelolaan keuangan negara adalah untuk mencapai kestabilan ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan.



John Maynard Keynes -
wikimedia.com

Sejarah kebijakan fiskal dimulai dengan pemikiran John Maynard Keynes pada 1930-an yang memperkenalkan gagasan pentingnya intervensi pemerintah dalam perekonomian, terutama dalam situasi resesi. Keynes berpendapat bahwa ketika sektor swasta tidak dapat lagi mendorong perekonomian, pemerintah harus mengambil alih dengan meningkatkan pengeluaran publik untuk merangsang permintaan dan mempercepat pemulihian ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan fiskal bertujuan untuk mengatur pengeluaran pemerintah dan pengumpulan pendapatan negara untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang lebih besar.

Dengan demikian, kebijakan fiskal mencakup kebijakan pengeluaran dan kebijakan perpajakan yang digunakan untuk mempengaruhi permintaan agregat dalam perekonomian. Negara akan menyesuaikan pengeluaran dan pajak yang dikenakan kepada

masyarakat berdasarkan kondisi perekonomian, yang bertujuan untuk mengatur inflasi, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Peran dan Fungsi Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian, terutama dalam mengatur keseimbangan antara pengeluaran pemerintah dan penerimaan negara. Fungsi kebijakan fiskal meliputi empat aspek utama: alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, stabilisasi perekonomian, dan pembangunan ekonomi. Kebijakan fiskal dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai pertumbuhan yang stabil dan merata, sambil memitigasi dampak negatif dari ketidakstabilan ekonomi.

Kebijakan fiskal bertindak sebagai instrumen yang efektif untuk mengarahkan perekonomian negara, termasuk menanggapi situasi krisis ekonomi, mengatur inflasi, dan memperbaiki ketimpangan sosial. Melalui pengaturan pengeluaran pemerintah dan kebijakan pajak, pemerintah dapat mempengaruhi arus uang dalam perekonomian serta memitigasi masalah ekonomi tertentu. Berikut ini fungsi dari kebijakan fiskal:

a. Fungsi Alokasi Sumber Daya

Fungsi alokasi sumber daya dalam kebijakan fiskal berfokus pada pengalokasian sumber daya untuk berbagai sektor ekonomi. Pemerintah menggunakan anggaran untuk mendanai berbagai proyek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lainnya yang dianggap vital untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan daya saing negara. Fungsi ini memastikan bahwa sumber daya yang terbatas dialokasikan secara maksimal bagi seluruh masyarakat.

b. Fungsi Distribusi Pendapatan

Fungsi distribusi pendapatan bertujuan untuk menciptakan pemerataan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat. Melalui kebijakan pajak yang progresif, pemerintah dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara kelompok masyarakat yang kaya dan miskin. Selain itu, melalui program subsidi dan bantuan sosial, kebijakan fiskal berusaha memastikan bahwa kelompok masyarakat yang lebih lemah juga mendapatkan akses ke pelayanan dasar yang dibutuhkan.

c. Fungsi Stabilisasi Ekonomi

Fungsi stabilisasi ekonomi dalam kebijakan fiskal bertujuan untuk menjaga kestabilan perekonomian dengan mengendalikan inflasi, deflasi, dan pengangguran. Dalam masa resesi, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran untuk merangsang permintaan, sementara dalam periode inflasi, pemerintah dapat mengurangi pengeluaran atau meningkatkan pajak untuk mengurangi tekanan inflasi. Fungsi ini membantu menjaga perekonomian dalam keadaan yang sehat dan mencegah terjadinya fluktuasi yang besar dalam siklus ekonomi.

d. Fungsi Pembangunan Ekonomi

Fungsi pembangunan ekonomi bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan mengarahkan pengeluaran negara untuk investasi dalam pembangunan infrastruktur, teknologi, dan sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal pembangunan ini tidak hanya berfokus pada pemulihian ekonomi jangka pendek, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja dan pengembangan kapasitas produktif yang dapat mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Klasifikasi Kebijakan Fiskal

a. Kebijakan Fiskal Ekspansif

Kebijakan fiskal ekspansif bertujuan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dengan cara menambah pengeluaran pemerintah atau mengurangi pajak. Kebijakan ini biasanya diterapkan pada saat perekonomian sedang mengalami resesi atau pertumbuhan yang sangat lambat. Dengan menambah pengeluaran untuk infrastruktur, pendidikan, dan sektor lainnya, pemerintah berusaha untuk merangsang permintaan agregat dalam perekonomian.

b. Kebijakan Fiskal Kontraktif

Kebijakan fiskal kontraktif (atau kebijakan penghematan) diterapkan untuk mengendalikan inflasi dan memperbaiki defisit anggaran pemerintah. Penerapan kebijakan fiskal kontraktif biasanya dilakukan dengan menurunkan pengeluaran pemerintah dan menaikkan pajak. Dengan cara ini, permintaan agregat dapat dikendalikan, dan inflasi dapat ditekan. Di negara-negara dengan defisit anggaran yang besar, kebijakan fiskal kontraktif penting untuk menyeimbangkan anggaran dan menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang.

Instrumen Kebijakan Fiskal

Instrumen kebijakan fiskal mencakup berbagai alat yang digunakan pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian melalui pengeluaran dan penerimaan negara. Beberapa instrumen utama dalam kebijakan fiskal termasuk sistem perpajakan, politik anggaran, serta pengaturan dan pembagian anggaran negara. Pemerintah menggunakan instrumen ini untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu, seperti pertumbuhan yang stabil, pengendalian inflasi, dan pengurangan pengangguran.

a. Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan adalah instrumen fiskal yang sangat penting untuk pendanaan pengeluaran pemerintah. Dengan mengenakan pajak pemerintah dapat mengumpulkan dana untuk membiayai berbagai program dan kebijakan. Kebijakan pajak dapat bersifat progresif, yang berpendapatan lebih tinggi dikenakan tarif pajak lebih tinggi, atau regresif, pajak dikenakan secara merata.



Coretax, official portal digital direktorat jenderal perpajakan RI - pajak.go.id

b. Politik Anggaran

Politik anggaran mencakup pengaturan dan pengelolaan dana negara untuk membiayai kegiatan pemerintah. Pembagian anggaran yang tidak berimbang sering menjadi masalah dalam politik anggaran, di mana pengeluaran negara lebih besar daripada penerimaan. Hal ini dapat menyebabkan defisit anggaran yang mengarah pada peningkatan utang publik. Pembagian anggaran yang tidak merata dapat menghambat efisiensi penggunaan dana negara dan menciptakan ketimpangan dalam sektor-sektor penting.

▷ Anggaran Defisit

Anggaran defisit terjadi ketika pengeluaran melebihi penerimaan yang diperoleh dari pajak dan sumber lainnya. Untuk menutupi defisit ini, pemerintah biasanya akan meminjam uang atau meningkatkan utang publik. Meskipun dalam jangka pendek defisit dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, dalam jangka panjang hal ini dapat meningkatkan beban utang negara dan menambah tekanan fiskal.

▷ Anggaran Surplus

Anggaran surplus terjadi ketika penerimaan pemerintah melebihi pengeluaran. Surplus anggaran memungkinkan pemerintah untuk mengurangi utang publik, meningkatkan cadangan fiskal, atau meningkatkan investasi di sektor-sektor strategis seperti infrastruktur dan pendidikan. Meskipun surplus anggaran dapat memberikan stabilitas fiskal, jika terlalu lama, kebijakan ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dengan membatasi pengeluaran pemerintah yang dibutuhkan untuk merangsang permintaan.

Fakta Unik Seputar Ekonomi

Anggaran Covid-19

Pada tahun 2020, Indonesia mengalokasikan anggaran yang besar untuk menangani dampak ekonomi dari pandemi COVID-19. Pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal ekspansif dengan menyuntikkan dana sebesar Rp 695,2 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN), yang mencakup bantuan langsung tunai, insentif pajak, dan subsidi untuk sektor-sektor yang terdampak.

Di sisi lain, pada tahun yang sama, untuk pertama kalinya sejak 2001, mengalami defisit anggaran lebih dari 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang sebelumnya diatur dalam UU Keuangan Negara. Pemerintah memutuskan untuk mengubah batas defisit anggaran ini sebagai respons terhadap kebutuhan pembiayaan penanganan pandemi.



Bantuan langsung tunai sebagai agenda pemulihan ekonomi rakyat saat pandemi - shutterstock.com. 2035468319

Contoh Soal

Jelaskan bagaimana kebijakan fiskal ekspansif dapat mempengaruhi perekonomian dalam situasi resesi!

Pembahasan:

Kebijakan fiskal ekspansif diterapkan oleh pemerintah untuk merangsang perekonomian yang melambat, seperti pada saat resesi. Dalam kebijakan ini, pemerintah meningkatkan pengeluaran publik untuk berbagai sektor, seperti infrastruktur dan program sosial, atau mengurangi pajak untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan menambah pengeluaran, permintaan agregat di pasar akan meningkat, yang mendorong perusahaan untuk meningkatkan produksi dan menciptakan lapangan kerja. Hal ini dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pengurangan pajak memberi lebih banyak uang kepada konsumen dan bisnis, yang mendorong konsumsi dan investasi, sehingga mempercepat pemulihan ekonomi.

Kegiatan Kelompok 2

Menganalisis Dampak Kebijakan Fiskal

Tujuan: Menyebutkan contoh kebijakan fiskal di Indonesia dan dampaknya terhadap perekonomian.

Langkah Kegiatan:

1. Bentuk kelompok 3–5 orang.
2. Cari minimal tiga contoh kebijakan fiskal yang pernah diterapkan.
3. Diskusikan dampak kebijakan tersebut bagi perekonomian Indonesia.
4. Catat hasil diskusi ke dalam tabel berikut.

No	Kebijakan Fiskal	Dampak terhadap Perekonomian Indonesia



4. APBN dan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

a. Pengertian, Fungsi, dan Tujuan Penyusunan APBN

APBN adalah rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah untuk mengatur pendapatan dan belanja negara. APBN memuat anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang harus dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Penyusunan APBN bertujuan untuk menciptakan kestabilan ekonomi, mengelola sumber daya keuangan negara secara efektif, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

▷ Pengertian APBN

Menurut UUD 1945, APBN merupakan alat untuk memanage pendapatan dan pengeluaran negara dalam rangka mencapai tujuan negara. APBN terdiri dari lima unsur utama, yaitu:

- **Pendapatan negara**, yaitu semua penerimaan negara dari pajak dan non-pajak.
- **Belanja negara**, yakni pengeluaran pemerintah untuk mendanai kebutuhan negara.
- **Pembiayaan**, ialah pembiayaan yang mencakup utang negara dan kegiatan lainnya untuk menutupi defisit anggaran.
- **Anggaran pendapatan**, yaitu pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk pajak, hibah, dan pendapatan negara lainnya.
- **Anggaran belanja**, yakni pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk menjalankan berbagai program dan kebijakan nasional

Adapun menurut UU RI Nomor 17 Tahun 2003, APBN adalah instrumen keuangan tahunan yang dirancang untuk menjalankan dan mengatur kegiatan negara, dan ditetapkan oleh UU setiap tahunnya. APBN disusun dan ditetapkan oleh pemerintah dan DPR setiap tahunnya dengan berfokus pada tiga aspek utama: anggaran pendapatan, belanja negara, dan pembiayaan.

▷ Fungsi APBN

Berdasarkan UU RI Nomor 17 Tahun 2003 yang telah diubah dengan UU RI Nomor 2 Tahun 2020, APBN memiliki beberapa fungsi penting dalam perekonomian, yaitu:

- **Fungsi otorisasi**, yakni memberikan otorisasi atau izin kepada pemerintah untuk mengelola dan menggunakan sumber daya negara.
- **Fungsi perencanaan**, yakni menjadi dasar bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan negara untuk tahun anggaran yang akan datang.
- **Fungsi pengawasan**, yaitu menjadi alat untuk mengawasi pelaksanaan anggaran, memastikan pengelolaan dana negara berjalan sesuai dengan ketentuan.
- **Fungsi alokasi**, yakni mengalokasikan dana untuk berbagai program dan sektor yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional.
- **Fungsi distribusi**, yaitu mendistribusikan sumber daya untuk menciptakan pemerataan dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi.
- **Fungsi stabilisasi**, yakni menjaga stabilitas perekonomian, mengontrol inflasi dan mengurangi pengangguran, serta merangsang pertumbuhan ekonomi.

▷ **Tujuan Penyusunan APBN**

Penyusunan APBN bertujuan untuk menciptakan kestabilan ekonomi, mengatur pengeluaran pemerintah secara efisien, serta mengoptimalkan pendapatan negara. Dengan APBN yang baik, pemerintah dapat merencanakan pengeluaran yang diperlukan untuk mendanai berbagai kegiatan pembangunan, sambil memastikan bahwa pendapatan yang diperoleh dari pajak dan non-pajak cukup untuk membiayai anggaran tersebut. Tujuan lainnya adalah untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan akan digunakan untuk kemakmuran rakyat serta mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional.

b. Sumber-Sumber Penerimaan dan Jenis-Jenis Belanja Negara

▷ **Sumber-Sumber Penerimaan Negara**

Penerimaan negara diperoleh dari beberapa sumber utama yang terdiri dari pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah.

- **Penerimaan perpajakan**, yaitu pendapatan negara yang diperoleh dari pajak dalam negeri mencakup pajak penghasilan, pajak barang dan jasa, serta pajak lainnya yang dipungut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, penerimaan pajak perdagangan internasional juga menyumbang pada pendapatan negara, seperti pajak impor dan ekspor. Penerimaan ini sangat penting untuk membiayai anggaran negara dan mendukung pembangunan.
- **Penerimaan negara bukan pajak**, yakni semua penerimaan negara bukan pajak meliputi pendapatan yang berasal dari sektor lain selain pajak, seperti hasil pengelolaan kekayaan negara, penerimaan dari kegiatan usaha negara, dan lainnya yang tidak berbentuk pajak langsung.
- **Penerimaan hibah**, ialah penerimaan hibah merupakan dana yang diterima negara dari luar negeri atau lembaga internasional tanpa kewajiban pengembalian. Hibah ini biasanya digunakan untuk mendanai proyek pembangunan atau kegiatan sosial tertentu.

▷ **Jenis-Jenis Belanja Negara**

Belanja negara terdiri dari berbagai jenis yang dikategorikan berdasarkan organisasi, fungsi, dan jenisnya. Pengelolaan belanja negara harus dilakukan dengan efisien agar dapat mencapai tujuan pembangunan dengan optimal.

- **Belanja pemerintah berdasarkan organisasi**, tipe belanja ini dikategorikan berdasarkan instansi atau lembaga pemerintah yang melaksanakan kegiatan belanja, seperti belanja kementerian dan lembaga negara.
- **Belanja pemerintah berdasarkan fungsi**, mencakup pengeluaran untuk sektor-sektor tertentu, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.
- **Belanja pemerintah berdasarkan jenis**, tipe belanja ini mengelompokkan pengeluaran berdasarkan kebutuhan spesifik, misalnya belanja untuk pembangunan fisik, belanja sosial, atau belanja administratif.



Setiap barang yang masuk dan keluar Indonesia dikenakan bea (tarif), yang akan diakui sebagai pendapatan negara - shutterstock.com.
2004459359

▷ **Istilah-istilah dalam Penerimaan dan Belanja Negara**

- **Transfer ke daerah**, yakni transfer ke daerah adalah alokasi dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membiayai program pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah masing-masing.
- **Dana perimbangan**, adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan di daerah, dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan antar wilayah.
- **Dana bagi hasil (DBH)**, adalah dana yang diberikan kepada daerah berdasarkan hasil penerimaan pajak dan sumber daya alam yang dikelola oleh daerah tersebut.
- **Dana alokasi umum (DAU)**, ialah dana yang diberikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan di daerah secara umum, yang dianggarkan dalam APBN.
- **Dana alokasi khusus (DAK)**, diberikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan tertentu yang memiliki prioritas nasional, seperti pendidikan dan kesehatan.
- **Dana otonomi khusus**, diberikan kepada daerah-daerah yang memiliki status otonomi khusus untuk mempercepat pembangunan di daerah tersebut.
- **Dana penyesuaian**, adalah dana yang dialokasikan untuk daerah yang mengalami perubahan signifikan dalam struktur perekonomiannya.
- **Tabungan pemerintah**, adalah sisa dari penerimaan negara setelah dikurangi pengeluaran negara yang digunakan untuk menambah cadangan negara.

c. Mekanisme Penyusunan APBN dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian

▷ **Mekanisme Penyusunan APBN**

Penyusunan APBN dilakukan melalui tahapan yang melibatkan pemerintah, DPR, dan masyarakat dalam perencanaan anggaran negara.

● **Prinsip Penyusunan APBN**

Prinsip penyusunan APBN terdiri dari berbagai aspek yang mempengaruhi keseimbangan pendapatan dan pengeluaran negara, diantaranya:

- 1) Berdasarkan aspek pendapatan, yaitu dengan memperhitungkan proyeksi pendapatan negara yang realistik dan mencakup berbagai sektor.
- 2) Berdasarkan aspek pengeluaran, yakni dengan mengalokasikan dana untuk sektor-sektor yang mendukung pembangunan nasional.

● **Asas Penyusunan APBN**

Penyusunan APBN didasarkan pada asas keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam menyusun anggaran yang adil dan tepat guna.

● **Landasan Hukum APBN**

Penyusunan APBN memiliki landasan hukum yang jelas berdasarkan UUD 1945, UU RI Nomor 17 Tahun 2003, dan UU RI Nomor 1 Tahun 2022 sebagai dasar hukum yang sah untuk menjalankan kebijakan fiskal.

● **Cara Penyusunan APBN**

Proses penyusunan APBN melibatkan penyusunan anggaran oleh pemerintah yang kemudian diserahkan kepada DPR untuk dibahas dan disetujui sebelum ditetapkan menjadi undang-undang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

a. Pengertian, Fungsi, dan Tujuan Penyusunan APBD

▷ Pengertian APBD

APBD adalah rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran daerah. Berdasarkan UU RI No.1 Tahun 2022, APBD merupakan instrumen yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan masa anggaran selama satu tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember. APBD disusun untuk memastikan bahwa pendapatan daerah cukup untuk membiayai kebutuhan belanja daerah dan mendukung berbagai kegiatan pembangunan daerah yang menguntungkan masyarakat.

▷ Fungsi APBD

APBD memiliki beberapa fungsi penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Fungsi utamanya adalah sebagai dasar perencanaan dan pengawasan anggaran, serta pengalokasian dana untuk berbagai sektor pembangunan daerah. Berdasarkan UU No.1 Tahun 2022, fungsi-fungsi utama APBD adalah:

- **Fungsi otorisasi**, yakni dengan memberikan otorisasi kepada pemerintah daerah untuk menggunakan dana yang tersedia untuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dalam APBD.
- **Fungsi perencanaan**, dimana APBD berfungsi sebagai alat perencanaan untuk menentukan prioritas kegiatan dan pengalokasian anggaran daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan daerah.
- **Fungsi pengawasan**, yakni yang berkaitan dengan pengawasan terhadap penggunaan anggaran, baik oleh eksekutif (pemerintah daerah) maupun legislatif, untuk memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
- **Fungsi alokasi**, dengan mengalokasikan dana untuk berbagai kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya.
- **Fungsi distribusi**, dengan memastikan distribusi anggaran yang adil dan merata di berbagai sektor dan daerah, sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.
- **Fungsi stabilisasi**, yakni dengan menggunakan APBD sebagai alat untuk menjaga kestabilan ekonomi daerah, mengendalikan inflasi, dan mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi.

▷ Tujuan Penyusunan APBD

Tujuan utama penyusunan APBD adalah untuk memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan membiayai berbagai program dan proyek pembangunan. Penyusunan APBD juga bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan tepat sasaran, efisien, dan efektif dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang sejalan dengan kebijakan nasional.

b. Sumber-Sumber Penerimaan dan Jenis-Jenis Belanja Daerah

▷ Sumber-Sumber Penerimaan Negara

Penerimaan negara terdiri dari berbagai sumber yang termasuk pajak, pendapatan non-pajak, dan hibah, yang selanjutnya dialokasikan untuk mendanai anggaran belanja daerah.

● Pendapatan Daerah

1) PAD (pendapatan asli daerah)



Yakni pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber daya yang dimiliki oleh daerah itu sendiri, seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. PAD sangat penting untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan.

Setiap bus yang masuk kawasan terminal dikenakan retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah - shutterstock.com/2455937999

2) Dana Perimbangan

- a) Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam merupakan dana yang diterima daerah dari pemerintah pusat sebagai bagian dari pendapatan pajak dan sumber daya alam yang dikelola oleh pemerintah pusat. Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004, pembagian dana bagi hasil dilakukan dengan proporsi 10:90 antara pemerintah pusat dan daerah, yang artinya 10% dari hasil pajak dan sumber daya alam diberikan kepada daerah penghasil, sedangkan 90% lainnya tetap dikelola oleh pemerintah pusat. Ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di daerah penghasil dan menciptakan pemerataan.
- b) Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Alokasi dana ini bersifat umum dan tidak terbatas pada satu sektor tertentu, memberikan fleksibilitas pada pemerintah daerah dalam pengelolaannya. Pemerintah pusat menetapkan jumlah DAU berdasarkan kebutuhan daerah dan kriteria tertentu seperti jumlah penduduk dan kapasitas fiskal daerah.
- c) Dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang diberikan untuk mendanai kegiatan tertentu yang memiliki prioritas nasional, seperti pembangunan infrastruktur atau proyek sosial yang mendukung program pemerintah pusat.
- d) Pendapatan Lainnya
Pendapatan lainnya mencakup sumber pendapatan lain yang diterima daerah, seperti hibah, donasi, atau sumbangan dari masyarakat dan lembaga lain yang tidak memiliki kewajiban untuk dibayar kembali.

● Pembiayaan

Pembiayaan dalam APBD mencakup utang yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan pembangunan yang tidak bisa dibiayai dengan pendapatan daerah. Pembiayaan dapat dilakukan melalui pinjaman atau penerbitan obligasi.

▷ **Jenis-Jenis Belanja Daerah**

Belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Jenis-jenis belanja daerah dibagi berdasarkan beberapa kriteria, seperti urusan pemerintahan, fungsi, organisasi, dan program yang dilaksanakan. Pembagian ini bertujuan untuk memastikan alokasi yang efisien dan efektif dari anggaran yang tersedia, serta mendukung prioritas pembangunan daerah. Berikut beberapa klasifikasi belanja yang berdasarkan pada fungsi dan tujuannya.

- **Belanja daerah berdasarkan urusan pemerintah**, ialah belanja yang ditangani oleh pemerintah daerah, baik urusan wajib (seperti pendidikan dan kesehatan) maupun urusan pilihan yang lebih spesifik untuk daerah tertentu. Pengeluaran untuk urusan wajib ini biasanya mendominasi anggaran daerah, karena terkait langsung dengan pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat. Adapun belanja urusan pilihan lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan prioritas daerah masing-masing.
- **Belanja daerah berdasarkan fungsi**, yakni mengacu pada pengeluaran untuk sektor-sektor tertentu, seperti belanja untuk pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya), pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat), dan untuk pemerintahan serta administrasi (gaji pegawai, biaya operasional kantor pemerintah, dan biaya administrasi lainnya).
- **Belanja daerah berdasarkan organisasi dan program**, dimana belanja daerah dapat diklasifikasikan berdasarkan organisasi yang mengelola anggaran tersebut, yaitu kementerian, lembaga pemerintah daerah, atau instansi lain. Setiap organisasi memiliki program-program yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, seperti program pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur. Pengelompokan ini memungkinkan pemerintahan daerah untuk mengalokasikan anggaran dengan lebih jelas dan terstruktur sesuai dengan program prioritas yang ada.
- **Belanja daerah berdasarkan kelompok belanja**, dimana diklasifikasikan lagi dalam dua kategori utama. Pertama, kelompok belanja tidak langsung, yaitu pengeluaran untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program, seperti gaji pegawai dan pembayaran utang. Klasifikasi yang kedua adalah kelompok belanja langsung, yakni pengeluaran yang langsung terkait dengan pelaksanaan program atau proyek pembangunan, seperti pembiayaan infrastruktur atau kegiatan sosial.

c. Mekanisme Penyusunan APBD dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian

▷ **Mekanisme Penyusunan APBD**

Penyusunan APBD dimulai dengan rancangan kebijakan umum APBD yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah. Proses penyusunan ini melibatkan evaluasi oleh berbagai pihak, termasuk Mendagri, gubernur, dan lembaga legislatif daerah. Setelah melalui pembahasan dan evaluasi, APBD kemudian disahkan oleh DPRD dan diberlakukan untuk tahun anggaran yang ditentukan.

▷ **Pengaruh APBD terhadap Perekonomian**

APBD memiliki pengaruh langsung terhadap perekonomian daerah, karena anggaran ini digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan pengelolaan APBD yang baik, diharapkan dapat tercipta peningkatan infrastruktur, pelayanan publik yang lebih baik, serta penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Contoh Soal

Jelaskan peran dan fungsi APBD dalam perekonomian daerah!

Pembahasan:

APBD berfungsi sebagai instrumen utama dalam pengelolaan keuangan daerah, yang bertujuan untuk memastikan penggunaan dana negara yang efisien dan tepat sasaran. Fungsi utama APBD adalah:

1. Fungsi Otorisasi: Memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran yang telah disetujui dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan.
2. Fungsi Perencanaan: Sebagai dasar bagi perencanaan kegiatan dan program pembangunan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Fungsi Pengawasan: Menjadi alat untuk mengawasi penggunaan anggaran daerah agar sesuai dengan peraturan yang ada dan menghindari penyalahgunaan dana.
4. Fungsi Alokasi: Mengalokasikan dana untuk berbagai sektor yang menjadi prioritas daerah, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
5. Fungsi Distribusi: Memastikan distribusi dana yang adil antar sektor dan daerah guna mencapai pemerataan pembangunan.
6. Fungsi Stabilisasi: Menjaga stabilitas ekonomi daerah dengan mengendalikan inflasi dan pengangguran melalui pengaturan anggaran yang efektif.

Melalui APBD, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa pengeluaran dan penerimaan negara berjalan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Fakta Unik Seputar Ekonomi

APBD DKI Jakarta dan Anggaran yang Terbesar di Indonesia

DKI Jakarta selalu menjadi pusat perhatian karena memiliki APBD terbesar di Indonesia. Pada tahun 2021, APBD DKI Jakarta mencapai lebih dari Rp 87 triliun, dengan salah satu anggaran terbesar adalah untuk transportasi publik dan infrastruktur. Anggaran besar ini menarik perhatian masyarakat karena terkait dengan proyek-proyek besar yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari, seperti MRT, LRT, dan pembangunan taman kota.



Monas (Monumen Nasional) -
shutterstock.com.2125107920

Rangkuman

- ▷ Ekonomi mikro dan makro merupakan dua bidang utama dalam ilmu ekonomi yang saling berkaitan, namun memiliki fokus yang berbeda. Ekonomi mikro mempelajari keputusan ekonomi individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam mengelola sumber daya. Sedangkan ekonomi makro menganalisis perekonomian secara keseluruhan, termasuk inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi.
- ▷ Ekonomi mikro dan makro saling mempengaruhi dalam pengelolaan perekonomian. Keputusan dalam ekonomi mikro, seperti harga dan konsumsi, dapat mempengaruhi kondisi makro, seperti inflasi dan pertumbuhan. Adapun kebijakan makro, seperti kebijakan moneter dan fiskal, mempengaruhi keputusan ekonomi mikro seperti investasi dan konsumsi.
- ▷ Kebijakan moneter berfokus pada pengaturan jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga oleh bank sentral untuk mencapai stabilitas ekonomi. Dua tipe kebijakan moneter, yaitu kebijakan ekspansif dan kontraktif memiliki dampak yang berbeda terhadap inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, kebijakan moneter menggunakan instrumen seperti operasi pasar terbuka, suku bunga, dan cadangan wajib minimum untuk mengelola perekonomian.
- ▷ Kebijakan moneter berfungsi untuk menjaga kestabilan ekonomi dengan mempengaruhi jumlah uang yang beredar, suku bunga, dan inflasi. Tingkat inflasi yang stabil akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang selanjutnya dioptimalkan dengan kebijakan moneter ekspansif konsumsi dan investasi dalam kondisi resesi.
- ▷ Kebijakan fiskal adalah kebijakan pengeluaran dan perpajakan pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi dan pembangunan. Kebijakan fiskal berperan untuk menyusun anggaran yang dapat mendanai sektor-sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
- ▷ Kebijakan fiskal memiliki berbagai fungsi yang berfokus pada pengelolaan ekonomi negara dan daerah. Fungsi utamanya meliputi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi perekonomian.
- ▷ Tujuan utama kebijakan fiskal adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, mengurangi pengangguran, dan memastikan pemerataan pembangunan. Pemerintah juga menggunakan kebijakan fiskal untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur publik yang mendukung perekonomian. Selain itu, kebijakan fiskal jadi upaya untuk mengurangi ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin melalui distribusi yang lebih adil.
- ▷ APBN adalah rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. APBN berfungsi untuk menyusun prioritas pengeluaran negara dan memastikan pengelolaan keuangan negara yang efisien, yang meliputi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- ▷ APBN memiliki fungsi untuk mendanai kegiatan pemerintah, mengatur kebijakan fiskal, dan memastikan stabilitas perekonomian. Diantara program pemerintah, ialah pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Instrumen kebijakan fiskal juga digunakan pemerintah untuk menanggulangi inflasi dan pengangguran.
- ▷ APBD adalah anggaran tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. APBD memungkinkan daerah untuk merencanakan dan mendanai pembangunan serta pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal. APBD bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lainnya dari hibah atau sumber lain.
- ▷ APBD berperan penting dalam pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. APBD digunakan untuk merencanakan dan mendanai sektor-sektor penting yang mendukung

pertumbuhan daerah, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. APBD juga berfungsi untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah dengan mengelola alokasi anggaran untuk kebutuhan dasar.

- ▷ Baik APBN maupun APBD berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional dan daerah, melalui pengelolaan pendapatan dan belanja negara. APBN dan APBD dapat merangsang aktivitas ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan alokasi yang tepat, APBN dan APBD dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah dan kelompok masyarakat.
- ▷ Penyusunan APBN dan APBD melibatkan berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, evaluasi, hingga pengesahan. Tidak luput juga, evaluasi dan pengesahan APBN maupun APBD yang melibatkan partisipasi publik dan stakeholder.
- ▷ Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBN dan APBD sangat penting untuk memastikan bahwa dana publik digunakan dengan efektif dan efisien. Dalam hal ini, masyarakat dan lembaga pengawasan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa penggunaan anggaran negara dan daerah sesuai dengan peruntukannya.

Latihan Soal

1. Dalam ekonomi mikro, hukum permintaan menyatakan bahwa, jika harga suatu barang naik, maka...
 - A. Permintaan barang tersebut meningkat
 - B. Permintaan barang tersebut menurun
 - C. Penawaran barang tersebut menurun
 - D. Penawaran barang tersebut meningkat
 - E. Tidak ada perubahan dalam permintaan
2. Dalam teori ekonomi makro, yang dimaksud dengan inflasi adalah..
 - A. Penurunan jumlah uang yang beredar
 - B. Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode
 - C. Penurunan pengeluaran pemerintah
 - D. Meningkatnya pengangguran di pasar tenaga kerja
 - E. Menurunnya daya beli masyarakat
3. Kebijakan moneter ekspansif biasanya dilakukan untuk...
 - A. Mengurangi inflasi yang tinggi
 - B. Meningkatkan pengangguran
 - C. Meningkatkan jumlah uang yang beredar untuk merangsang perekonomian
 - D. Menurunkan suku bunga jangka panjang
 - E. Mengurangi jumlah uang yang beredar di pasar
4. Salah satu tujuan kebijakan fiskal adalah...
 - A. Mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat
 - B. Meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk merangsang perekonomian
 - C. Menurunkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi
 - D. Menetapkan tarif pajak yang lebih tinggi untuk mengurangi pengangguran
 - E. Mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri
5. Apa yang dimaksud dengan kebijakan moneter kontraktif?
 - A. Kebijakan yang mengurangi jumlah uang yang beredar untuk menurunkan inflasi
 - B. Kebijakan yang meningkatkan jumlah uang yang beredar untuk merangsang perekonomian
 - C. Kebijakan yang mengatur pajak untuk menstabilkan harga
 - D. Kebijakan yang meningkatkan belanja pemerintah
 - E. Kebijakan yang menurunkan suku bunga untuk merangsang konsumsi
6. Dalam konteks kebijakan fiskal, anggaran defisit berarti...
 - A. Pengeluaran pemerintah melebihi pendapatan yang diterima
 - B. Pengeluaran pemerintah lebih rendah dari pendapatan yang diterima
 - C. Pemerintah tidak memungut pajak dari masyarakat
 - D. Anggaran negara tidak disetujui oleh legislatif
 - E. Pemerintah mengurangi pembiayaan utang
7. Apa yang menjadi fokus utama dalam kebijakan moneter ekspansif?
 - A. Mengurangi inflasi
 - B. Mengurangi jumlah uang yang beredar
 - C. Meningkatkan pengangguran
 - D. Menurunkan suku bunga dan meningkatkan jumlah uang yang beredar
 - E. Meningkatkan pajak untuk mengurangi defisit anggaran

8. Salah satu instrumen yang digunakan dalam kebijakan fiskal untuk merangsang ekonomi adalah...
- A. Pengaturan jumlah uang yang beredar
 - B. Pengurangan pengeluaran pemerintah
 - C. Peningkatan pajak bagi perusahaan
 - D. Penurunan pajak dan peningkatan belanja pemerintah
 - E. Penerbitan surat utang negara

**Akses latihan soal
lainnya di sini yuk!**

**Latihan Soal Ekonomi
Kelas 11 BAB 5**



Referensi

- Bank Indonesia. (2020). Kebijakan Moneter di Indonesia: Menjaga Stabilitas Ekonomi dalam Masa Pandemi. Jakarta: Bank Indonesia.
- Haris, S. (2018). Penyusunan dan Pengelolaan APBN dan APBD di Indonesia. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Laporan APBN 2021. Diakses dari: www.kemenkeu.go.id
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Panduan Penyusunan APBD. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Mankiw, N. G. (2018). Principles of Economics (8th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Sujan, M., & Sumarto, S. (2019). Peran APBN dan APBD dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 12(3), 45-56.
- Tim Penyusun, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Analisis dan Evaluasi APBN. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara.
- Tirole, J. (2006). The Theory of Corporate Finance. Princeton: Princeton University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (2003). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kebijakan Fiskal Negara. (2022). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (2004). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (2020). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.